

**ANALISIS WACANA KRITIS TEKS GERAKAN 30 SEPTEMBER
PADA BUKU PELAJARAN SEJARAH INDONESIA KELAS XII**

SKRIPSI

Oleh:

Muhamad Fajar Riyandanu

NIM. 16130061



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS

JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**ANALISIS WACANA KRITIS TEKS GERAKAN 30 SEPTEMBER
PADA BUKU PELAJARAN SEJARAH INDONESIA KELAS XII**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Oleh:

Muhamad Fajar Riyandanu

NIM 16130061



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS WACANA KRITIS TEKS GERAKAN 30 SEPTEMBER PADA
BUKU PELAJARAN SEJARAH INDONESIA KELAS XII**

SKRIPSI

Oleh:

Muhamad Fajar Rivandanu

NIM. 16130061

Telah disetujui dan disahkan,
Pada Tanggal 10 November 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing,



Nailul Fauziah, M.A

NIP. 19841209201802012131

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**



Dr. Alfiana Yuli Efianti, M.A

NIP. 197107012006042001

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS WACANA KRITIS TEKS GERAKAN 30 SEPTEMBER PADA
BUKU PELAJARAN SEJARAH INDONESIA KELAS XII

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Muhamad Fajar Riyandanu (16130061)

Telah dipertahakan di depan penguji pada 30 November 2020 dan dinyatakan

LULUS

Serta diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu
Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Panitia Sidang

Tanda Tangan

Ketua Sidang
Dr. H. Abdul Bashith, M.Si
NIP. 197610022003121003

: 

Sekretaris Sidang
Nailul Fauziyah, M.A
NIP. 19841209201802012131

: 

Pembimbing
Nailul Fauziyah, M.A
NIP. 19841209201802012131

: 

Penguji Utama
Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA
NIP. 196205071995031001

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

 
Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 196508171998031003

Dengan kalimat rasa syukur Alhamdulillah, Penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang terdekat, yang atas pengertian dan bantuan mereka memungkinkan skripsi ini selesai.

Dari Riyan untuk Bapak, Ibu, dan Adik.



MOTTO

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.

(QS. Al-Alaq: 1)

*A People without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree
without roots.*

~Marcus Garvey~

Tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan, tak ada obat yang
tak berguna selain kurangnya pengetahuan.

~Ibnu Sina~

Nailul Fauziah, M.A
Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Nota Dinas Pembimbing

Malang, 10 November 2020

Hal : Skripsi Muhamad Fajar Riyandanu

Lamp : -

Yang terhormat,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maliki Malang

Di

Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi siswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Fajar Riyandanu

NIM : 16130061

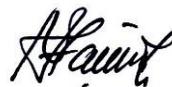
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Judul Skripsi : Analisis Wacana Kritis Teks Gerakan 30 September Pada
Buku Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XII

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Nailul Fauziah, M.A

NIP. 19841209201802012131

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Malang, 10 November 2020



Muhamad Fajar Riyandanu

NIM. 16130061

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunianya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran untuk seluruh umat manusia, yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Skripsi ini merupakan salah satu tugas yang wajib ditempuh oleh mahasiswa, sebagai salah satu tugas akhir studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis berterima kasih kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. dan seluruh wakil rektor.
2. Dr. Alfiana Yuli Efianti, M.A sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Nailul Fauziah, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis sejak di bangku kuliah.

5. Kedua orang tua dan adik tercinta. Bapak Joko Purnomo yang telah mendidik penulis sehingga menjadi orang yang tegas akan prinsip. Ibu Sarini yang selalu sabar dan memberikan nasihat sehingga penulis menjadi pribadi yang mandiri. Adik saya satu-satunya, Nurul, yang telah memberikan waktu untuk saling berbagi cerita dan informasi.
6. Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) Inovasi. Terima kasih atas ruang yang diberikan kepada penulis. Berkat organisasi ini, penulis memperoleh ilmu dan *insight* dari banyak orang-orang hebat.
7. Seluruh keluarga seperjuangan dan alumni UAPM Inovasi. Mereka bersedia meluangkan waktu bersama untuk membaca, menulis, dan berdiskusi.
8. Indah Wahyu Puji Utami, Kartika Pratiwi, dan Daniel Luke. Penelitian mereka menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.
9. Dr. Abdurakhman, dan Mas Satriono Priyo Utomo yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam skripsi ini.
10. Gustantio Tegar Darmawan, dan Nur Cholilah yang bersedia menjadi rekan diskusi dalam proses pengerjaan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
12. Dan seluruh orang yang tidak bisa disebutkan satu-persatu sehingga penulis dengan lancar mengerjakan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf kepada pembaca karena skripsi ini tidak

luput dari kekurangan dan kesalahan. Penulis secara terbuka menerima kritik dan saran demi perbaikan. Semoga karya ini berguna, dan bermanfaat. Aamiin.

Malang, 10 November 2020

Muhamad Fajar Riyandanu



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penelitian transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia (RI) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (RI) no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	= a	ز	= z	ق	= q
ب	= b	س	= s	ك	= k
ت	= t	ش	= sy	ل	= l
ث	= ts	ص	= sh	م	= m
ج	= j	ض	= dl	ن	= n
ح	= h	ط	= th	و	= w
خ	= kh	ظ	= zh	ه	= h
د	= d	ع	= ‘	ء	= ‘
ذ	= dz	غ	= gh	ي	= y
ر	= r	ف	= f		

B. Vokal panjang

Vokal(a) panjang = â

Vokal(i) panjang = î

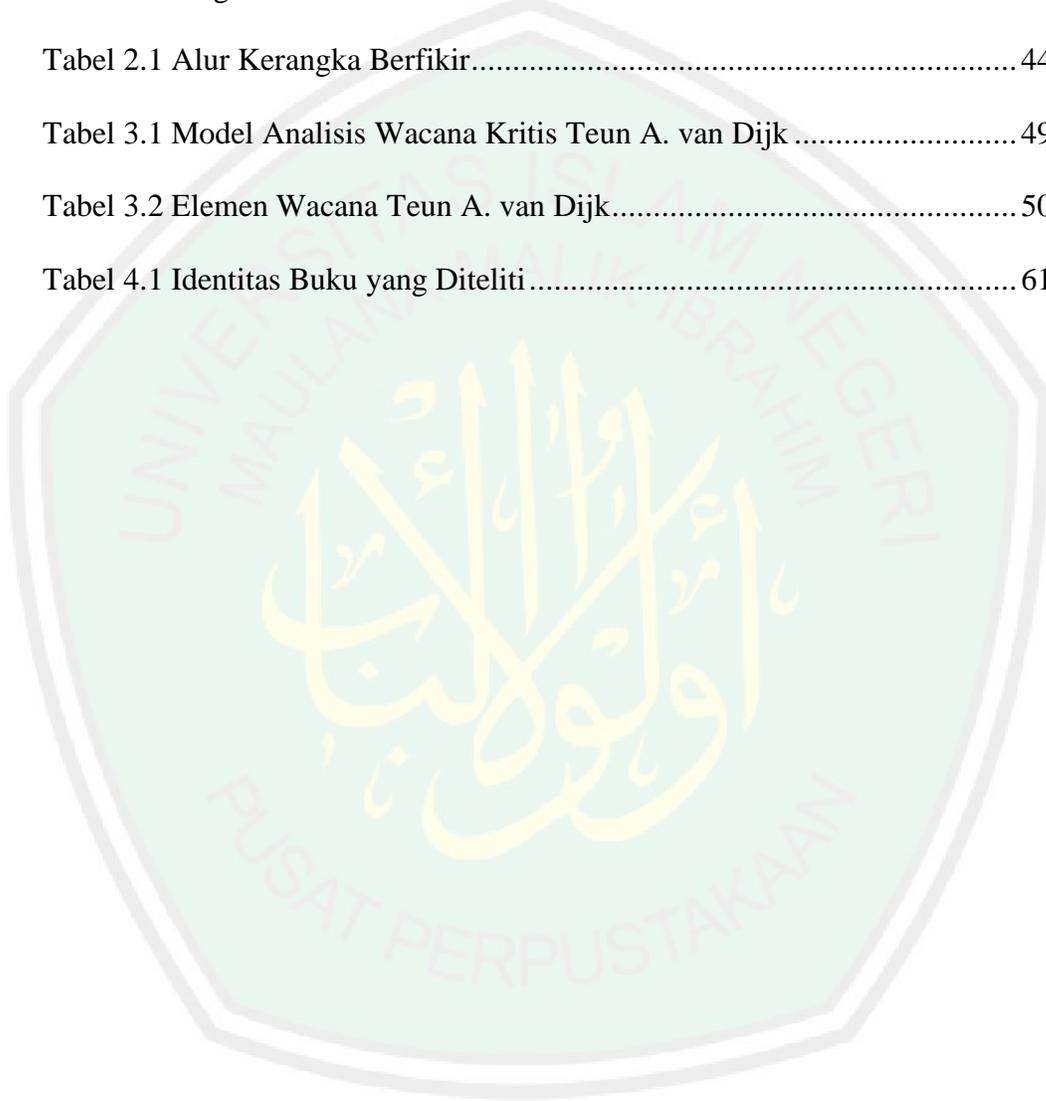
Vokal (u) panjang = û

C. Vokal Diftong

او	= aw
أي	= ay
او	= u
أي	= i

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian	13
Tabel 2.1 Alur Kerangka Berfikir.....	44
Tabel 3.1 Model Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk	49
Tabel 3.2 Elemen Wacana Teun A. van Dijk.....	50
Tabel 4.1 Identitas Buku yang Diteliti.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Buku yang Diteliti	62
Gambar 4.2 Teori Peristiwa G30S yang Ditawarkan dalam Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i> (2018)	64
Gambar 5.1 Potongan dari Silabus SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Kurikulum 2013	88
Gambar 5.2 Sebagian Pemaparan Teori ke-7 G30S	92
Gambar 5.3 Survei SMRC dengan tajuk <i>Sikap Publik Atas Isu Kebangkitan PKI</i> (23-26 September 2020)	108
Gambar 5.4 Analisis Demografi Tentang Isu Kebangkitan PKI Menurut Usia Survei Nasional SMRC dengan tajuk <i>Sikap Publik Atas Isu Kebangkitan PKI</i> (23-26 September 2020)	109

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Struktur KI dan KD Mata Pelajaran Sejarah Indonesia pada Buku
Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XII (2018).

Lampiran 2: Transkrip Wawancara Bapak Dr. Abdurakhman.

Lampiran 3: Transkrip Wawancara Mas Satriono Priyo Utomo.

Lampiran 4: Surat Izin Wawancara.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	vii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK INDONESIA	xix
ABSTRAK INGGRIS	xx
ABSTRAK ARAB.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9

C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Originalitas Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Landasan Teori.....	20
1. Analisis Wacana Kritis.....	20
2. Buku Teks Sejarah	25
3. Gerakan 30 September (G30S) 1965	27
B. Kerangka Berfikir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
B. Data dan Sumber Data.....	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	47
D. Analisis Data	49
E. Pengecekan Keabsahan Data	58
F. Prosedur Penelitian.....	60
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	61
A. Paparan Data	61
1. Identitas Buku yang Diteliti	62
2. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	64

B. Hasil Penelitian	64
1. Analisi Teks Materi Gerakan 30 September pada Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i> (2018).....	65
BAB V PEMBAHASAN	87
A. Kognisi Sosial Penulis dalam Memproduksi Wacana Sejarah Peris- tiwa Gerakan 30 September pada Buku Teks <i>Sejarah Indonesia Ke- las XII</i> (2018)	90
B. Analisis Sosial yang Melatarbelakangi Penulisan Sejarah Peristiwa Gerakan 30 September pada Buku Teks <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i> (2018).....	102
C. Membahas Peristiwa G30S di Sekolah.....	113
BAB VI PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Implikasi Penelitian.....	126
C. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA.....	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	135

ABSTRAK

Riyandanu, Muhamad Fajar. 2020. *Analisis Wacana Kritis Teks Gerakan 30 September Pada Buku Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XII*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Nailul Fauziah, M.A

Peristiwa Gerakan 30 September hingga kini masih menyimpan kontroversi. Hal tersebut berhubungan dengan “Siapa aktor utama Gerakan 30 September sebenarnya?” Dalam konteks Pendidikan di Indonesia, Peristiwa Gerakan 30 September dibahas pada jenjang Pendidikan menengah. Menurut silabus Sejarah Indonesia (Wajib) yang dirilis oleh Kemendikbud di tahun 2013, materi Gerakan 30 September dikhususkan kepada siswa/i kelas XII.

Dalam melancarkan kegiatan belajar-mengajar, dibutuhkan instrument yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga pendidik. Salah satu instrument tersebut ialah buku teks pelajaran. Selain menjadi instrumen pembelajaran, buku tersebut juga menjadi acuan wajib dan rujukan utama dalam proses pembelajaran di kelas.

Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ini ingin mengkaji buku teks pelajaran sejarah. Utamanya dalam materi Peristiwa Gerakan 30 September. Dengan menggunakan metode analisis wacana kritis Teun A. van Dijk. Peneliti merasa layak apabila analisis wacana kritis diterapkan dalam aspek pendidikan, karena pendidikan selalu bersinggungan dengan wacana dan teks.

Data yang akan diolah dalam penelitian ini berupa satu buku teks pelajaran sejarah bertajuk Sejarah Indonesia Kelas XII SMA/MA/SMK/MAK. Buku ini diterbitkan oleh Kemendikbud pada tahun 2018. Data lain yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Koordinator Tim Penulis buku tersebut, yakni Abdurakhman. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Satriono Priyo Utomo, seorang peneliti sejarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tim penulis berupaya untuk memberi banyak persepsi kepada pembaca (siswa/i) dalam melihat Peristiwa Gerakan 30 September. Namun, penonjolan PKI sebagai tokoh utama dalam Gerakan 30 September terlihat sangat jelas. Hal ini dapat terjadi lantaran tim penulis memiliki afiliasi terhadap gagasan dalam memandang Gerakan 30 September. Kompetensi Dasar yang termuat dalam Silabus Kurikulum 2013, dan masih berlakunya Tap MPRS No. 25 tahun 1966 memiliki pengaruh kuat dalam struktur penulisan G30S/PKI.

Kata kunci: Buku Teks Pelajaran Sejarah, Gerakan 30 September, Analisis Wacana Kritis.

ABSTRACT

Riyandanu, Muhamad Fajar. 2020. *Critical Discourse Analysis of the September 30th Movement Text in Indonesian History Textbook for 12th Grade*. Thesis. Department of Social Science Education. Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Nailul Fauziyah, M.A

The September 30th Movement, even as today, is still controversial. Its controversy relates to "Who are the real actors of the September 30th Movement?" In the context of Education in Indonesia, the September 30 Movement Incident is discussed at the secondary education level. According to the Indonesian History syllabus (Mandatory) released by the Ministry of Education and Culture in 2013, the 30 September Movement material learning is specifically for 12th grade students.

To carrying out teaching and learning activities, instruments that can be used by educators are needed. One of such instruments is a textbook. Apart from being a learning instrument, the book is also a mandatory and main reference in the learning process in the classroom.

This research, which was conducted using a qualitative approach, aim to examine history textbooks. Primarily in the material for the September 30th Movement Incident. By using Teun A. van Dijk's Critical Discourse analysis method. Researcher believes that critical discourse analysis should be applied in the aspect of education, because education always intersects with discourse and text.

The data to be processed in this research is in the form of a history textbook entitled Indonesian History Class XII SMA / MA / SMK / MAK. This book was published by the Ministry of Education and Culture in 2018. Other data that will be used in this research are the results of interviews with the coordinator of the book's writing team, Abdurakhman. In addition, the researcher also conducted an interview with Satriono Priyo Utomo, a history researcher.

The results of this study indicate that the author's team attempted to provide readers (students) with many perceptions in seeing the September 30th movement. However, the PKI's prominence as the main figure in the September 30th Movement was clearly seen. This can happen because the writing team is affiliated with the ideas of how to view the September 30th movement. Basic Competencies contained in the 2013 Curriculum Syllabus, and the MPRS Decree No. 25 of 1966 had a strong influence on the writing structure of the G30S / PKI.

Keywords: History Textbook, September 30th Movement, Critical Discourse analysis.

مُلخَص

رياندانو ، محمد فجر . 2020. تحليل الخطاب النقدي لنص حركة 30 سبتمبر في الكتب التاريخ الإندونيسي الصف الثاني عشر. مقال. قسم تعليم العلوم الاجتماعية. كلية التربية والتعليم. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. مستشار الأطروحة: نيلول فوزية ، ماجستير .

كان الحركة من ثلاثين سبتمبر فيه خلاف يوم الحاضر. وما يتعلق فيه هي "من فاعل لرئيسي لتلك الحركة؟" . في سياق التدريس الإندونيسي، بحث الحركة في مستوى التعليم الثانوي. بالنسبة الي منهج الدراسي التاريخية الإندونيسي (الواجب) ما ألف وزارة التربية والتعليم والثقافة في السنة 2013، مادة التعليم لتلك الحركة يخصص علي التلاميذ من فصل 12. عند تنفيذ أنشطة التدريس والتعلم ، هناك حاجة إلى أدوات يمكن أن يستخدمها المدرس. أحد هذه الأدوات هو كتاب التدريس. و من جهة الثانية لأداة التعليم . كتاب التدريس . صار المراجعة الواجبة لعملية التعلم في الفصل.

تم إجراء البحث باستخدام نهج نوعي ، و الإرادة من هذا البحث هي فحص كتب التاريخ المدرسية. خصوصاً لمدة الحركة من ثلاثين سبتمبر. باستخدام طريقة تحليل الخطاب النقدي ل Teun A. van Dijk. يرى الباحث أنه من المناسب تطبيق تحليل الخطاب النقدي في جانب التعليم ، لأن التعليم يتقاطع دائماً مع الخطاب والنص.

البيانات التي سيتم معالجتها في هذا البحث هي شكل الكتاب التاريخ المدرسي بعنوان التاريخ الإندونيسي Kelas XII SMA / MA / SMK / MAK. تم نشر هذا الكتاب بواسطة وزارة التربية والتعليم والثقافة في عام 2018. البيانات الأخرى التي سيتم استخدامها في هذا البحث هي نتائج المقابلات مع منسق فراق، الكتاب عبد الرحمن. بالإضافة إلى ذلك ، أجرى الباحث أيضًا مقابلة مع الباحث التاريخي ساتريونو بريو أوتومو.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن فريق المؤلفين حاول تزويد القراء (تلميذ/ة) بتصورات متعددة عند مشاهدة حادثة ثلاثين سبتمبر. ولكنّ التأكيد الا أنّ الحزب الشيوعي الإندونيسي كشخصية رئيسية في حركة ثلاثين سبتمبر كان واضحًا. هذا الحال يسبب يتسبب فراق الكتاب إلى فكرة النظر إلى حركة 30 سبتمبر. الكفاءات الأساسية الواردة في مناهج 2013 ، و Tap MPRS رقم 25 سنة 1966 له تأثير قوية على بنية كتابة الحركة من ثلاثين سبتمبر/ الحزب الشيوعي الإندونيسي.

الكلمات المفتاحية: كتاب التاريخ ، حركة 30 سبتمبر ، تحليل الخطاب النقدي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai acuan wajib rujukan materi pembelajaran, buku teks patutnya memuat dan mencakup materi yang menunjang perkembangan kognitif, emosi, dan spiritual peserta didik. Seperti tertulis dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas), buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.¹

Penulis atau penyusun buku teks yang umumnya terdiri oleh guru dan pakar pendidikan harus memprioritaskan aspek buku yang bersifat mendidik. Selain itu, penulis maupun penyusun buku teks seyogianya juga memperhatikan aspek isi yang mengacu atas disiplin ilmu yang akan ditulis. Kedua aspek dalam buku teks tersebut wajib dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, seperti tertulis dalam Permendiknas, buku teks pelajaran

¹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2005 Tentang Buku Teks Pelajaran, Pasal 1.

memiliki fungsi esensial dan vital dalam usaha memajukan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.

Hampir seluruh disiplin ilmu dalam ilmu eksak dan sosial untuk pendidikan dasar dan menengah sudah di rangkum dan disusun dalam bentuk buku teks, termasuk disiplin ilmu sejarah. Dalam pendidikan sejarah, hakekatnya ialah memberi pemahaman secara luas mengenai kejadian masa lalu dan mengaitkannya pada masa sekarang. Akan tetapi, penulisan sejarah dalam buku teks sekolah terbatas pada narasi dan deksripsi belaka. Hal ini menutup kemungkinan membuat perbandingan. Penulisan peristiwa dalam buku teks sejarah yang menceritakan bagaimana proses terjadinya (apa, siapa, kapan, dan di mana) barang tentu memuaskan orang/golongan yang ingin tahu perihal peristiwa tersebut. Namun pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana” lah yang wajib dijawab guna menelusuri kausalitasnya, dengan demikian ada keinginan untuk menganalisis. Sejarah harus dilihat sebagai sebuah proses yang holistik.

Menurut Rudi Hermanto, Pelajaran sejarah memiliki potensi menciptakan budaya berfikir kritis siswa/i.² Budaya berfikir kritis yang dimaksud peneliti yaitu sikap memahami segala hal dengan dasar data, memahami dari sisi baik dan sisi buruk, dan tidak memahami segala hal dengan

² Rudi Hermanto, *Peningkatan Berpikir Kritis pada Mata Pelajaran Sejarah Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme*. Jurnal PENDIDIKAN SEJARAH, PPS UNJ. Vol. 5 No. 1 Januari 2016, hlm. 2.

pandangan subjektif belaka. Tanpa kebiasaan mengkritisi, mental masyarakat dalam menghormati perbedaan pendapat tidak akan tumbuh. Pengetahuan terbentuk dari etika dan perilaku yang diterima seseorang dalam masyarakat.

Perkembangan pengetahuan berkaitan dengan rangkaian tindakan produksi pengetahuan. Michel Foucault mengistilahkannya sebagai *episteme*. Foucault pun menjelaskan, setiap periode sejarah mempunyai episteme yang berbeda, sehingga apa yang ditabukan di masa lalu, bisa jadi menjadi sesuatu yang diwajarkan di masa sekarang. Bagi Foucault, bahasa digunakan untuk melegitimasi kebenaran. Ia adalah alat untuk mengatur pengetahuan manusia sesuai episteme yang berjalan.³

Sebagai contoh adalah bagaimana struktur diskursif yang digambarkan di buku teks sejarah tentang peristiwa Gerakan 30 September (G30S). Dalam peristiwa itu Partai Komunis Indonesia (PKI) selalu ditampilkan selaku partai terlarang dan kambing hitam dalam G30S. Pada rezim Orde Lama, PKI adalah partai resmi. Lebih-lebih pada pemilihan umum tahun 1955, PKI berada pada urutan ke-4 dalam perolehan suara terbanyak. Seiring berjalannya waktu, fakta itu samar terlihat di rezim Orde Baru. Hingga masa kini, aksioma PKI sebagai partai terlarang dengan berbagai keburukannya menjadi *commen sense* dalam masyarakat Indonesia.

³ Nanang Martono, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault; Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 36-38.

Secara umum, struktur diskursif yang ditemui di buku-buku teks sejarah dibangun dengan wacana bahwa PKI adalah partai yang mendalangi peristiwa G30S, membunuh para Jendral Angkatan Darat (AD), berupaya melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno, dua kali memberontak kepada pemerintah yang sah, dan ateis. Wacana seperti ini memberi batas terhadap pandangan masyarakat, sehingga kala wacana sejarah G30S diomongkan yang nampak ialah konklusi PKI sebagai dalang peristiwa, sebagai pembunuh para jenderal, berupaya melakukan kudeta, serta partai yang tidak ber-Tuhan.⁴ Cara berpikir demikian tumbuh subur dalam masyarakat Indonesia yang berbekal kecurigaan dan tidak mengenal *trust* baik dalam memahami sejarah. Dalam kondisi masyarakat yang demikian, budaya berfikir kritis penting dikembangkan di dunia pendidikan terutama dalam mata pelajaran sejarah.

Sejak awal reformasi tahun 1998, penayangan film penghianatan G30S/PKI di seluruh kanal televisi dihentikan oleh Departemen Penerangan. Akan tetapi hal itu tidak menuntaskan persoalan pokok dari segi kepenulisan dan kegiatan proses ajar sejarah di Indonesia.⁵ Kebijakan penulisan dan pengajaran sejarah di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dalam kurikulum sejarah 2004. Bila pada masa Orde Baru selalu ditulis G30/PKI, maka mulai saat itu hanya G30S saja tanpa embel-embel apa pun. Selanjutnya

⁴ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2015), hlm. 74-75.

⁵ Henry Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambari (ed), *Panggung Sejarah* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 573.

juga akan diajarkan berbagai versi tentang G30S.⁶ Kebijakan ini merupakan kemajuan penting bagi pendidikan sejarah.

Namun perubahan ini tidak bertahan lama, dalam pendidikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006, sejarah G30S ditulis kembali menjadi G30S/PKI.⁷ Perubahan ini adalah hasil intervensi kelompok masyarakat tertentu dan negara. Pada tahun 2005 beberapa tokoh Islam seperti Jusuf Hasyim, Taufiq Ismail, dan Fadli Zon mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka mempertanyakan kenapa dalam kurikulum 2004 tidak dicantumkan tentang pemberontakan PKI Madiun 1948, dan 1965. Setelah melakukan *hearing* dengan DPR dan Menteri Pendidikan Nasional, dibentuklah tim khusus untuk menangani masalah ini. Hasil rekomendasi dari tim tersebut adalah peristiwa PKI Madiun 1948 perlu dimasukkan kembali dalam pendidikan sejarah, selain itu perlunya merubah frasa G30S menjadi G30S/PKI.⁸

Kembali digunakannya istilah G30S/PKI di kurikulum 2006 merupakan suatu kemunduran dalam sistem pendidikan sejarah di Indonesia. Sebelumnya dalam kurikulum 2004, G30S ditulis tanpa unsur PKI. Uraian ini menunjukkan

⁶ Bambang Purwanto & Asvi Warman Adam, *Menggugat Histografi Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 46.

⁷ Asvi Warman Adam, *Membongkar Manipulasi Sejarah, Kontroversi Pelaku dari Peristiwa*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 141.

⁸ Asvi Warman Adam, sebagaimana dikutip oleh Indah Wahyu Puji Utami, *Wacana Ideologi Negara Dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah Sekolah Menengah Atas (SMA)*, Tesis, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012, hlm. 4.

betapa sulitnya meluruskan pendidikan sejarah di Indonesia. Jika ingin dianggap komprehensif, maka semua versi tentang G30S wajib diulas. Sejarah merupakan ilmu yang tak pernah usang, ia memperbaharui dirinya dengan penemuan data baru. Hal ini akan berdampak pada munculnya sudut pandang yang baru dalam melihat sebuah peristiwa. Dengan sistem pengajaran yang dialogis serta buku ajar yang mengandung berbagai versi suatu peristiwa, maka pelajaran sejarah dapat menyumbang kepada penciptaan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis di masa datang.

Sejarah dapat dianggap sebagai suatu sistem wacana, *discourse*, yang ingin mengatakan “sesuatu tentang sesuatu”.⁹ Pengungkapan makna sejarah ini penting, karena praktik wacana dalam sejarah sebenarnya merupakan praktik sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan dan ideologi. Untuk menguasai seseorang atau kelompok tertentu, negara/penguasa harus bisa mempengaruhi pemikiran mereka, hal ini dapat dilakukan melalui praktik wacana.¹⁰ Foucault juga menyatakan proses kekuasaan meliputi redistribusi pengaruh serta kemampuan mengubah cara pikir banyak pihak.¹¹ Kekuasaan yang menyebar di segala penjuru menciptakan bermacam wacana yang sanggup memengaruhi praktik sosial.

⁹ Taufik Abdullah, sebagaimana dikutip oleh Indah Wahyu Puji Utami, *Wacana Ideologi Negara Dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah Sekolah Menengah Atas (SMA)*, Tesis, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012, hlm. 5.

¹⁰ Teun A. van Dijk, sebagaimana dikutip oleh Indah Wahyu Puji Utami, *Wacana Ideologi Negara Dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah Sekolah Menengah Atas (SMA)*, Tesis, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012, hlm. 5.

¹¹ Nanang Martono, *Op.Cit.*, hlm. 46.

Wacana dapat diturunkan dari generasi ke generasi, dengan demikian ada proses pewarisan kekuasaan melalui pendidikan. Akibatnya, wacana yang lebih dominan itu akan lebih diterima sebagai kebenaran. Dalam jangka waktu yang panjang, hal tersebut akan menentukan skema pemahaman/kognisi masyarakat. Pengungkapan makna dibalik wacana yang tersusun di buku teks pelajaran sejarah dapat ditelusuri dengan analisis wacana kritis. Dengan demikian, wacana bukan semata-mata dimengerti laksana pengkajian bahasa semata. Analisis wacana membutuhkan bahasa dalam teks guna keperluan analisis, namun teknik dalam analisis bahasa di sini agak berbeda. Selain menggambarkan segi perihal bahasa, bahasa pun dianalisis dengan menghubungkan konteks. Singkatnya, bahasa digunakan sebagai aksi dan kehendak tertentu, termasuk kekuasaan.

Mengikuti Fairclough dan Wodak, analisis wacana kritis menunjukkan wacana – penggunaan bahasa dalam tulisan dan ujaran – merupakan bagian dari kehendak atau praktik sosial. Analisis wacana kritis dipakai untuk menunjukkan ketimpangan kekuasaan yang berlaku di masyarakat melalui praktik bahasa.¹² Analisis Foucauldian mengatakan bahwa wacana-wacana yang ada di dalam masyarakat tergantung pada produksi pengetahuan yang ada di dalam sebuah masyarakat.¹³ Jelasnya, institusi sosial, termasuk buku teks

¹² Eriyanto, *Op.Cit.*, hlm. 27.

¹³ Teun Van Dijk, *Discourse and knowledge: A Sociocognitive Approach* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), hlm. 3.

pelajaran sejarah memegang peranan utama dalam mengatur wacana-wacana tertentu. Hal ini bertujuan untuk selalu membuat wacana yang hegemonik berada di atas wacana-wacana yang termarginalkan.

Maka peneliti merasa layak apabila analisis wacana kritis diterapkan dalam aspek pendidikan, karena pendidikan selalu bersinggungan dengan wacana dan teks. Bambang Purwanto pun mengatakan, sejarah sebagai ilmu pengetahuan amat berhubungan dengan wacana dan corak yang mewakili keadaan teks pada latar belakang sosial dan pranata sosial di dalam masyarakat.¹⁴ Fokus utama dari analisis wacana kritis yakni menuliskan teks dan konteks dalam satu sistem korespondensi/komunikasi. Melalui analisis wacana kritis dengan kerangka analisis Teun A. van Dijk, skripsi ini ingin melihat bagaimana wacana sejarah G30S ditulis dalam konteks Pendidikan di Indonesia. Penelitian ini berusaha menggali wacana mengenai G30S secara umum di masyarakat, utamanya di buku teks Sejarah Indonesia kelas XII. Peneliti merasa produksi wacana peristiwa G30S dalam buku ajar sejarah di sekolah harus diterangkan secara lebih mendalam. Mengenai bagaimana proses terjadinya produksi wacana, latar belakang, dan kondisi sosial yang membentuk wacana/narasi tersebut.

¹⁴ Bambang Purwanto & Asvi Warman Adam, *Op.Cit.*, hlm. 35.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis teks sejarah Peristiwa Gerakan 30 September dalam buku pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XII?
2. Bagaimana kognisi sosial penulis dalam memproduksi wacana sejarah Peristiwa Gerakan 30 September di buku teks Sejarah Indonesia Kelas XII?
3. Bagaimana analisis sosial yang melatarbelakangi penulisan sejarah Peristiwa Gerakan 30 September di buku teks Sejarah Indonesia Kelas XII?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kerangka teks dan isi dari teks wacana Gerakan 30 September yang muncul di dalam buku pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XII.
2. Mengetahui kognisi sosial penulis dalam memproduksi wacana sejarah Peristiwa Gerakan 30 September di buku teks Sejarah Indonesia Kelas XII.
3. Mengetahui analisis sosial yang melatarbelakangi penulisan sejarah Peristiwa Gerakan 30 September di buku teks Sejarah Indonesia Kelas XII.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Diharapkan dapat menggambarkan sebab-sebab yang membuahkan terbentuknya wacana sejarah Gerakan 30 September di dalam buku teks pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XII.
- b. Ditujukan untuk menambah kepustakaan bagi pengembangan buku teks pelajaran Sejarah Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi khalayak umum, penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar informasi dan tinjauan perihal buku teks Sejarah Indonesia.
- b. Untuk guru maupun tenaga pendidik, penelitian ini diharap menambah referensi bagi guru IPS untuk memperoleh gambaran strategi pembelajaran yang dapat diterapkan pada pokok bahasan Gerakan 30 September.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebelum membahas penelitian penulis, perlu dicantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indah Wahyu Puji Utami dengan judul *Wacana Ideologi Negara Dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah Sekolah Menengah Atas (SMA)*, menjelaskan kecenderungan tema ideologi negara yang muncul dalam Buku Sejarah Elektronik (BSE). Penelitian yang dilakukan dalam Tesis ini memiliki

cakupan yang luas berupa seluruh bab dalam BSE. Hasil dan kesimpulan yang diteliti dalam Tesis tersebut adalah tema-tema ideologi negara yang muncul dalam BSE Sejarah SMA Kelas XII IPA cenderung anti komunisme, konstitusionalisme, anti Orde Baru, menjunjung globalisasi ekonomi/liberalis kapitalis, stabilitas pembangunan/kemajuan.¹⁵

Persamaan penelitian yakni meneliti buku teks sejarah kelas XII. Dalam segi perbedaan, penelitian yang dikerjakan penulis terhadap penelitian yang dilakukan oleh Indah Wahyu Puji Utami terletak pada aspek objek pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, perbedaan dapat ditemukan dalam aspek model/metode dalam melakukan analisis. Jika tesis tersebut menganalisis seluruh isi materi yang ada dalam buku, maka penelitian pada skripsi ini lebih terfokus pada satu materi, yaitu topik wacana G30S di sub-bab buku pelajaran Sejarah Indonesia kelas XII. Selanjutnya, perbedaan lain dapat terlihat dari model/metode yang digunakan. Indah Wahyu Puji Utami dalam penelitiannya memakai analisis wacana kritis model Norman Fairclough,¹⁶ sedangkan skripsi yang penulis garap memakai analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk.

Lebih lanjut, penelitian lain yang dijadikan rujukan oleh penulis adalah tesis yang dikerjakan oleh Kartika Pratiwi dengan judul *Respon Guru Sejarah Sekolah Menengah Atas Yogyakarta Terhadap Wacana Alternatif Tragedi*

¹⁵ Indah Wahyu Puji Utami, "Wacana Ideologi Negara Dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah Sekolah Menengah Atas (SMA)", *Tesis*, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012, hlm. 158.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 46.

Kemanusiaan 1965. Tesis ini menjelaskan sebegini besar guru tetap memakai buku teks resmi dan hanya dua guru sejarah dari enam yang memakai buku preferensi. Penelitian ini juga menunjukkan sebetulnya sejarah alternatif belum diterima dalam kegiatan belajar-mengajar sejarah di sekolah.¹⁷ Terkait hal persamaan, penelitian ini juga mengkaji buku teks sejarah dengan fokus wacana G30S. Dalam hal perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan. Apabila tesis yang dikerjakan oleh Kartika Pratiwi menggunakan analisa tekstual secara interpretatif berdasarkan pengamatan pribadi peneliti dengan metode pemutaran film *40 Years of Silence*, maka dalam penelitian skripsi ini, penulis memanfaatkan analisis wacana kritis yang dirumuskan Teun A. Van Dijk yang spesifik membahas analisa teks sampai ke tahap kognisi sosial dan analisis sosial. Ringkasnya, teks dianalisis sampai pada tahap produksi wacana oleh penulis dan dikonstruksi oleh masyarakat.

Penelitian terakhir yang dijadikan rujukan oleh penulis yakni skripsi yang ditulis oleh Daniel Luke bertajuk *Wacana Rekonsiliasi Antara Korban dan Pelaku Pembantaian Pasca Gerakan 30 September 1965 (Analisis Wacana Kritis Majalah Tempo Edisi Khusus Pengakuan Algojo 1965 1-7 Oktober 2012)*. Penelitian ini memaparkan wacana rekonsiliasi yang terkandung dalam Majalah Tempo dengan judul *PENGAKUAN ALGOJO 1965* edisi 1-7 Oktober

¹⁷ Kartika Pratiwi, "Respon Guru Sejarah Sekolah Menengah Atas Yogyakarta Terhadap Wacana Alternatif Tragedi Kemanusiaan 1965", *Tesis*, Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2013, hlm. 134.

2012.¹⁸ Aspek persamaan dalam skripsi tersebut terletak pada pisau analisis yang digunakan dalam meneliti objek penelitian. Baik penulis maupun Daniel Luke memanfaatkan analisis wacana kritis yang dirumuskan oleh Teun A. Van Dijk untuk membedah isi konten yang tertulis di dalam objek penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitannya. Daniel Luke membedah beberapa tulisan di Majalah Tempo yang merupakan produk jurnalistik. Sedangkan penulis membedah isi konten materi G30S di buku teks pelajaran Sejarah Indonesia kelas XII.

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Indah Wahyu Puji Utami, <i>Wacana Ideologi Negara Dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah Sekolah Menengah Atas (SMA)</i> , (Tesis), Universitas Sebelas	sama-sama meneliti buku teks pelajaran sejarah kelas XII.	Tesis ini membahas kecenderungan tema-tema ideologi dalam BSE, proses produksi wacana ideologi dalam BSE, dan pengaruh politik yang menyebabkan praktik wacana ideologi di BSE.	Skripsi yang penulis kerjakan ingin menjelaskan wacana G30S seperti apa yang muncul dalam buku teks Sejarah

¹⁸ Daniel Luke, "Wacana Rekonsiliasi Antara Korban dan Pelaku Pembantaian Pasca Gerakan 30 September 1965 (Analisis Wacana Kritis Majalah Tempo Edisi Khusus Pengakuan Algojo 1965 1-7 Oktober 2012)", Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Media Nusantara Tangerang, 2014, hlm. 109.

	Maret Surakarta, 2012.			Indonesia kelas XII.
2.	Kartika Pratiwi, <i>Respon Guru Sejarah Sekolah Menengah Atas Yogyakarta Terhadap Wacana Alternatif Tragedi Kemanusiaan 1965,</i> (Tesis), Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2013.	sama-sama meneliti buku teks sejarah pelajaran terkait wacana G30S	Penelitian ini membahas respon guru sejarah terhadap perkembangan materi tragedi kemanusiaan 1965, dan respon guru dalam menyikapi sejarah alternatif Tragedi Kemanusiaan 65 dalam bentuk film.	Selanjutnya menjelaskan mengapa wacana tersebut yang ditulis dan mendapat porsi lebih dalam buku teks pelajaran tersebut. Selain
3.	Daniel Luke, <i>Wacana Rekonsiliasi Antara Korban dan Pelaku Pembantaian Pasca Gerakan 30 September 1965</i> (Analisis Wacana	Sama-sama menggunakan analisis wacana kritis yang dirumuskan Teun A. Van Dijk untuk	Skripsi ini membedah beberapa tulisan di Majalah Tempo yang merupakan produk jurnalistik.	itu, penelitian ini juga ingin mengkaji bagaimana sebaiknya wacana G30S dibahas di sekolah.

	<p><i>Kritis Majalah</i> <i>Tempo Edisi</i> <i>Khusus Pengakuan</i> <i>Algojo 1965 1-7</i> <i>Oktober 2012</i>), (Skripsi), Universitas Multimedia Nusantara, 2014.</p>	<p>membedah isi konten yang tertulis di dalam objek penelitian.</p>	
--	---	---	--

Tabel 1.1: Orisinalitas Penelitian

Seperti yang sudah dijelaskan di muka, orisinalitas penelitian skripsi ini terletak pada objek penelitian dan metode analisis yang digunakan. Peneliti melakukan analisis wacana Peristiwa Gerakan 30 September pada salah satu buku pejaran Sejarah Indonesia Kelas XII dengan menggunakan metode analisis wacana model Teun A. van Dijk.

F. Definisi Operasional

Guna menghindari salah persepsi terhadap interpretasi judul penelitian, maka penulis mengajukan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengertian Analisis Wacana Kritis

Analisis Wacana Kritis ialah upaya mengkaji bahasa yang umumnya terdiri dari klausa dan kalimat secara lebih luas. Melalui kajian linguistik dan proses sosial -- kulturalnya. Analisis wacana kritis pun menilik bahasa dalam konteks sosial (waktu), dalam hubungan antar komunikator. Ringkasnya, analisis wacana kritis menekankan metode analisis bertingkat (*multilevel analysis*) dalam mengkaji suatu wacana atau teks. Mempertautkan analisis pada aspek teks dan aspek di luar teks, seperti: latar belakang penulis, kondisi sejarah saat teks ditulis, dan wacana umum yang mendominasi di masyarakat. Metodologis yang disajikan berpedoman pada model-model khusus yang didukung oleh latar belakang teoritisnya. Lebih lanjut akan dijelaskan dalam kajian teori. Menurut Eriyanto, Analisis Wacana Kritis bertujuan untuk melihat bagaimana dominasi serta ketidakberimbangan dipreproduksi melalui teks.¹⁹

2. Pengertian Gerakan 30 September

Gerakan 30 September umumnya dikenal dengan G30S adalah peristiwa yang bermula pada 1 Oktober 1965 dini hari. Saat itu Letnan Jenderal Ahmad Yani yang menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat beserta lima bawahannya diculik dari kediaman mereka di Jakarta. Lima orang staf Yani ialah: Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal

¹⁹ Eriyanto, *Op.Cit.*, hlm. Xiii.

Soeprapto, Mayor Jenderal M.T Haryono, Brigadir Jenderal D.I Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Kemudian, Yani beserta para stafnya dibawa dengan truk ke areal perkebunan karet di daerah Jakarta Timur. Saat itu kondisi Yani, Haryono, dan Panjaitan sudah tewas karena para penculik membunuh mereka pada saat penangkapan berlangsung. Pada pagi hari itu, setibanya di areal perkebunan, para penculik membunuh Parman, Soeprapto, serta Sutoyo dan memasukkan enam jasad mereka ke dalam satu sumur mati.

Selain enam perwira tinggi AD, Seorang Kapten Pierre Andreas Tendean, korban salah culik dari kediaman Jenderal A.H Nasution yang dapat melarikan diri, dibunuh dan dijebloskan ke dalam sumur tersebut. Masih di pagi hari itu, usai melakukan pembunuhan, kelompok di balik insiden penculikan dan pembunuhan ini langsung menguasai stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta, dan melalui siarannya mengumumkan diri sebagai pasukan yang loyal kepada Presiden Soekarno. Dalam siaran itu, mereka menyatakan tujuan aksi ialah untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari kawanan jenderal yang hendak melakukan kudeta. Siaran udara saat itu juga menyebut nama Letnan Kolonel Untung sebagai pemimpin mereka. Untung memiliki tugas wajib sehari-hari sebagai pengawal Presiden. Saat itu, ia menjabat sebagai Komandan Batalyon I

Kawal kehormatan Cakrabirawa.²⁰ Perlu ditekankan, G30S bukan gerakan pembantaian massal yang muncul setelah peristiwa penculikan pejabat Angkatan Darat.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya tidak menyeleweng dari topik, perlu dicantumkan sistematika pembahasan yang terdiri atas:

BAB I Pendahuluan. Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka. Membahas landasan teori, menjelaskan secara deskriptif tentang Analisis Wacana Kritis, Buku Teks Sejarah, dan Gerakan 30 September. Pada Bab ini juga membahas Kerangka Berfikir yang digunakan oleh peneliti.

BAB III Metode Penelitian. Mencakup: pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan prosedur penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Hasil Penelitian. Menjelaskan uraian terkait paparan data dan hasil penelitian.

²⁰ John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal; Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, terj., Hersri Setiawan. (Jakarta: Hasta Mitra, 2008), hlm. 3.

BAB V Pembahasan. Meliputi aspek: menjawab masalah penelitian dan menafsirkan hasil penelitian yang ditampilkan dalam bab IV. Kemudian hasil tersebut dianalisis hingga menemukan sebuah jawaban dari fokus penelitian.

BAB VI Penutup. Mencakup kesimpulan, implikasi penelitian dan saran dari penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Analisis Wacana Kritis

Norman Fairclough dan Ruth Wodak menjelaskan analisis wacana kritis ialah proses mengkaji wacana – penggunaan bahasa dalam tulisan dan ujaran – sebagai praktik sosial yang menciptakan hubungan dialektis antara kejadian dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang mengkonstruksinya. Lewat wacana, contoh; kondisi seksis, rasis, serta ketimpangan sosial dilihat sebagai satu kewajaran/alamiah (*common sense*).²¹ Analisis wacana kritis tidak berangkat dari teori akademis murni, melainkan dari persoalan sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam menyikapi analisis wacana kritis, Ruth Wodak dan Michael Meyer menegaskan, daripada berfokus pada akademik murni atau masalah teoritis, analisis wacana kritis baiknya berawal dari mengungkapkan masalah sosial, dan memilih perspektif dari yang paling ditimpangi.²²

²¹ Norman Fairclough dan Ruth Wodak, *Critical Discourse Analysis*, sebagaimana dikutip oleh Teun A. van Dijk, *Discourse as Social Interaction: Discourse Studies A Multidisciplinary Introduction* (London: SAGE Publication, 1997), hlm. 258.

²² Ruth Wodak dan Michael Meyer, *Methods of Critical Discours Analysis* (London: SAGE Publicatoins, 2001), hlm. 1.

Prof. Dr. Mulyadi Eko Purnomo, M.pd menyatakan pentingnya analisis wacana kritis untuk mengetahui ideologi suatu media. Menurutnya, tujuan analisis wacana kritis yakni memperlihatkan ideologi yang terselip di (sisi) belakang suatu teks, wacana, atau penggunaan bahasa secara publik. Guru besar Universitas Sriwijaya ini menambahkan, dalam pengaplikasiannya, analisis wacana kritis bisa diaplikasikan untuk analisis wacana media massa, analisis wacana politik, serta analisis wacana pembelajaran.²³

Analisis dalam paradigma kritis memfokuskan pada proses produksi dan reproduksi wacana dalam subyek atau perseorangan. Subyek diasumsikan tidak netral, dalam artian tidak dapat secara bebas mengikuti pikirannya. Hal itu terjadi karena subjek sangat terikat dan dihasilkan oleh kekuatan sosial yang terdapat di masyarakat. Pandangan ini melihat bahasa maupun wacana selalu turut serta dalam hubungan kekuasaan, lebih-lebih dalam pembentukan subjek dalam masyarakat. Ringkasnya, wacana adalah alat di mana golongan dominan memarjinalkan posisi golongan yang tidak dominan. Berikut ini beberapa karakteristik dari analisis wacana kritis yang telah disarikan oleh Eriyanto dari tulisan A. Van Dijk, Fairclough, dan Wodak.²⁴

²³Mulyadi Eko Purnomo, *AWK untuk Menemukan Ideologi yang Tersembunyi* (https://pdu.fk.unsri.ac.id/?act=info_detil&id=263, diakses 03 Maret 2020).

²⁴ Eriyanto, *Op.Cit.*, hlm. 8-14.

a. Tindakan.

Wacana dimengerti sebagai perbuatan seorang, seperti: menulis, bercakap, dan memakai bahasa dengan tujuan melakukan interaksi dan bersosialisasi sesama khalayak lain. Dengan pemahaman tersebut, wacana dilihat sebagai hal yang memiliki maksud mendebat, bereaksi, membujuk, mempengaruhi, menyangga, dan sejenisnya. Lain daripada itu, wacana pun diartikan sebagai sesuatu yang diungkapkan secara sadar, bukan sesuatu di luar kontrol atau yang diungkapkan di luar kesadaran.

b. Konteks

Latar, situasi, peristiwa, dan kondisi itu diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu di dalam proses komunikasi. Konteks mengkaji segala kondisi dan aspek yang terdapat di luar teks yang mempengaruhi pemakaian bahasa. Hal itu mencakup: fungsi yang dimaksud, situasi di mana teks dibuat, partisipan dalam bahasa, dan lain-lain.

c. Historis

Hal penting yang dilakukan untuk dapat memahami teks yakni memposisikan suatu wacana di dalam konteks historis wacana tersebut. Pemahaman akan wacana hanya semata-mata dihasilkan

dengan syarat peneliti mampu menempatkan konteks historis teks tersebut diproduksi. Misal situasi sosial, politik, ekonomi ataupun kultural ketika suatu teks itu diproduksi.

d. Kekuasaan

Pengguna bahasa bukan dilihat sebatas sebagai penulis, pembaca, pembicara, dan pendengar. Pengguna bahasa pun tak terlepas dari anggota kategori sosial tertentu, seperti kelompok agama, komunitas, profesional, atau masyarakat tertentu. Dalam pengertian tersebut, maka setiap wacana yang timbul, baik berbentuk percakapan, teks, atau sebagainya, tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang terjadi secara netral, wajar, dan alamiah. Hal itu harus dipandang sebagai bentuk pertempuran wacana. Kekuasaan dalam hubungannya dengan wacana dapat berupa kontrol. Kontrol terhadap wacana bisa beraneka-ragam. Kontrol yang mudah dilihat adalah “siapakah yang boleh dan harus berbicara” dan “siapa yang hanya dapat mendengar dan mengiyakan”. Hal ini dapat dilihat dari bentuk kontrol atas konteks.

e. Ideologi

Wacana yang berupa percakapan, teks, dan lain-lain, adalah bentuk dari praktik ideologi. Dalam pengertian ini, wacana dilihat

sebagai media golongan dominan untuk membujuk dan mempengaruhi masyarakat yang terpinggirkan melalui produksi kekuasaan dan dominasi yang mereka miliki, sehingga terlihat benar dan absah. Wacana dibentuk dan disesuaikan dengan *blue print* yang telah ditentukan, sehingga wacana yang diproduksi membatasi pandangan kita. Objek mungkin tidak berubah, tetapi struktur diskursif yang dibikin membuat objek menjadi berubah.

Hal ini dapat dilihat terkait bagaimana struktur diskursif dalam buku teks pelajaran sejarah tentang PKI yang selalu ditampilkan selaku partai terlarang dan kambing hitam dalam G30S. Pada rezim Orde Lama, PKI adalah partai resmi. Lebih-lebih pada pemilihan umum tahun 1955, PKI berada pada urutan ke-4 dalam perolehan suara terbanyak. Seiring berjalannya waktu, fakta itu samar terlihat di rezim Orde Baru. Hingga kini, aksioma PKI sebagai partai terlarang dengan berbagai keburukannya tetap berlangsung (menjadi kebenaran umum). Dalam segi objek, tidak ada yang berubah dalam PKI. Namun struktur diskursif yang sengaja dibangun oleh Orde Baru membuat PKI jadi organisasi terlarang. PKI digambarkan sebagai partai yang suka memberontak dan partai yang anti-tuhan. Wacana tunggal seperti ini membatasi pandangan masyarakat yang artinya tidak memberi sudut pandang lain dalam

melihat peristiwa G30S. Walhasil ketika PKI dibicarakan, maka yang akan terlihat adalah wajah PKI selaku partai pemberontak.²⁵

2. Buku Teks Sejarah

Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah. Buku teks pelajaran memuat materi pembelajaran dalam rangka penguatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti, dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standart nasional pendidikan.²⁶

Sebagai acuan wajib, buku teks pelajaran juga menjadi rujukan, sumber, sekaligus instrumen yang dimanfaatkan bagi tenaga pendidik dalam kegiatan belajar-mengajar. Berikut beberapa karakteristik buku teks pelajaran:²⁷

- a. Memiliki landasan keilmuan yang jelas dan mutakhir.
- b. Berisi materi yang memadai, bervariasi, mudah dibaca, dan sesuai dengan kebutuhan siswa.
- c. Disajikan secara sistematis, logis, dan teratur.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 74-75.

²⁶ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Buku Teks Pelajaran, Pasal 1.

²⁷ Agus Mulyana, *Pendekatan Histografi dalam Memahami Buku Teks Pelajaran Sejarah* (<http://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/pendekatan-historiografi-dalam-memahami-buku-teks-pelajaran-sejarah/>, diakses pada 04 Maret 2020).

- d. Meningkatkan minat siswa untuk belajar.
- e. Berisi materi yang membantu siswa untuk mengukur kompetensi yang telah dan akan dipelajari

Menurut pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku menjelaskan, bahwa setiap buku teks untuk mata pelajaran yang akan digunakan pada jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah adalah buku-buku telah melalui dan lulus penilaian kelayakan dari Badan Standart Nasional Pendidikan (BSNP).²⁸ Seluruh buku teks pelajaran untuk tingkat pendidikan sekolah dasar dan menengah pasti memasukkan aspek sejarah dalam muatan kurikulumnya. Baik diintergrasikan dalam buku ajar IPS yang sering ditemui pada jenjang SMP, ataupun menjadi pelajaran tersendiri layaknya pada jenjang SMA.

Pelajaran sejarah pun memiliki peran dalam mengembangkan potensi berfikir kritis dalam diri siswa.²⁹ Potensi ini diharap dapat menciptakan budaya kritis dalam masyarakat. Budaya kritis yang dimaksud peneliti adalah sikap memahami segala sesuatu secara objektif dan berimbang, berdasar pada data dan bukan pendapat subjektif belaka. Sejarah Indonesia adalah disiplin ilmu yang memberi bekal murid dengan segala sesuatu yang

²⁸ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku, Pasal 4.

²⁹ Wawan Darmawan & Agus Mulyana, *Antara Sejarah dan Pendidikan Sejarah: Analisis terhadap Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA Berdasarkan Kurikulum 2013* (http://jurnal.upi.edu/file/WAWAN_D.pdf , diakses 04 Maret 2020), hlm. 282.

diketahui perihal aspek ruang dan waktu sejarah Indonesia.³⁰ Berikut adalah enam kriteria yang harus dipenuhi dalam penulisan buku teks sejarah, yaitu: ³¹

- a. Substansi faktual yang harus dipertanggungjawabkan.
- b. Penafsiran dan atau penjelasan.
- c. Penyajian dan retorika yang harus sesuai dengan teori psikologi perkembangan.
- d. Pengenalan konsep-konsep sejarah (Indonesia dan Umum) perlu menggunakan kriteria.
- e. Buku teks pelajaran sejarah secara teknis-konseptual mengikuti GBPP (kurikulum) kelengkapan ilustrasi, gambar, foto, peta-peta sejarah dalam *setting* dan *lay out* yang informatif dan naratif.

3. Gerakan 30 September (G30S) 1965

Peristiwa G30S berawal dari tewasnya tujuh perwira Angkatan Darat (Letjen Ahmad Yani, Mayjen Suprpto, Mayjen Hayono Mas Tirtodarmo, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I Pandjaitan, Brigjen Sutoyo Siswamihardjo, dan Lettu Pierre Tendean), hingga kini masih menyimpan kontroversi. Seiring berjalannya waktu muncul pertanyaan “Siapa dalang G30S?” Pada

³⁰ Abdurakhman, dkk. *Buku Guru Sejarah Indonesia Kelas XII* (Jakarta: Kemendikbud, 2018), hlm. iii.

³¹ Helius Sjamsuddin, Penulisan Buku Teks dan Sejarah Lokal, dalam Wawan Darmawan & Agus Mulyana, *Antara Sejarah dan Pendidikan Sejarah: Analisis terhadap Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA Berdasarkan Kurikulum 2013* (http://jurnal.upi.edu/file/WAWAN_D.pdf , diakses 04 Maret 2020), hlm. 280.

tahun 1994, Pemerintah Republik Indonesia mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan membentuk sebuah tim sejarawan pemerintah. Dikomandoi oleh Moerdiono sebagai Menteri Sekretaris Negara, pemerintah menerbitkan buku bertajuk *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia* (1994). Buku Putih ini adalah versi resmi terakhir dari peristiwa 1965. Sebelumnya, pada Desember 1965, rezim Orde Baru melalui sejarawan Nugroho Notosusanto telah merilis narasi utama Peristiwa G30S yang diberi judul *40 Hari Kegagalan "G30S" 1 Oktober-10 November*. Karya Nugroho ini diterbitkan oleh Pusat Sejarah ABRI.

Namun jawaban yang ditawarkan pemerintah itu banyak disangsikan oleh ahli sejarah. Sebagian penulis sejarah pun mendapati begitu banyak aspek yang ganjil dan tak terjelaskan, mereka menganggap isi yang ada di dalam buku terbitan pemerintah itu bukanlah suatu jawaban yang final. Perdebatan siapa inisiator di balik peristiwa ini pun sudah menjadi diskusi yang tak pernah usai. Pemimpin G30S saat itu bahkan belum pernah menyelenggarakan konferensi pers dan menampakkan diri di khalayak umum. Gerakan tersebut sudah kalah sebelum kebanyakan orang Indonesia mengetahui keberadaannya. Berikut adalah teori-toeri tentang peristiwa G30S yang telah disarikan dari beberapa sumber. Perlu ditekankan, bahwa teori ini hanya tentang G30S, bukan mengenai kekerasan massal yang terjadi seusai gerakan itu terjadi.

a. G30S Sebagai Usaha Kudeta PKI

Menurut penjelasan kelompok militer Indonesia, G30S adalah siasat PKI untuk melakukan kudeta kepada pemerintahan Soekarno.³² Melalui bukti-bukti yang diperoleh dari pengakuan Letnan Kolonen Untung dan Kolonel Abdul Latief, Pusat Penerangan Angkatan Darat (PPAD) menerbitkan buku dengan tujuan memperlihatkan bukti bahwa PKI menjadi “arsitek” dalam G30S. Tak tanggung-tanggung, dari bulan Oktober hingga Desember 1965, buku yang diterbitkan oleh PPAD berjumlah tiga jilid.³³ Dalam buku *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia* (1994), G30S berawal dari isu Dewan Jenderal yang berniat untuk merebut kekuasaan negara. Isu tersebut diciptakan oleh Biro khusus PKI yang bertujuan membangun citra buruk pimpinan TNI-AD di mata masyarakat.

Di lingkungan intern PKI sendiri isu Dewan Jenderal juga disebarluaskan sebagai materi situasi politik bagi anggota-anggota PKI sendiri dengan tujuan menanamkan kebencian dan sikap permusuhan terhadap pimpinan TNI-AD.³⁴ Selain isu Dewan Jenderal, dalam rapat politbiro PKI pada Agustus 1965, D.N Aidit selaku ketua PKI menjelaskan tentang sakitnya Presiden Soekarno. Sakitnya Soekarno

³² John Roosa, *Op. Cit.*, hlm. 91.

³³ *Ibid.*, hlm. 94.

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 61.

menimbulkan pertanyaan “Siapa penerus Soekarno seandainya sang presiden tidak dapat melanjutkan kepemimpinannya?”

Dalam situasi pertentangan antara PKI dan TNI-AD seperti ini, TNI-AD lah yang mempunyai kekuatan untuk melibas PKI. Oleh sebab itu, sebelum TNI-AD melibas PKI, partai pimpinan D.N Aidit itu harus mengambil langkah mendahului dengan cara menggulung TNI-AD. Maka pada tanggal 12 Agustus 1965, D.N Aidit ia memanggil Sjam, Kepala Biro Khusus Central guna menyusun langkah untuk mendahului dan memberi pukulan kepada TNI-AD dengan aksi kekuatan bersenjata.³⁵

b. G30S Sebagai Pemberontakan Perwira Muda

Teori ini dipaparkan oleh Benedict Anderson dan Ruth McVey dalam kajian yang diberi judul *A preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia* (1966) yang kemudian dikenal dengan sebutan *Cornell Paper*. Hasil kajian tersebut, mereka menyatakan bahwa G30S merupakan operasi militer yang melibatkan sangat sedikit orang sipil. Para peneliti *Cornell Paper* pun tidak menemukan bukti bahwa PKI bermain sebagai dalang G30S. Anderson dan McVey meyakini gerakan ini timbul dari dalam tubuh militer sendiri.³⁶ Tesis Anderson dan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

³⁶ John Roosa, *Op.Cit.*, hlm. 102.

McVey berangkat dari pandangan mereka terhadap para perwira Jawa Tengah yang merasa jijik dengan degenerasi *life style* dan kiblat politik para jenderal di staf umum TNI- Angkatan Darat (SUAD) di Jakarta yang pro-Barat. Para perwira muda Jawa Tengah ini melihat para staf umum di bawah Yani “angkat tangan” terhadap korupsi masyarakat elite Jakarta, serta mengabaikan bekas anak buah mereka (Jenderal Yani dan beberapa lainnya adalah mantan perwira Diponegoro – Jawa Tengah), dan terus-menerus menentang dan menghalangi kebijakan-kebijakan luar dan dalam negeri Presiden Soekarno. Sebab-sebab inilah yang memunculkan pemberontakan di tubuh Angkatan Darat.³⁷

Berawal dari sebab-sebab tersebut, kelompok perwira Jawa Tengah itu berniat melancarkan sebuah operasi untuk membersihkan Angkatan Darat dari jenderal-jenderal yang korup dan berpolitik konservatif. Tujuan dari pembersihan tersebut adalah memberi kebebasan yang lebih besar kepada Presiden Soekarno untuk menjalankan kebijakan politiknya. Demi melancarkan operasi itu, perwira-perwira Jawa Tengah tersebut membangun kekuatan dengan menggandeng pihak-pihak tertentu dari kalangan PKI dan AURI. Selain memiliki basis massa yang banyak, alasan para perwira menggandeng

³⁷ Benedict Anderson dan Ruth McVey, *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia*, 1972, sebagaimana dikutip oleh John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal; Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, terj., Hersri Setiawan. (Jakarta: Hasta Mitra, 2008), hlm. 102.

PKI adalah untuk memberi dukungan politik terhadap operasi yang mereka jalankan. Dengan begitu, dalam teori ini, PKI tidak berperan sebagai dalang atau arsitek G30S. PKI hanya korban penipuan yang diperdaya oleh perwira-perwira yang melibatkan mereka di dalam suatu gerakan yang sebetulnya tidak mereka mengerti secara keseluruhan.³⁸

c. G30S Sebagai Persekutuan antara Perwira Angkatan Darat dan PKI

Teori ini dikemukakan oleh ilmuwan politik Harold Crouch. Titik penting dari pendapat Crouch adalah, walaupun ada aksi yang dilakukan oleh para perwira yang tidak puas terhadap para pimpinan mereka di Jakarta, PKI pun memiliki peran penting dan lebih dari sekadar peran mendukung. Crouch tidak percaya bahwa para perwira militer itu merupakan dalang yang “memperdaya” partisan PKI sebagai objek penipuan.³⁹

Menurut Crouch, bukti-bukti yang muncul dalam persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) yang diselenggarakan usai Anderson dan McVey merilis laporannya, memperlihatkan bahwa anggota-anggota PKI yang terut serta dalam G30S tidak dapat digambarkan sebagai sosok-sosok terperdaya. Kesaksian-kesaksian yang diutarakan di ruang pengadilan oleh anggota PKI – terutama Sjam

³⁸ John Roosa, *Op.Cit.*, hlm. 103.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 105.

dan Pono -- memperlihatkan keterlibatan PKI yang terlalu dalam dan penting, sehingga peran PKI tidak dapat dikatakan sebagai tindakan yang kebetulan ataupun ceroboh. Walau begitu, Crouch menganggap inisiatif awal muncul dari Angkatan Darat dan PKI sebagai pemain kedua, juga memiliki peran yang sangat terlibat.⁴⁰ Singkatnya, Crouch menggambarkan G30S sebagai produk kooperasi yang solid antara beberapa perwira militer dengan Biro Khusus PKI.

d. Kepentingan Inggris dalam Gerakan 30 September

Teori yang dicetuskan oleh Greg Poulgrain ini menjelaskan Inggris yang berada di belakang Malaysia beranggapan bahwa konfrontasi akan berkepanjangan bila komunis berkuasa di Indonesia.⁴¹ Indikasi keterlibatan pemerintah/Dinas Rahasia Inggris lebih terlihat usai G30S. Peran Inggris adalah memberi bantuan dalam hal propaganda pembersihan PKI. Dalam buku *Shadow of a Revolution: Soeharto and Indonesia* (2001), Roland Challis, koresponden BBC yang berkedudukan di Singapura dan sering ke Jakarta menjelang peristiwa G30S mengungkapkan, pada tahun 1962 terjalin akad antara John F Kennedy (Presiden Amerika Serikat) dengan Harold Macmillan

⁴⁰ Harold Crouch, *Another Look at the Indonesian Coup*, sebagaimana dikutip oleh John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal; Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, terj., Hersri Setiawan. (Jakarta: Hasta Mitra, 2008), hlm. 106.

⁴¹ Asvi Warman Adam, *Op.Cit.*, hlm. 134.

(Perdana Menteri Inggris) yang berupaya untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Buah dari hasil akad itu adalah Tentara Angkatan Laut Inggris yang mempunyai pangkalan di Singapura bersedia untuk mencegah Indonesia agar tidak jatuh ke tangan komunis.⁴²

e. Dinas Intelijen Amerika Serikat (CIA) Sebagai Dalang G30S

Imbas dari Perang Dingin antara blok komunis dan blok kapitalis di medio 1960-an, menjadi alasan Amerika Serikat untuk menjauhkan Indonesia dari blok komunis. Peter Dale Scott, profesor dari University of California, menulis *US and the Overthrow of Soekarno 1965-1967* yang kemudian diterjemahkan dengan judul *CIA dan Penggulingan Soekarno* (2004). Menurut Dale, CIA membangun relasi dengan para perwira Angkatan Darat di dalam tubuh Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) melalui salah satu perwiranya, yakni Soeharto. Menurut John Roosa, pada akhir tahun 1965 Amerika Serikat memberikan perangkat komunikasi radio lapangan yang sangat canggih ke Kostrad. Antenanya dipasang di depan markas besar Kostrad.

Kathy Kadane, seorang wartawan investigasi yang memperoleh banyak informasi terkait G30S melalui wawancara pada akhir 1980-an

⁴² Asvi Warman Adam, *Op.Cit.*, hlm. 145.

dengan para mantan pejabat tinggi Amerika Serikat. Ia melaporkan bahwa Amerika Serikat (AS) telah memantau komunikasi Angkatan Darat Republik Indonesia melalui perangkat radio yang diberikan. CIA menjamin bahwa frekuensi-frekuensi yang akan digunakan Angkatan Darat sudah diketahui serta disadap oleh National Security Agency (Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat) yang saat itu menetap di sebuah tempat di daerah Asia Tenggara. Hasil sadapan siaran radio itu kemudian dianalisis oleh para penerjemah AS untuk kemudian dikirim ke Washington. Walhasil, Amerika Serikat mempunyai laporan perihal penyerangan Angkatan Darat terhadap PKI, misalnya, mendengar “komando-komando dari satuan-satuan intelijen Soeharto untuk membunuh tokoh-tokoh tertentu di tempat-tempat tertentu”.⁴³

Melalui perantara Adam Malik, pihak Amerika Serikat pun menyerahkan kucuran dana sebesar Rp50 juta. Dana tersebut digunakan untuk ongkos kegiatan Komite Aksi Pengganyangan (KAP) Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu). Tak hanya bantuan dana, CIA juga menyerahkan lis identitas para tokoh dan PKI kepada Angkatan Darat untuk keperluan Gestapu.⁴⁴ Hal ini dipertegas melalui dokumen yang sudah dideklasifikasi pada tahun 2001 yang memperlihatkan bahwa

⁴³Randy Wirayudha, *Lima Versi Pelaku Peristiwa G30S* (<https://historia.id/politik/articles/lima-versi-pelaku-peristiwa-g30s-DWV0N>, diakses pada 16 Maret 2020).

⁴⁴ Asvi Warman Adam, *Op.Cit.*, hlm. 144.

William Bundy (Pembantu Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Jauh) pada Oktober 1965 hingga Maret 1996 menjalin kontak secara intensif dengan Marshall Green, Duta Besar AS untuk Indonesia. Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa Bundy pulalah yang memuluskan proposal Green untuk menyalurkan bantuan keuangan kepada Adam Malik. Selain digunakan untuk ongkos KAP-Gestapu, dana ini juga disalurkan kepada kelompok paramiliter yang berperan besar dalam pembantaian kaum komunis.⁴⁵

f. Gerakan 30 September Adalah Skenario Soekarno

Menurut Antonie Dake dan John Hughes, G30S adalah konspirasi Soekarno dengan menyiapkan sebuah skenario untuk menyingkirkan oposisi politik yang sebagian menjabat sebagai perwira tinggi AD. Keterlibatan PKI dalam skenario tersebut karena mereka sangat bergantung kepada Soekarno.⁴⁶ Bukti yang dimiliki Dake hanyalah salinan interogasi Kapten Bambang Widjanarko (ajudan Presiden Soekarno) yang ia peroleh dari personil Komando Operasional Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Teori yang sama juga didengungkan oleh Fic yang beranggapan bahwa Mao Zedong

⁴⁵ Wijaya Herlambang, *Kekerasan Budaya Pasca 1965* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2019), hlm. 156-157.

⁴⁶ Asvi Warman Adam, *Op.Cit.*, hlm. 143.

menganjurkan Aidit agar PKI menggulung para jenderal-jenderal sayap kanan. Fic pun menjelaskan bahwa selanjutnya Aidit memperoleh dukungan dari Presiden Soekarno untuk menjalankan anjuran tersebut.⁴⁷

g. G30S Sebagai Hasil Kolaborasi Soeharto, AD, dan Agen Ganda

Pendekatan ini dipelopori oleh seorang sosiolog asal Belanda, W.F. Wertheim. Ia menjelaskan tesis bahwa Soeharto berkolaborasi dengan para Jenderal Angkatan Darat antikomunis untuk menjalankan G30S dengan memanfaatkan agen ganda (Sjam). Hal ini bertujuan untuk menciptakan dalih untuk memukul PKI sekaligus mendemisionerkan Soekarno. Wertheim pun menjelaskan bahwa Soeharto adalah teman dua orang pimpinan G30S: Letnan Kolonel untung dan Kolonel Latief.⁴⁸ Dalam pleidoi yang disampaikan dalam sidang Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) Jawa Barat tahun 1978 yang juga telah diterbitkan pada tahun 2000 dan mengalami cetak ulang, Latief, dalam kesaksiannya mengungkap, ia telah memberitahu plan operasi G30S itu kepada Soeharto di rumahnya (Jalan Agus Salim) pada tanggal 28 September 1965. Selain itu, pada malam hari sebelum G30S,

⁴⁷ John Roosa, *Op.Cit.*, hlm. 116.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 107.

Latief juga bertemu Soeharto di RSPAD Gatot Subroto dan kembali memberitahu plan aksi G30S.

Dengan kesaksian Latief, bisa dikatakan bahwa Soeharto mengetahui G30S sebelum gerakan itu terjadi.⁴⁹ Bahkan, Latief bercerita lebih lanjut, pada malam hari 30 September 1965, empat jam sebelum G30S dijalankan, Latief kembali memberitahu Soeharto bahwa aksi G30S akan dilaksanakan pada 1 Oktober 1965 dini hari. Kata Latief, Soeharto tidak mencegah atau melarang aksi tersebut. Bagian lain yang mencurigakan menurut Wertheim adalah pasukan G30S tidak mengepung markas Kostrad. Padahal posisi pasukan-pasukan pemberontak saat itu tengah berkumpul di depan istana, tidak jauh dari markas Kostrad. Soeharto, sebagai panglima pasukan yang bermarkas di Kostrad, dapat bergerak bebas. Dalam pandangan Wertheim, Soeharto bergerak dengan “efisiensi yang ajaib di tengah-tengah keadaan yang luar biasa membingungkan”.⁵⁰

Wertheim juga menaruh curiga terhadap identitas Sjam. Sosok misterius ini baru ditampilkan di depan umum oleh rezim Soeharto pada tahun 1967, dan menyatakannya sebagai tangan kanan D.N. Aidit yang diberi tugas untuk menjalin relasi dengan pihak militer. Wertheim

⁴⁹ Asvi Warman Adam, *Op.Cit.*, hlm. 152.

⁵⁰ Wertheim, *Suharto and the Untung Coup*, sebagaimana dikutip oleh John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal; Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, terj., Hersri Setiawan. (Jakarta: Hasta Mitra, 2008), hlm. 108.

memiliki anggapan sebaliknya, ia beranggapan bahwa Sjam adalah oknum militer yang diberi tugas untuk menyusup ke PKI. Tak seorang pun tokoh atau orang penting di dalam PKI yang pernah mendengar, mengenal apalagi memiliki hubungan dekat dengan Sjam.⁵¹ Wertheim menilai seluruh kesaksian Sjam di dalam persidangan tidak bisa dipercaya. Mungkin saja Sjam adalah agen ganda yang bekerja untuk kelompok tertentu di lingkungan militer. Apabila penilaian Wertheim benar, kemungkinan Sjam berperan sebagai “provokator” untuk melibatkan PKI di dalam suatu aksi yang diciptakan untuk gagal.⁵²

Dalam tulisan berikutnya pada 1979, Wertheim secara keras menuding Sjam sebagai antek tentara yang menyusup ke dalam tubuh PKI. “Terdapat satu orang yang bertindak sebagai manipulator konspirasi yang ulung: Sjam bekerja sebagai agen Angkatan Bersenjata.”⁵³ Dalam pandangan wertheim, berbagai kenyataan ini memperlihatkan bahwa Soeharto merupakan salah seorang di antara dalang-dalang G30S. Dalang sebenarnya, menurut Wertheim adalah “tokoh-tokoh dari kalangan militer yang memanfaatkan *double agent*: Sjam, demi tujuan pribadi dan kelompoknya. Tujuan utamanya adalah memunculkan dalih yang mereka fungsikan untuk memukul PKI dan

⁵¹ John Roosa, *Op. Cit.*, hlm. 108.

⁵² *Ibid.*, hlm. 109.

⁵³ Wertheim, *Whose Plote?*, sebagaimana dikutip oleh John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal; Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, terj., Hersri Setiawan. (Jakarta: Hasta Mitra, 2008), hlm. 109

menggulingkan rezim Soekarno.”⁵⁴ Dalam skema Wertheim, Soeharto layaknya pemeran jenius yang adimanusia. Semua hal berjalan mengikuti rancangannya. G30S bukan hanya melibatkan PKI yang ambruk dengan cepat, ia pun memberikan akses kepada Soeharto untuk menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat. Ahmad Yani yang notabene adalah perwira atasan Soeharto, begitu juga dengan staff umumnya dilibas dalam sekali tebas.⁵⁵

Soebandrio yang merupakan mantan kepala Badan Pusat Inteljen menyimpulkan, alur peristiwa yang bermula pada 1 Oktober 1965 hingga 11 Maret 1966 ini laksana kudeta merangkak yang dijalankan secara bertahap. Tahap pertama, menyingkahkan pesaingnya di kalangan Angkatan Darat sebagaimana Ahmad Yani dan lainnya. Tahap kedua, membubarkan PKI yang menjadi saingan besar tentara kala itu. Tahap ketiga, melenyapkan kekuatan pro Soekarno melalui penangkapan 15 Menteri, terhitung Soebandrio. Tahap keempat, merebut kekuasaan Soekarno dengan mengambil alih status Presiden.⁵⁶ Perihal keterlibatan Soeharto dalam G30S dipertegas oleh Wimanjaya Liotohe, mantan pendukung militan Presiden Soekarno. Dalam buku yang diberi judul *Prima Dosa* (1993), Liotohe berpendapat bahwa otak

⁵⁴ John Roosa, *Op. Cit.*, hlm. 111.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 112.

⁵⁶ Asvi Warman Adam, *Op. Cit.*, hlm. 147.

sebenarnya peristiwa percobaan kup 30 September 1965 adalah Jenderal Soeharto sendiri.⁵⁷

h. Tidak Adanya Pemeran Tunggal dalam G30S (*Chaos*)

Dibalik banyaknya teori dengan kesimpulan yang berlainan satu sama lain, seluruh teori G30S beranggapan bahwa gerakan itu adalah hasil kolaborasi politik yang dirancang dengan apik, mempunyai tujuan yang gamblang, dan berjalan di bawah garis komando. Sebagian peneliti menunjuk Soeharto sebagai dalang yang dibantu oleh kelompok Angkatan Darat yang ia pimpin. Sedangkan rezim Orde Baru menetapkan PKI sebagai dalang dengan restu dari Presiden Soekarno. Adapula peneliti yang mengungkap pemerintah Amerika Serikat, melalui dinas rahasianya CIA, merupakan dalang yang memainkan anak wayangnya di Indonesia. John Roosa dalam karyanya *Dalih Pembunuhan Massal* (2008) menjelaskan, tidak ada “otak” utama dalam G30S. Menurut Roosa, G30S menjadi bersifat misterius justru karena tidak adanya pusat pengambilan keputusan yang tunggal. Dalam bukunya, Roosa memperlihatkan bagaimana para pimpinan gerakan

⁵⁷ Wijaya Herlambang, *Op.Cit.*, hlm. 221.

tidak memiliki kesamaan dalam pandangan dan sikap, lebih-lebih opsi lain jika “opsi terbaik” pun kandas.⁵⁸

Seseorang yang paling dekat dengan para penggerak inti pada saat aksi berjalan, Brigadir Jenderal Suparjo, dibingungkan dalam hal siapa pimpinan gerakan ini yang sesungguhnya. Suparjo mengatakan bahwa tokoh sentral dalam G30S, sejauh tokoh itu ada, ialah Sjam yang memiliki fungsi sebagai penghubung antara Aidit dan para perwira progresif. Akan tetapi Sjam menjadi pusat karena posisinya yang di tengah-tengah, bukan karena kuasa atas semua kekuatan di dalam G30S. Sjam menjadi jembatan antara Aidit yang bertanggung jawab atas personil-personil PKI yang terlibat dalam G30S dengan Untung, Latief, dan Soejono yang bertanggung jawab atas personil-personil militer. Dua kelompok ini melibatkan diri dalam sebuah aksi yang, karena ketiadaan pilihan lain, mengubah perantara mereka menjadi si pemimpin.

Sjam adalah seseorang mediator yang perlahan-lahan hilang: ia mempertemukan kedua kelompok itu untuk melancarkan aksi tapi tidak dalam posisi untuk memimpin mereka begitu aksi tersebut dimulai. Sekali aksi telah menyimpang dari rencana dan peserta aksi harus berimprovisasi, mereka pun berpecah ke arah yang berbeda-beda.

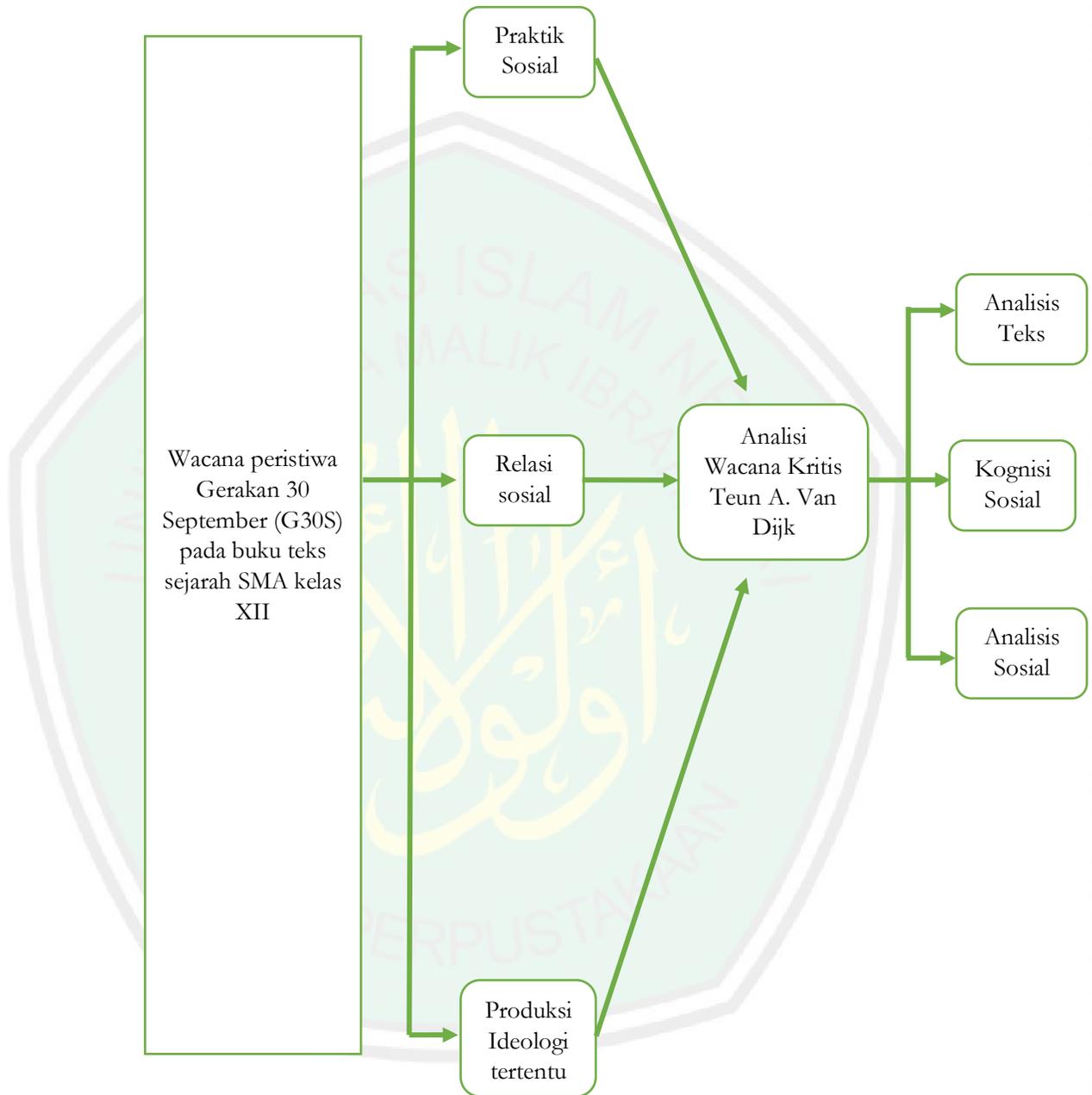
⁵⁸ Hilmar Farid, *G-30-S dan Pembunuhan Massal 1965-66* (<https://indoprogress.com/2008/04/g-30-s-dan-pembunuhan-massal-1965-66/>, diakses 03 Maret 2020).

Kekacauan dan ketidakjelasan G30S akhirnya melumpuhkan gerakan itu sendiri dalam menghadapi serangan balik Soeharto yang tak terduga. Tidak adanya pusat itulah yang membikin bingung peserta G30S saat itu, dan terus membikin bingung para sejarawan yang berusaha memahami gerakan ini.⁵⁹



⁵⁹John Roosa, *Op.Cit.*, hlm. 294.

B. Kerangka Berfikir



Tabel 2.1
Alur Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Fenomena yang dimaksud dapat berupa, tindakan, motivasi, persepsi, dan perilaku secara holistik. Melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, penelitian kualitatif berupaya meneliti suatu konteks khusus dengan menggunakan macam-macam prosedur alamiah.⁶⁰ Tujuan penelitian kualitatif tidak untuk menguji kebenaran sebuah teori, akan tetapi berupaya mengembangkan teori yang telah ada melalui pengumpulan data yang sudah tersedia.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Pendekatan ini bertujuan menghubungkan teks dan konteks untuk melihat tujuan dan praktik bahasa. Ada bermacam aspek pokok yang memiliki pengaruh terhadap produksi wacana, yakni: latar belakang seseorang yang memproduksi wacana, partisipan wacana, usia, agama, pendidikan, jenis kelamin, kelas sosial, dan etnis. Aspek yang telah

⁶⁰ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 6.

disebutkan di atas, dalam banyak hal, memiliki sangkut-paut dengan penggambaran wacana-wacana di masyarakat.⁶¹ Singkatnya, pendekatan ini tidak hanya mengungkap makna sebuah wacana, tapi juga konteks wacana sehingga dapat diperoleh pemahaman yang holistik mengenai wacana yang dianalisis. Dalam penerapannya, peneliti memakai analisis wacana kritis yang dirumuskan oleh Teun A. van Dijk.

B. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁶²

Berikut adalah sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini:

1. Sumber Data Primer

- a. Buku teks Sejarah Indonesia untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII yang ditulis oleh Prof. Dr. Susanto Zuhdi, Dr. Linda Sunarti, Arif Pradono, S.S., M.I.Kom., dan Dr. Abdurakhman. Buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2018 ini memuat sub bab yang membahas materi Gerakan 30 September.

⁶¹ Eriyanto, *Op.Cit.*, hlm. 7-10.

⁶² Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

- b. Wawancara dengan koordinator penulis buku pelajaran *Serajah Indonesia Kelas XII* (2018) dan peneliti sejarah yang konsen pada isu G30S.

2. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa hasil penelitian, buku-buku yang terkait dengan kajian analisis wacana kritis, G30S, dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Analisis Teks

Pengumpulan data pada dimensi teks dilakukan dengan analisis teks model Teun A. van Dijk. Analisis teks dilakukan pada sub bab Gerakan 30 September pada buku pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XII.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengungkap kognisi sosial. Guna mengungkap proses produksi teks, perlu dilakukan wawancara dengan penulis buku tersebut. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan

dengan teknik wawancara terbuka. Teknik wawancara terbuka digunakan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden.⁶³ Responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas.⁶⁴ Peneliti melakukan wawancara dengan koordinator penulis buku yang akan diteliti, yakni, Dr. Abdurakhman. Wawancara tersebut dilaksanakan dengan perantara *Zoom*. Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu peneliti sejarah yang juga pernah menjadi guru mata pelajaran sejarah di beberapa Sekolah Menengah Atas, yakni Satriono Priyo Utomo di daerah Sunter, Jakarta Timur.

3. Studi Literatur/Dokumen

Studi Literatur/Dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data guna mengungkap kognisi sosial dan analisis sosial. Praktik wacana terdiri dari proses produksi dan komunikasi teks yang ditelusuri melalui studi literatur/dokumen. Peneliti juga merujuk beberapa literatur/dokumen, antara lain; Tap MPRS No.25 tahun 1966, Silabus Kurikulum 2013, dan beberapa literatur lain yang relevan.

⁶³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 198.

⁶⁴ Lexy. J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 191.

D. Analisis Data

Peneliti memanfaatkan analisis data dari metode analisis wacana kritis Teun. A. van Dijk. Pengajar di Universitas Pompeu Fabra, Barcelona ini menggolongkan elemen wacana menjadi tiga bagian, yaitu: teks, kognisi sosial, dan analisis sosial. Berikut adalah skema analisis wacana model van Dijk:



Tabel 3.1

Model Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk

1. Analisis Teks

Van Dijk membagi elemen teks menjadi tiga struktur, yakni struktur makno, superstruktur dan struktur mikro. Struktur makro adalah makna umum dari suatu teks yang mampu diamati dengan memeriksa topik yang ditonjolkan dalam sebuah wacana. Kemudian superstruktur yang memiliki hubungan dengan rangka sebuah teks, bagaimana penggalan teks diatur ke dalam wacana secara keseluruhan. Terakhir struktur mikro yang dapat diamati dari bagian kecil suatu teks yakni kata,

kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar.⁶⁵ Berikut adalah uraian elemen wacana van Dijk.

No	Struktur Wacana	Hal yang Diamati	Elemen
1	Struktur Makro	Tematik, merupakan tema/topik yang dikedepankan dalam suatu wacana	Topik
2	Superstruktur	Skematik, bagaimana bagian dan urutan wacana diskemakan dalam teks yang utuh	Skema
		Semantik, makna yang ingin ditekankan dalam wacana. Misal dengan memberi detil pada satu sisi atau membuat eksplisit satu sisi lain dan mengurangi detil sisi lain.	Latar, Detil, Maksud, Pra-anggapan, Nominalisasi

⁶⁵ Eriyanto, *Op.Cit.*, hlm. 226.

3	Struktur Mikro	Sintaksis, bagaimana kalimat (bentuk, susunan) yang dipilih	Bentuk Kalimat, Koherensi, Kata Ganti
		Stilistik, bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam suatu wacana.	Leksikon
		Retoris, bagaimana dan dengan cara penekanan dilakukan.	Grafis, Metafora, Ekspresi

Tabel 3.2

Elemen Wacana van Dijk

a. Tematik

Aspek ini merujuk pada topik umum dari suatu teks. Menurut van Dijk, wacana memiliki tata aturan umum (*macrorule*). Apabila dirunut, bagian-bagian dalam teks akan mengarah pada sebuah topik umum. Bagian-bagian itu saling menunjang dengan yang lain guna menunjukkan topik umum tersebut.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 229-230.

b. Skematik

Teks atau wacana mempunyai skema dari pendahuluan sampai akhir. Kerangka itu memperlihatkan bagaimana bagian-bagian dalam teks diurutkan dan disusun sehingga membentuk kesatuan arti. Skema dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, judul dan *lead*. Kedua, isi berita secara keseluruhan.⁶⁷

c. Semantik

Semantik mencakup latar, detil, maksud, pra-anggapan, dan nominalisasi. Latar merupakan bagian teks yang dapat mempengaruhi arti dari wacana. Umumnya latar ditampilkan di awal sebelum pokok pikiran penulis yang asli muncul, hal ini dimaksud untuk memberi kesan pokok pikiran penulis sangat berdasar.⁶⁸ Detil merupakan kontrol informasi yang diperlihatkan oleh penyampai pesan. Informasi yang menguntungkan diri/pihak tertentu akan ditampilkan secara rinci, dan sebaliknya, Informasi yang merugikan diri/pihak tertentu akan ditampilkan dengan jumlah terbatas, lebih-lebih tidak ditampilkan.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 232.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 235.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 238.

Jika dalam detil informasi yang menguntungkan diri/pihak tertentu akan ditampilkan secara panjang dan rinci. Maka elemen maksud berupaya melihat informasi yang menguntungkan diperlihatkan secara jelas (eksplisit). Sedangkan informasi yang merugikan ditampilkan dengan kata samar, berbelit-belit, dan eufemistik (implisit).⁷⁰ Pra-anggapan dimanfaatkan untuk menjunjung makna sebuah teks dengan melayangkan narasi yang belum terbukti kebenarannya namun dijadikan pondasi guna menunjang ide tertentu.⁷¹ Nominalisasi merupakan perubahan kata kerja (verba) menjadi kata benda (nomina), melalui imbuhan “pe-an”. Perubahan kata itu dimaksudkan untuk merubah kalimat, dari sebelumnya kalimat kerja/tindakan (verba), menjadi kalimat peristiwa. Jika kalimat kerja/tindakan (verba) membutuhkan dua aktor, yaitu subjek dan objek, maka kalimat benda lebih menekankan pada peristiwa yang dialami oleh aktor yang terkena dampak dari peristiwa tersebut.⁷²

d. Sintaksis

Sintaksis mencakup bentuk kalimat, koherensi, dan kata ganti.

Bentuk kalimat dapat berupa kalimat aktif-pasif maupun deduktif-

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 240.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 256.

⁷² *Ibid.*, hlm. 155-156.

induktif. Kedua kalimat ini berperan dalam aspek penonjolan atau menyamakan inti kalimat (peristiwa).⁷³ Aspek koherensi digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa atau wacana. Dengan koherensi, frasa dapat dilihat saling terpisah, berhubungan, atau hubungan kausal. Koherensi sering dilakukan sekalipun fakta yang berlainan disambungkan sehingga terlihat koheren.⁷⁴ Kemudian aspek pronominal (kata ganti), yakni instrumen yang dimanfaatkan oleh penulis untuk memperlihatkan posisi khalayak dalam suatu wacana. Penggunaan kata ganti umumnya ingin memperlihatkan bahwa sikap penulis pun mewakili sikap khalayak secara umum.⁷⁵

e. Stilistik

Elemen ini berhubungan dengan pemilihan kata (diksi) atas kemungkinan kata yang tersedia. Pemilihan kata yang dipakai tidak semata karena kebetulan, melainkan secara ideologis memperlihatkan pemaknaan seseorang terhadap fakta/realitas.⁷⁶

⁷³ *Ibid.*, hlm. 251-253.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 242.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 254.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 255.

f. Retoris

Aspek retorik melingkupi grafis, metafora, dan ekspresi. Grafis memeriksa bagian-bagian yang ditonjolkan dalam suatu wacana. Grafis mencakup pemakaian garis bawah, huruf miring, huruf tebal, termasuk foto, gambar, grafik, tabel, *caption* yang memperkuat arti penting dalam suatu pesan.⁷⁷ Metafora dimaksud sebagai “bumbu penyedap” dari suatu wacana. Umumnya penulis menggunakan metafora dalam rangka pembenaran terhadap pendapat tertentu kepada khalayak umum. Metafora pun sangat beragam seperti kepercayaan masyarakat, petuah, ungkapan, peribahasa, pepatah dan sebagainya. Metafora dipakai untuk mendukung pesan inti.⁷⁸ Kemudian ekspresi, digunakan untuk melihat apa yang ditekankan atau ditonjolkan oleh seseorang yang dapat diamati dari teks.⁷⁹

2. Kognisi Sosial

Van Dijk mengatakan penelitian atas wacana tidak selesai pada analisis atas teks belaka, tetapi juga wajib menyertakan bagaimana wacana itu diproduksi. Sebab teks merupakan produk dari suatu realisasi ideologi yang jua wajib dikritisi.⁸⁰ Kognisi sosial

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 257.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 259.

⁷⁹ Alex Sobur, *Analisis Teks Media* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 84.

⁸⁰ Eriyanto, *Op.Cit.*, hlm. 221.

mengambarkan bagaimana proses teks tersebut diciptakan penulis, dan menunjukkan bagaimana nilai-nilai masyarakat menyebar dan diserap oleh kognisi penulis, dan akhirnya ditujukan untuk memproduksi sebuah wacana.⁸¹

Kognisi sosial merupakan kumpulan skema, yang oleh van Dijk diistilahkan sebagai *Model*. Ia mencakup struktur mental yang berisi pandangan-pandangan tentang manusia, peranan sosial dan peristiwa. Model yang tertanam dalam ingatan mewujudkan dalam bentuk gambaran pengetahuan, pendapat, dan penilaian tentang peristiwa, yang pada akhirnya menentukan sikap dan tindakan yang diambil. Model tersebut digunakan untuk mengkonstruksi realitas, menyeleksi dan memproses informasi dari lingkungan eksternal manusia.⁸² Selanjutnya, van Dijk mengajukan pertanyaan terkait bagaimana penulis membaca peristiwa, bagaimana penulis mendengar peristiwa, bagaimana latar belakang penulis, bagaimana peristiwa tersebut ditampilkan, dimaknai, dan dimengerti dalam pikiran penulis. Hal ini termasuk kepada bagaimana suatu peristiwa difokuskan, dimaknai, diseleksi, dan disimpulkan dalam keseluruhan proses produksi wacana.⁸³

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 222.

⁸² *Ibid.*, hlm. 261-262.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 267.

3. Analisis Sosial

Dalam meneliti teks, van Dijk menjelaskan perlunya melakukan analisis terkait bagaimana makna yang dihayati masyarakat secara bersama untuk menggambarkan kekuasaan sosial yang diciptakan lewat praktik diskursus dan legitimasi. Van Dijk menjelaskan ada dua unsur pokok dalam analisis mengenai masyarakat ini, yakni praktik kekuasaan, dan akses. Hal itu akan dijelaskan secara lebih lanjut:⁸⁴

a. Praktik kekuasaan

Kekuasaan adalah kontrol yang dimiliki oleh seseorang/kelompok untuk mengendalikan seseorang/kelompok lain yang didasari pada kepemilikan sumber-sumber bernilai seperti status, pengetahuan, dan uang. Selain berbentuk fisik, kekuasaan juga berbentuk persuasif, yakni tindakan seseorang/kelompok yang secara tidak langsung mengontrol seseorang/kelompok dengan cara mempengaruhi kondisi mental, seperti kontrol pikiran, sikap, kepercayaan, dan pengetahuan.⁸⁵

b. Akses

Van Dijk memberikan penegasan khusus terhadap masing-masing golongan masyarakat. golongan elit memiliki akses yang

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 271-272.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 272.

lebih besar dibandingkan dengan golongan yang terpinggirkan maupun golongan yang sedang tidak berkuasa. Dengan demikian, golongan elit memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menjangkau akses pada media. Akses oleh media ini digunakan untuk mempengaruhi kesadaran khalayak dengan cara menentukan topik apa dan isi wacana apa yang dapat disebar dan didiskusikan kepada khalayak.⁸⁶

E. Pengecekan Keabsahan Data

Dr. Dedy N. Hidayat dalam tulisan pengantarnya untuk buku *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media* (2015), menyarankan tiga kriteria yang berlaku bagi sebuah studi analisis wacana kritis, yaitu: holistik & kontekstual; *historical situatedness*; dan teori.⁸⁷

1. Holistik dan kontekstual, yakni mengaitkan teks dengan konteks. Berikut contoh kalimat dalam analisis teks mengenai periode awal Orde Baru: “Pemerintah Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila ... maka pemerintah Orde Baru segera berupaya menjalankan

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 272.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. Xi-Xiii.

UUD 1945 dan Pancasila secara konsekuen ...”⁸⁸ Oleh peneliti, kalimat ini ditafsirkan secara subyektif memarjinalkan pemerintahan Orde Lama (Soekarno). Kalimat “pemerintah Orde Baru segera berupaya menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara konsekuen”, ditafsirkan sebagai keberpihakan penulis kepada pemerintahan Orde Baru (Soeharto). Soeharto dikonstruksikan secara positif dan berjasa karena mengembalikan tatanan pemerintahan negara yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, serta dianggap secara tidak langsung mengkonstruksi kehidupan masa Orde Lama yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Struktur makro yang dibangun dalam teks menguntungkan Soeharto serta memojokkan pemerintahan Soekarno. Representasi ini muncul akibat penulis teks masih dipengaruhi oleh wacana yang dibangun Orde Baru meskipun rezim tersebut telah runtuh. Tafsiran ini hanya salah satu dari penafsiran yang mungkin muncul atas teks tersebut.

2. *Historical Situatedness*, yakni menempatkan yang diteliti dalam konteks *Historical Situatedness* yang melingkupinya. Sebagai contoh penulisan Gerakan 30 September/PKI dalam buku teks sejarah

⁸⁸ Abdurakhman, dkk. *Sejarah Indonesia Kelas XII* (Jakarta: Kemendikbud, 2018), hlm. 115.

dipengaruhi oleh konteks historis yang melingkupi penulisan teks, yaitu masih berlakunya Tap MPRS no. 25 1966.

3. Teori, adalah interpretasi dan eksplanasi yang didasarkan pada teori tertentu. Sebagai contoh, dalam pemahaman Antoni Gramsci, hegemoni yang dijalankan oleh pranata dan instrumen negara secara tak terlihat dapat membuat rakyat (pembaca menjadi tentram, dan tidak sadar jika mereka berada dalam objek penindasan. Wacana G30S dalam buku teks sejarah hampir selalu muncul dalam wajah yang seram dan mampu mempengaruhi pemikiran pembacanya. Dalam konteks ini, rakyat tidak sadar jika mereka ditindas dalam aspek pengetahuan.

F. Prosedur Penelitian

Berikut adalah prosedur penelitian yang mencakup 4 tahapan, diantaranya:

1. Tahap pra penelitian. Menyusun laporan proposal penelitian,
2. Tahap pelaksanaan penelitian. Melakukan penggalan data berupa analisis teks maupun penggalan data di lapangan,
3. Tahap pengelolaan data yang meliputi tindakan transkrip hasil penelitian, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dan
4. Menulis dan menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Identitas Buku yang Diteliti

Dalam penelitian tentang analisis wacana terhadap buku teks Sejarah Indonesia untuk kelas XII ini, peneliti menggunakan satu buah buku sebagai objek penelitian. Berikut paparan identitas buku yang akan diteliti:

No.	Judul Buku	Penulis	Penertbit	Tahun Terbit	Kurikulum
1	Sejarah Indonesia (SMA/MA/SMK/MAK KELAS XII)	Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum. Dr. Linda Sunarti Arif Pradono, S.S., M.I.Kom.	Kemendikbud – Jakarta.	Cetakan kedua, 2018	Kurikulum 2013.

		Dr. Abdurakhman.			
--	--	---------------------	--	--	--

Tabel 4.1
Identitas Buku yang Diteliti



Gambar 4.1
Buku yang Diteliti

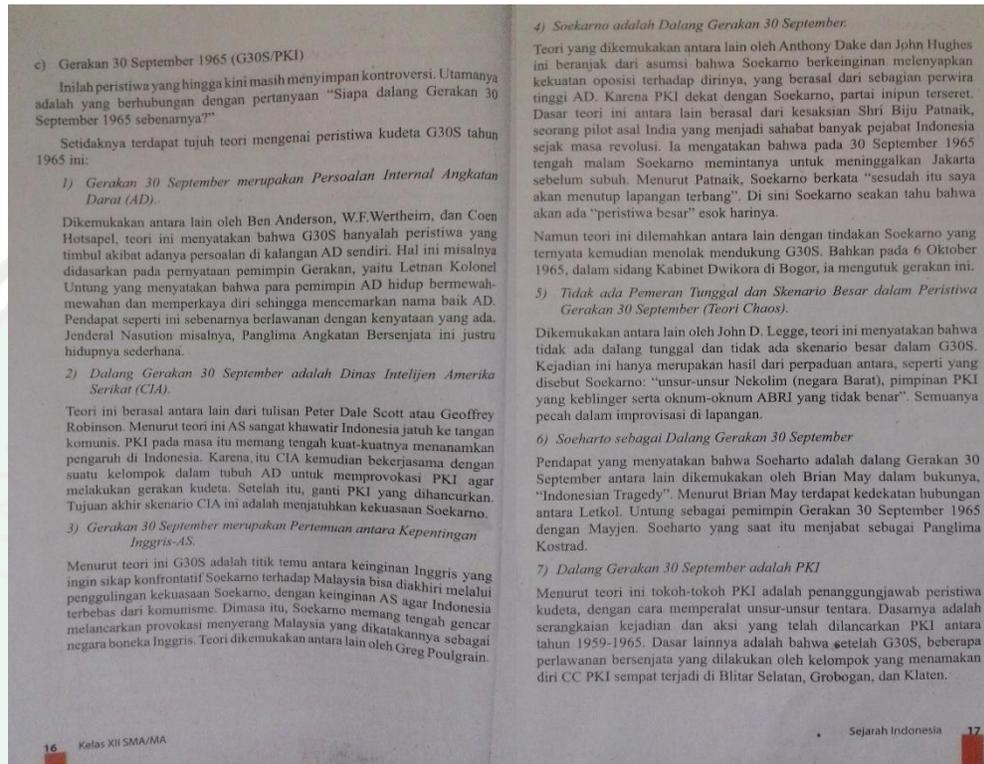
2. Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam buku *Sejarah Indonesia kelas XII* (2018) yang disusun oleh Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum, Dr. Linda Sunarti, Arif Pradono, S.S., M.I.Kom, dan Dr. Abdurakhman, pembahasan terkait sejarah Gerakan 30 September dapat dilihat di Bab 1 yang berjudul “Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa”. Dalam Bab ini terdapat 2 sub-judul, yakni: Berbagai Pergolakan di Dalam Negeri (1948-1965); dan Dari Konflik Menuju Konsensus Suatu Pembelajaran. Sub-judul pertama mencakup pembahasan: Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan

Ideologi (8-22); Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Kepentingan (22-25); serta Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Sistem Pemerintah.

Sub-judul kedua terdiri dari pembahasan tentang: Kesadaran Terhadap Pentingnya Integrasi Bangsa (31-33); Teladan Para Tokoh Persatuan (33-41); Mewujudkan Integrasi Melalui Seni dan Sastra (41); dan Pejuang Perempuan (42-44). Adapun pembahasan Gerakan 30 September tertulis di halaman 16-22. Berbeda dengan beberapa buku pelajaran sejarah pada umumnya yang menggunakan sudut pandang tunggal dalam melihat Gerakan 30 September, buku *Sejarah Indonesia Kelas XII* (2018) lebih progresif dalam memaparkan peristiwa G30S. Para penulis menawarkan tujuh sudut pandang, antara lain: (1) Gerakan 30 September merupakan Persoalan Internal Angkatan Darat, (2) Dalang Gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika (CIA), (3) Gerakan 30 September merupakan Pertemuan antara Kepentingan Inggris-AS, (4) Soekarno adalah Dalang Gerakan 30 September, (5) Tidak ada Pemeran Tunggal dan Skenario Besar dalam Peristiwa Gerakan

30 September, (6) Soeharto sebagai Dalang Gerakan 30 September, dan
(7) Dalang Gerakan 30 September adalah PKI.



Gambar 4.2

Teori Peristiwa G30S yang Ditawarkan dalam Buku Pelajaran *Sejarah Indonesia Indonesia Kelas XII* (2018)

B. Hasil Penelitian

Sesuai dengan kaidah penelitian analisis wacana menurut Teun A. van Dijk, penelitian ini terdiri dari tiga tingkatan. Tingkat pertama adalah analisis teks yang dilakukan peneliti terhadap wacana Gerakan 30 September yang terdapat di dalam buku pelajaran *Sejarah Indonesia Kelas XII* (2018). Tingkat kedua, adalah menggali kognisi sosial yang diperoleh dari hasil

wawancara dengan penulis buku yang akan diteliti. Dan tingkat ketiga adalah hasil analisis sosial, yang didapat dari studi literatur dan wawancara dengan peneliti sejarah, Satriono Priyo utomo.

1. Analisis Teks Materi Gerakan 30 September pada Buku Pelajaran *Sejarah Indonesia Kelas XII (2018)*

STRUKTUR WACANA	HAL YANG DIAMATI	ELEMEN
<p>Struktur</p> <p>Makro</p>	<p>Tematik</p> <p>Judul: <i>Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI)</i>. (Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i>, hlm 16).</p>	<p>Topik</p> <p>Penambahan diksi “PKI” setelah frasa “Gerakan 30 September” mempertegas bahwa PKI adalah aktor utama dari peristiwa Gerakan 30 September.</p>
<p>Superstruktur</p>	<p>Skematik</p> <p>Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI).</p>	<p>Skema</p> <p>Intisari (summary)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Judul</i> <p>Judul yang tertulis adalah kesimpulan dari isi materi pelajaran di dalam buku</p>

	<p>(Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i>, hlm 16).</p>	<p>tersebut. Dalang peristiwa G30S dipertegas dengan tambahan frasa “(G30S/PKI).”</p>
	<p>Inilah peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi. Utamanya adalah yang berhubungan dengan pertanyaan “Siapa dalang Gerakan 30 September sebenarnya?” (Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i>, hlm 16).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lead</i> <p>Kalimat ini mengandung pertanyaan terkait “Siapa dalang Gerakan 30 September sebenarnya?” Pertanyaan ini menjadi pembuka untuk pembahasan 7 teori G30S yang ditawarkan oleh buku ini.</p>
	<p>Setidaknya terdapat tujuh teori mengenai peristiwa kudeta G30S tahun 1965 ini:</p>	<p><i>Isi Secara Keseluruhan (story)</i></p> <p>Dalam buku ini, materi G30S dipaparkan dalam 7 teori, yakni: G30S merupakan Persoalan Internal Angkatan Darat (AD); Dalang G30S</p>

	<p>(Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i>, hlm 16).</p>	<p>adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat (CIA); G30S merupakan Pertemuan antara Kepentingan Inggris-AS; Soekarno adalah Dalang G30S; Tidak ada Pemeran Tunggal dan Skenario Besar dalam Peristiwa G30S; Soeharto sebagai Dalang G30S; dan Dalang G30S adalah PKI. Penulis memberi ruang kepada pembaca untuk melihat peristiwa G30S dari banyak sudut pandang. Namun kesimpulan yang ditawarkan dalam buku <i>Sejarah Indonesia</i> (2018) ini menambahkan “/PKI” setelah frasa G30S untuk mempertegas PKI sebagai tokoh utama dalam</p>
--	---	---

		peristiwa Gerakan 30 September.
Struktur Mikro	Semantik ...tokoh-tokoh PKI adalah penanggungjawab peristiwa kudeta, dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959-1965. Dasar lainnya adalah bahwa setelah G30S, beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan di CC PKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten. (Buku Pelajaran	Latar Kalimat di samping menggunakan latar historis untuk menegaskan apa yang ingin disampaikan kepada para pembaca, yaitu: mengenai masa lalu komunisme yang buruk sehingga tidak boleh diberi kesempatan untuk hidup kembali. Kalimat ini menguraikan mengenai apa yang pernah dilakukan oleh PKI di masa lampau, dengan pernah melakukan kudeta dan perlawanan di beberapa daerah.

	<p><i>Sejarah Indonesia Kelas XII,</i> hlm 17).</p>	
	<p>...G30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan AD sendiri. Hal ini misalnya didasarkan pada pernyataan pimpinan Gerakan, yaitu Letnan Kolonel Untung yang menyatakan bahwa para pemimpin AD hidup bermewah-mewahan dan memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik AD. Pendapat seperti ini sebenarnya berlawanan dengan kenyataan yang ada. Jenderal Nasution misalnya, Panglima Angkatan Bersenjata ini</p>	<p style="text-align: center;">Detil</p> <p>Kontrol informasi yang ditampilkan penulis dapat dilihat dari teks yang diberi penebalan huruf. Penambahan fakta yang diberi penebalan huruf di akhir kalimat bertujuan untuk mematahkan argumen dari salah satu teori yang diajukan dalam G30S. Dengan menampilkan argumen dan fakta yang berlawanan, teori yang diajukan akan terlihat keliru atau kurang relevan.</p>

	<p>justru hidupnya sederhana. (Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i>, hlm 16).</p>	
	<p>...terjadi peristiwa Kanigoro Kediri, dimana BTI telah membuat kacau peserta mental Training Pelajar Islam Indonesia dan memasuki tempat ibadah saat subuh tanpa melepas alas kaki yang penuh lumpur dan melecehkan Al Quran. (Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i>, hlm 21).</p>	<p>Dengan menunjukkan informasi di samping, BTI – organisasi sayap PKI – ditampilkan sebagai kelompok yang tidak religius.</p>
	<p>PKI lalu meniupkan isu tentang adanya Dewan Jenderal di tubuh AD yang tengah mempersiapkan kudeta. Di sini PKI “menyodorkan” dokumen</p>	<p>Teks ini dapat ditafsirkan sebagai penonjolan PKI bak kelompok culas yang memiliki inisiatif awal dalam operasi G30S. Hal ini dapat dilihat dari frasa “meniup isu”.</p>

	<p>Gilchrist yang ditandatangani Duta Besar Inggris di Indonesia. Isi dokumen ditafsirkan sebagai isyarat adanya operasi dari pihak Inggris-AS dengan melibatkan <i>our local army friends</i> (kawan-kawan kita dari tentara setempat) untuk melakukan kudeta. (Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i>, hlm 21).</p>	
	<p>Juli 1960 misalnya, PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet dan tentara. Ketika tentara bereaksi, Soekarno segera turun tangan hingga persoalan ini sementara selesai. (Buku Pelajaran</p>	<p>Dalam kalimat ini, sosok Soekarno dilukiskan sebagai sosok “ayah” yang sementara waktu, berhasil mengatasi kemelut antara PKI dengan pihak tentara.</p>

	<p><i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i>, hlm 18).</p>	
	<p>PKI pada masa itu memang tengah kuat-kuatnya menanamkan perharuh di Indonesia. Karena itu CIA kemudian bekerjasama dengan suatu kelompok dalam tubuh AD untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. (Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i>, hlm 16).</p>	<p style="text-align: center;">Maksud</p> <p>Secara implisit, penulis menggunakan praktik bahasa tertentu untuk menonjolkan basis kebenaran tertentu pula. Walau dalam teks di samping tertulis “adanya keterlibatan CIA”, namun teks tetap menonjolkan PKI sebagai tokoh sentral dengan frasa “memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta.”</p>
	<p>Hubungan Angkatan Darat dengan PKI sendiri pada masa itu juga kian memanas. Sindiran dan kritik kerap dilontarkan para petinggi PKI terhadap AD. (Buku</p>	<p>Secara implisit, teks ini ingin menonjolkan peran PKI sebagai provokator. Frasa “sindirian dan kritik kerap dilontarkan” menggambarkan perbuatan PKI</p>

	Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i> , hlm 20).	yang membangkitkan kemarahan AD.
	Dalam situasi tak menentu itulah Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayor Jenderal Soeharto segera mengambil alih pimpinan Angkatan Darat, karena Jenderal Ahmad Yani selaku Men/Pangad saat itu belum diketahui ada di mana. (Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i> , hlm 22).	Kalimat ini dapat diartikan sebagai penonjolan tokoh Soeharto. Di saat banyak orang sedang bingung karena peristiwa G30S, Soeharto diceritakan sebagai orang yang sangat sigap dan paham kondisi di tengah situasi yang tak menentu.
	Di bidang kebudayaan, saat kelompok cendekiawan anti-PKI memproklamasikan Manisfesto Kebudayaan (Manikebu) yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu	Teks ini menjelaskan Lekra sebagai organisasi yang menolak keberagaman.

	<p>ideologi politik tertentu (misalnya komunis), Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang pro PKI segera mengancam keras. (Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i>, hlm 19).</p>	
	<p>Di tingkat pusat, PKI mulai berusaha dengan sungguh-sungguh untuk duduk dalam kabinet. Mungkin PKI merasa kedudukannya sudah cukup kuat. (Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i>, hlm 19).</p>	<p style="text-align: center;">Pra-anggapan</p> <p>Penambahan diksi “mungkin” dalam teks di samping menunjukkan fakta yang belum terbukti kebenarannya, tetapi dijadikan dasar untuk mendukung gagasan tertentu.</p>
	<p>Tentara telah membayangkan bagaimana 21 juta petani dan buruh bersenjata, bebas dari pengawasan mereka. (Buku</p>	<p>Kalimat ini memiliki arti bahwa PKI dibayangkan dapat mengukuhkan dominasi dan dapat melakukan aksi politiknya. Penegasan ini</p>

	Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i> , hlm 20).	dipertebal dengan angka 21 juta. Angka yang sangat besar untuk melukiskan jumlah simpatisan PKI.
	Juli 1960 misalnya, PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet dan tentara. (Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i> , hlm 18).	Penggunaan diksi “kecaman-kecaman” di dalam kalimat ini terlihat samar. Tidak dijelaskan bentuk kecaman seperti apa yang dilakukan oleh PKI.
	Ketika diketahui bahwa Gerakan September ini berhubungan dengan PKI, maka pengerjaran terhadap pimpinan dan pendukung PKI juga terjadi. (Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i> , hlm 22).	<p style="text-align: center;">Nominalisasi</p> <p>Imbuan “Pe-an” dalam teks di samping dapat ditafsirkan sebagai upaya mengubah kata kerja (verba) ke dalam kata benda (nomina). Hal ini menghilangkan peran aktor atau pelaku dari suatu peristiwa. Misal: dalam bentuk nomina kalimat akan berbunyi “pengerjaran terhadap pimpinan</p>

		<p>dan pendukung PKI juga terjadi.” – sesuai redaksi. Sedangkan, jika diubah dalam bentuk verba, kalimatnya akan berbunyi “Tentara dan masyarakat yang tidak senang dengan PKI mengejar pimpinan dan pendukung PKI.”</p>
	<p style="text-align: center;">Sintaksis</p> <p>Sedangkan di daerah, persoalan-persoalan yang muncul tampaknya malah lebih pelik lagi karena bersinggungan dengan konflik yang lebih radikal. Hal ini sebagian merupakan akibat dari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh program di bidang agraria, dimana PKI segera</p>	<p style="text-align: center;">Bentuk kalimat</p> <p>Kalimat di samping menggunakan kalimat induktif. Di mana inti kalimat ditempatkan di bagian akhir. Pernyataan di awal kalimat berupa keterangan “bersinggungan dengan konflik yang lebih radikal” diperjelas dengan inti kalimat berupa “PKI segera melancarkan apa</p>

	<p>melancarkan apa yang disebut sebagai kampanye aksi sepihak. (Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i>, hlm 19).</p>	<p>yang disebut sebagai kampanye aksi sepihak.”</p>
	<p>Operasi penumpasan Gerakan 30 September pun segera dilakukan. Bukan saja di Jakarta, melainkan hingga basis mereka di daerah-daerah lainnya. (Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i>, hlm 22).</p>	<p>Teks di samping menggunakan struktur kalimat deduktif. Inti kalimat yang diberi penebalan huruf, diperjelas dengan kalimat penjelas berupa keterangan tempat.</p>
	<p>Demonstrasi-demonstrasi juga dilakukan untuk menuntut pembubaran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Maka hingga pertengahan tahun 1965 atau sebelum pecah kudeta di</p>	<p style="text-align: center;">Kohenrensi</p> <p>Konjungsi “maka” dalam teks tersebut berupaya menunjukkan bahwa pembubaran HMI berdampak pada peta kekuatan politik yang sebelumnya netral, menjadi semakin condong ke kiri. Dua proposisi antara</p>

	<p>awal Oktober, kekuatan politik di ibukota tampaknya sudah semakin bergeser ke kiri. (Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i>, hlm 20).</p>	<p>“pembubaran HMI” dan “semakin bergeser ke kiri” merupakan fakta yang berbeda. Namun hal ini nampak koheren setelah dibubuhi konjungsi “maka”.</p>
	<p>Tim dokter Cina yang didatangkan DN Aidit untuk memeriksa Soekarno menyimpulkan bahwa presiden RI tersebut kemungkinan akan meninggal atau lumpuh. Maka dalam rapat politbiro PKI tanggal 28 September 1965, pimpinan PKI pun memutuskan untuk bergerak. (Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i>, hlm 21).</p>	<p>Penggunaan kata hubung “maka” pada teks di samping berupaya menghubungkan dua fakta yang berbeda menjadi sebuah wacana yang menjelaskan sebab akibat.</p>

	<p>Jenderal Yani segera menuntut agar mereka yang terlibat dalam peristiwa Bandar Betsy diadili. (Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i>, hlm 21).</p>	<p>Kata Ganti</p> <p>Penggunaan diksi “mereka” dalam kalimat di samping adalah upaya mempertegas jarak dan memisahkan antara pihak “kami” (AD) dengan “mereka.” (PKI)</p>
	<p>Bukan saja oleh pasukan yang setia pada Pancasila tetapi juga dibantu oleh masyarakat yang tidak senang dengan sepak terjang PKI. (Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i>, hlm 22).</p>	<p>Merujuk pada alur cerita dari buku <i>Sejarah Indonesia</i> (2018) terkait materi pelajaran G30S, frasa yang diberi penebalan huruf dari kalimat di samping, dapat ditafsirkan selaku: sebagian dari pihak tentara; dan sebagian dari kalangan muslim.</p>
	<p>Stilistik</p> <p>Di kota-kota tindakan liar juga bukan tidak terjadi.</p>	<p>Leksikon</p> <p>Pemilihan kata “tindakan liar” menunjukkan pemaknaan penulis terhadap realitas.</p>

	<p>(Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i>, hlm 19).</p>	<p>Pemaknaan dengan pilihan kata tersebut dapat diartikan sebagai “tindakan di luar batas wajar.”</p> <p>Diksi “pengejaran” yang</p>
	<p>..., maka pengejaran terhadap pimpinan dan pendukung PKI juga terjadi. Bukan saja oleh pasukan yang setia pada Pancasila tetapi juga dibantu oleh masyarakat yang tidak senang dengan sepak terjang PKI. G30S/PKI pun berhasil ditumpas, menandai pula berakhirnya gerakan dari Partai Komunis Indonesia. (Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i>, hlm 22).</p>	<p>digunakan dalam kalimat di samping, lebih dipilih dari kemungkinan kata yang tersedia, seperti: pembunuhan; penangkapan; dan pemburuan. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai upaya menghilangkan kesan sadis dalam upaya menumpas orang-orang komunis di Indonesia. Pola yang sama juga terkandung dalam diksi “ditumpas”, yang lebih dipilih dari kemungkinan kata yang tersedia, seperti: dibinasakan; dimusnahkan; dan dibasmi.</p>

	<p>Pada bulan-bulan awal tahun 1965 PKI “menyerang” para pejabat anti PKI dengan menuduhnya sebagai kapitalis birokrat yang korup. (Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i>, hlm 19).</p>	<p>Pilihan kata “menyerang” ditafsirkan sebagai penggambaran PKI sebagai pihak yang ofensif dan memulai lebih dulu.</p>
	<p style="text-align: center;">Retoris</p> <p>Buat analisa, apa rencana PKI di balik usul tersebut, dan apa akibat yang ditimbulkan dengan adanya usulan PKI tentang dipersenjatanya petani dan buruh bagi masyarakat Indonesia pada masa itu! (Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i>, hlm 20).</p>	<p style="text-align: center;">Grafis</p> <p>Berikut adalah soal tugas yang diberikan kepada siswa. Dari sekian banyak teori yang ditawarkan penulis dalam memandang G30S, siswa hanya diberikan soal yang berkaitan dengan PKI. Hal ini ditafsirkan sebagai framing penulis dalam memarjinalkan PKI.</p>

	<p>Teori yang dikemukakan antara lain oleh Nugroho Notosusanti dan Ismail Saleh ini merupakan teori (Dalang Gerakan 30 September adalah PKI) yang paling umum didengar mengenai kudeta tanggal 30 September 1965. (Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i>, hlm 18).</p>	<p style="text-align: center;">Metafora</p> <p>Dalam kalimat di samping terdapat frasa "...yang paling umum." Hal ini secara implisit, dapat ditafsirkan sebagai upaya menonjolkan <i>common sense</i> atau kepercayaan masyarakat. Jelasnya, teks yang diberi penebalan huruf menegaskan teori yang dipercaya sebagai kebenaran.</p>
	<p>Inilah peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi. (Buku Pelajaran <i>Sejarah Indonesia Kelas XII</i>, hlm 16).</p>	<p style="text-align: center;">Ekspresi</p> <p>Proposisi di samping menunjukkan bahwa, silang pendapat dalam wacana peristiwa G30S masih berlaku sampai detik ini, walau peristiwa tersebut sudah berlalu sejak 55 tahun lalu. Teks ini secara implisit membawa pesan</p>

		bagi masyarakat untuk terus menggali informasi tentang peristiwa Gerakan 30 September.
--	--	--

Dari hasil analisis teks buku *Sejarah Indonesia Kelas XII (2018)* di atas, dapat dilihat bahwa penulis memberikan berbagai sudut pandang dalam menuliskan peristiwa G30S. Terdapat tujuh teori yang ditawarkan, yakni: Gerakan 30 September merupakan Persoalan Internal Angkatan Darat (AD); Dalang Gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat (CIA); Gerakan 30 September merupakan Pertemuan antara Kepentingan Inggris-AS; Soekarno adalah Dalang gerakan 30 September; Tidak ada Pemeran Tunggal dan Skenario Besar dalam Peristiwa Gerakan 30 September (Teori Chaos); Soeharto adalah Dalang Gerakan 30 September; dan Dalang Gerakan 30 September adalah PKI. Walau penulis berupaya untuk memberi banyak persepsi kepada pembaca dalam melihat peristiwa G30S, penonjolan PKI sebagai tokoh utama dalam G30S pun terlihat jelas. Hal ini bisa dilihat dari *struktur makro* dengan judul Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI). Penambahan diksi “PKI” setelah “Gerakan 30 September” mengartikan PKI sebagai dalang utama dalam peristiwa G30S.

Hal lain yang dapat ditemui adalah kadar isi dari setiap teori G30S yang ditampilkan. Sebanyak enam teori alternatif dari tujuh teori G30S yang ditawarkan dalam buku pelajaran tersebut, dibahas secara sangat singkat. Enam teori awal yang disebutkan, dibahas tidak lebih dari dua halaman. Teori pertama, Gerakan 30 September merupakan Persoalan Internal Angkatan Darat (AD), hanya dijelaskan dalam 9 baris (hlm. 16). Teori kedua, Dalang Gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat (CIA), diuraikan dalam 7 baris (hlm. 16). Teori ketiga, Gerakan 30 September merupakan Pertemuan antara Kepentingan Inggris-AS, dijelaskan dalam 6 baris (hlm. 16). Teori keempat, Soekarno adalah Dalang gerakan 30 September, dipaparkan dalam 11 baris (hlm. 17). Teori kelima, Tidak ada Pemeran Tunggal dan Skenario Besar dalam Peristiwa Gerakan 30 September (Teori Chaos), diuraikan 6 baris (hlm. 17). Teori keenam, Soeharto adalah Dalang Gerakan 30 September, dijelaskan secara singkat dalam 6 baris (hlm.17). Sedangkan teori yang ditulis terakhir, yakni Dalang Gerakan 30 September adalah PKI, diberikan ruang lebih banyak. Teori ini dijelaskan dalam 6 halaman (hlm, 17-22).

Dalam materi pelajaran peristiwa G30S di buku ini, penggambaran Soekarno sebagai presiden kala itu digambarkan sebagai sosok “Bapak” yang berusaha menengahi konflik AD dengan PKI. Hal ini bisa dilihat dalam aspek *semantik* berikut,

“Juli 1960 misalnya, PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet dan tentara. Ketika tentara bereaksi, Soekarno segera turun tangan hingga persoalan ini sementara selesai.” (Buku Pelajaran *Sejarah Indonesia Kelas XII*, hlm. 18).

Lebih lanjut, buku ini menonjolkan Soeharto sebagai sosok yang heroik. Hal ini dapat dilihat dari aspek *semantik* di bawah ini,

“Dalam situasi tak menentu itulah Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayor Jenderal Soeharto segera mengambil alih pimpinan Angkatan Darat, karena Jenderal Ahmad Yani selaku Men/Pangad saat itu belum diketahui ada di mana.” (Buku Pelajaran *Sejarah Indonesia Kelas XII*, hlm. 22).

Sebaliknya, penggambaran PKI dalam buku pelajaran ini terbilang cukup negatif, gambaran ini dapat ditemui dalam beberapa kalimat yang sudah diuraikan di analisis teks, salah satu kalimat tersebut adalah

“...tokoh-tokoh PKI adalah penanggungjawab peristiwa kudeta, dengan cara memperlambat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959-1965. Dasar lainnya adalah bahwa setelah G30S, beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan di CC PKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten.” (Buku Pelajaran *Sejarah Indonesia Kelas XII*, hlm. 17).

Secara garis besar, dalam menjelaskan materi peristiwa Gerakan 30 September, buku pelajaran sejarah ini -- *Sejarah Indonesia Kelas XII* (2018) - memiliki pola sebagai berikut: Pertama, mendiskreditkan PKI sebagai dalang utama peristiwa G30S. Kedua, menggambarkan peran Soekarno

sebagai penengah dalam konflik AD dengan PKI. Ketiga, melukiskan Soeharto dan tentara sebagai juru selamat dalam peristiwa G30S. Konklusi buku ini dalam melihat peristiwa G30S yakni, PKI adalah tokoh utama dan tokoh sentral dalam peristiwa berdarah itu.



BAB V

PEMBAHASAN

Seperti yang telah dijelaskan pada hasil analisis di atas, dalam memaparkan materi peristiwa G30S, buku pelajaran *sejarah Indonesia Kelas XII* (2018) bisa dikatakan sangat progresif. Selain menampilkan wacana umum – G30S/PKI – buku ini juga menawarkan berbagai wacana alternatif. Pada 04 September 2020, peneliti berusaha menghubungi Prof. Susanto Zuhdi sebagai Penanggung Jawab (PJ) dari penggarapan buku ini untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Namun karena padatnya agenda, beliau mengarahkan peneliti kepada Koordinator Tim Penulis, yakni Bapak Dr. Abdurakhman.

Dalam keterangan Abdurakhman, buku pelajaran *Sejarah Indonesia Kelas XII* (2018) dirancang dan disusun dengan melibatkan Arif Pradono yang pada saat itu menjadi kepala sekolah dan pengajar mata pelajaran sejarah di salah satu SMA. Arif Pradono pun pernah menjabat Wakil Kepala Bidang Akademik dan Kepala Sekolah Dian Ilmu-Labschool Cinere pada tahun 2002 sampai tahun 2008. Berangkat dari pertanyaan “Apa sebetulnya masalah yang ada di SMA terkait dengan pembelajaran sejarah?” Tim penulis kemudian menginterpretasikan pertanyaan tersebut dengan Silabus Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Wajib, yang dikeluarkan oleh Kemendikbud pada tahun

2013.⁸⁹ Abdurakhman menambahkan, indikator dasar yang menjadi landasan penulisan materi G30S di dalam buku *Sejarah Indonesia Kelas XII (2018)* merujuk pada Kompetensi Dasar (KD) 3.1, 3.2, 4.1, dan 4.2 yang tertulis di Silabus Kurikulum 2013. Rincian sebagai berikut:⁹⁰

<p>3.1 Mengevaluasi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan</p> <p>3.2 Mengevaluasi peran tokoh Nasional dan Daerah yang Berjuang Mempertahankan Keutuhan Negara dan bangsa Indonesia pada masa 1948 – 1965</p> <p>4.1 Merekonstruksi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan (antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S/ PKI) dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah.</p> <p>4.2 Menulis sejarah tentang tokoh nasional dan daerah yang berjuang mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1948- 1965.</p>	<p>Perjuangan Bangsa Indonesia dalam Mempertahankan Integrasi Bangsa Indonesia dalam Mempertahankan Integrasi Bangsa dan Negara RI.</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan Tokoh nasional dan daerah yang berjuang mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1948 -1965 	<p>Mengamati:</p> <ul style="list-style-type: none"> melalui menyimak penjelasan guru, membaca buku, melihat foto-foto, film dokumenter, browsing di internet (jika tersedia) tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi bangsa dan negara RI. <p>Menanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> berdiskusi untuk mendapatkan klarifikasi tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi bangsa dan negara RI. <p>Mengeksplorasikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> mengumpulkan informasi yang terkait dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi bangsa dan negara RI kemerdekaan melalui bacaan atau 	<p>Tugas: menilai tugas individu (mengamati, menanya, pengumpulan data, asosiasi, komunikasi).</p> <p>Observasi: mengamati kegiatan peserta didik dalam proses mengumpulkan data, analisis data dan pembuatan laporan.</p> <p>Portofolio: laporan yang dibuat peserta didik tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi bangsa dan negara RI.</p> <p>Tes tertulis: menilai kemampuan peserta didik dalam mengevaluasi tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi bangsa dan negara RI</p>	<p>8 mg x 2 jp</p>	<ul style="list-style-type: none"> Buku Paket Sejarah Indonesia kelas XII Buku-buku lainnya. Internet (jika tersedia) Gambar-gambar tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Film dokumenter Peta Indonesia
---	---	---	--	--------------------	---

Gambar 5.1

Potongan dari Silabus SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Kurikulum 2013. (Hlm. 39)

⁸⁹ Wawancara dengan Abdurakhman, Koordinator Tim Penulis Buku Teks Sejarah Indonesia Kelas XII (2018), tanggal 13 September 2020.

⁹⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *KURIKULUM 2013 SMA/MA/SMK/ MATA PELAJARAN SEJARAH INDONESIA*. Disosialisasikan pada 11-13 Mei 2013 di Hotel Jayakarta, hlm. 39.

Lebih lanjut, argumen Abdurakhman dan tim penulis dalam menawarkan berbagai wacana alternatif dalam materi peristiwa G30S adalah untuk mengenalkan siswa/I ke banyak sudut pandang dalam memahami peristiwa G30S. “Karena dalam sejarah itu perlu diperhatikan adalah satu fakta tidak cukup, dalam sejarah jadi perlu didukung oleh fakta-fakta yang lain. Maka kami mengawali di kalimat itu kan “bahwa ini adalah satu peristiwa yang sampai sekarang menjadi satu perbedaan pandangan,” jelasnya. Selain memberikan berbagai pengetahuan mengenai peristiwa G30S, Dosen Ilmu Sejarah Universitas Indonesia itu juga menyatakan, disertakannya berbagai wacana alternatif diharap dapat membuat siswa/i lebih pro aktif dalam kegiatan belajar-mengajar. “Ketika mereka (siswa/i) melihat ada pandangan (alternatif) seperti itu, mereka bisa bertanya ke guru. Kan jangan melihat konteks dari satu sisi, tapi lihat dari latar belakang lain. Kita jelaskan urutan terjadinya peristiwa itu. Lalu mereka bisa menganalisis sendiri, mana yang menurut pandangan mereka benar. Kurikulum 2013 kan menuntut mereka (siswa/i) untuk membaca, menganalisis, bertanya, bahkan menyusun satu tulisan atau simpulan,” lanjut Abdurakhman.

Walaupun menawarkan banyak wacana alternatif terkait peristiwa G30S, di lain sisi, tim penulis juga memiliki sikap dan posisi pribadi dalam melihat peristiwa G30S. Hal ini tertuang di keseluruhan materi peristiwa G30S di buku *Serajah Indonesia Kelas XII* (2018). Isi dari bab IV adalah interpretasi sikap tim penulis dalam aspek analisis teks. Pada bab ini peneliti akan

mengupas posisi tim penulis dalam memandang peristiwa G30S dari segi kognisi sosial.

A. Kognisi Sosial Penulis dalam Memproduksi Wacana Sejarah Peristiwa Gerakan 30 September pada Buku Teks *Sejarah Indonesia Kelas XII* (2018)

Dalam menulis materi peristiwa G30S dalam buku pelajaran tersebut, Tim Penulis tidak menemui perbedaan pendapat. Keempat penulis yang telah disebutkan di atas memiliki satu pandangan yang sama dalam melihat peristiwa G30S. “Ya, kalau kami melihat G30S itu PKI,” jelas Abdurakhman. Menurut Ketua Departemen Ilmu Sejarah Universitas Indonesia ini, salah satu bukti bahwa PKI “mengepalai” G30S adalah laporan surat kabar *Harian Rakyat* yang dimuat pasca G30S. “Dengan peristiwa yang terjadi pada 1 Oktober pagi, kenapa surat kabar lain belum tahu tapi surat kabarnya PKI sudah tahu lebih dulu? Nah, ini kan jadi satu penanda, menjadi satu fakta bahwa (Letkol) Untung itu dibalik PKI. Karena *Harian Rakyat* tadi mendukung Untung,” lanjut Abdurakhman. Dalam buku *Dalih Pembunuhan Massal* (2008), John Roosa membenarkan bahwa PKI mendukung G30S. Pada 2 Oktober, *Harian Rakyat* merilis editorial yang memuji G30S sebagai tindakan patriotik dan revolusioner. Editorial itu juga menyatakan bahwa

G30S merupakan “persoalan internal Angkatan Darat.”⁹¹ Sekalipun PKI menunjukkan dukungan kepada G30S melalui *Harian Rakyat*, sesungguhnya editorial tertanggal 2 Oktober tersebut ingin menunjukkan kebijakan resmi partai yang memerintahkan anggotanya untuk tidak ikut-ikutan dalam peristiwa berdarah itu.⁹²

Mengenai besaran porsi dari masing-masing teori yang ditawarkan dalam buku pelajaran *Sejarah Indonesia Kelas XII* (2018), Abdurakhman mengatakan bahwa semua teori G30S dalam buku tersebut dijelaskan dalam porsi yang seimbang. “Teori ke-7 yang menerangkan PKI sebagai dalang G30S, sebenarnya bukan dijelaskan dalam enam halaman (hal 17-22). Jumlah baris tidak terlalu jauh dengan teori lain. Umumnya antara tujuh sampai sembilan baris. Teori yang ke-7 ini hanya sembilan baris,” paparnya. Ia pun menjelaskan bahwa paragraf yang tertulis “Namun terlepas dari teori mana yang benar ...” adalah bagian yang terpisah dari teori ke -7 dan merupakan penjelasan secara menyeluruh terhadap teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya.

⁹¹ John Roosa, *Op.Cit.*, hlm. 94.

⁹² *Ibid.*, hlm. 101.



Gambar 5.2

Sebagian Pemaparan Teori ke-7 G30S (hlm. 17-22)

Akan tetapi, alih-alih menjelaskan seluruh peristiwa G30S dengan membuat sub-judul khusus yang baru, Tim Penulis lebih memilih untuk mengintegrasikan “penjelasan” tersebut ke dalam poin teori ke-7 – Dalang Gerakan 30 September adalah PKI. Oleh peneliti, hal ini ditafsirkan sebagai upaya penulis untuk memarjinalkan teori alternatif dan menggaungkan kembali

teori yang dikemukakan oleh Brigjen TNI Nugroho Notosusanto tersebut. Walhasil, teori yang paling umum didengar ini mendapat porsi besar dalam uraian buku pelajaran tersebut. Dalam hasil kajiannya, Wijaya Herlambang menjelaskan bahwa pada tahun 1967, pasca terbitnya *Cornell Paper*, seorang agen CIA, Guy Pauker, menghubungi Jenderal Suwanto yang saat itu menjadi penasehat politik Soeharto. Pauker menyarankan agar Angkatan Darat menyusun versi tandingan atas *Cornell Paper*. Dengan hal ini, Nugroho selaku sejarawan dengan latar belakang militer, kemudian menulis versi yang lebih sistematis dengan didukung kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan dari pengadilan militer pada Februari 1996. Namun Jelas, proyek ini berjalan bukan semata-mata didorong oleh hasrat pribadi Nugroho, tapi lebih penting lagi, bahwa proyek ini mewakili kepentingan militer dan pendukung utamanya, yakni pemerintah AS.⁹³

Paragraf selanjutnya menceritakan tentang segala tindakan PKI sebelum G30S. Tindakan mereka dinarasikan sebagai sebab keresahan masyarakat di berbagai daerah. Provokasi, pertentangan, serta kekerasan yang dilakukan oleh tindak-tanduk PKI memuncak pada peristiwa G30S. Kemudian pasca G30S, dalam keadaan yang serba tidak pasti, Soeharto muncul sebagai pahlawan dengan mengambil alih kepemimpinan untuk memusnahkan G30S. Cerita diakhiri dengan narasi keberhasilan militer dalam pembubaran dan pemusnahan

⁹³ Wijaya Herlambang, *Op.Cit.*, hlm.157-158.

PKI. Salah satu kalimat di halaman 19 buku ini dapat menjadi contoh bagaimana tindakan-tindakan PKI dituliskan sebagai sebab keresahan masyarakat. Dengan bunyi,

PKI segera melancarkan apa yang disebut sebagai kampanye aksi sepihak. Aksi ini merupakan upaya mengambil alih tanah milik pihak-pihak mapan di desa dengan paksa dan menolak janji-janji bagi hasil yang lama.

Narasi ini memang dibangun atas fakta yang terjadi, namun pemilihan fakta ini ditafsirkan sebagai salah satu upaya dalam mendiskreditkan PKI. Banyak fakta alternatif yang tidak dinarasikan dalam buku pelajaran *Sejarah Indonesia Kelas XII* (2018) ini. Salah fakta yang dipinggirkan adalah, dinamika pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang macet karena sifat keras tuan-tuan tanah yang bersikeras tidak mau mendistribusikan tanahnya. Pada tahun 1949 PKI dan Barisan Tani Indonesia (BTI) gencar melakukan aksi sepihak untuk mengambil alih dan menduduki tanah-tanah yang dianggap akan didistribusikan kepada para petani. Seperti di Delanggu, Klaten. Di bawah pimpinan BTI, 162 petani berhasil merebut kembali tanah garapannya seluas 3.500 meter persegi dari para tuan tanah.⁹⁴ Aksi sepihak dilancarkan sebagai bentuk pernyataan bahwa redistribusi berjalan lamban karena tuan tanah

⁹⁴*Harian Rakjat*, 2 April 1964. Sebagaimana dikutip oleh Satriono Priyo Utomo, *Politik Dipa Nusantara* (Yogyakarta: Kendi, 2019), hlm. 152.

berafiliasi dengan partai-partai Islam dan Nasionalis menghalang-halangi pelaksanaan peraturan tersebut.

PKI memandang Aksi Sepihak sebagai sikap politik resmi yang ditujukan kepada para tuan tanah yang ogah untuk melaporkan tanah berlebih mereka kepada panitia *landreform*.⁹⁵ Tidak dapat dipungkiri, saat pendaftaran dilaksanakan sering terjadi upaya-upaya yang dilancarkan oleh tuan tanah atau pemilik tanah luas yang memecah tanah milik mereka. Tanah pecahan tersebut selanjutnya dibagikan kepada kerabat dekatnya. Terang saja, para tuan tanah melakukan hal ini di bawah tangan pejabat-pejabat desa. Ketua pendaftaran *landreform* mungkin tidak mengetahui tindakan ini kecuali pamong desa yang terkait melancarkan protes atau statusnya sebagai pendukung BTI maupun PKI.⁹⁶ Di lain sisi, UUPA memastikan bahwa tanah yang dimiliki oleh lembaga agama, seperti masjid dan pesantren terbebas dari program *landreform*. Sehingga banyak kyai mengalihkan status tanah pribadi mereka menjadi tanah wakaf pesantren atau masjid sebagai strategi menghindari *landreform* guna implementasi UUPA.⁹⁷

Penonjolan tokoh Soeharto dalam buku ini juga terlihat jelas pada pemilihan fakta yang tertulis di halaman 22. Hal itu terlukis dalam kalimat,

⁹⁵ Noer Fauzi Rachman, *Landreform dari Masa ke Masa*, sebagaimana dikutip oleh oleh Satriono Priyo Utomo, *Politik Dipa Nusantara* (Yogyakarta: Kendi, 2019), hlm. 152.

⁹⁶ Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965* (Yogyakarta: Jendela, 2001), hlm. 139

⁹⁷ Hermawan Sulistyono, *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang terlupakan Jombang-Kediri 1965-1966*, sebagaimana dikutip oleh oleh Satriono Priyo Utomo, *Politik Dipa Nusantara* (Yogyakarta: Kendi, 2019), hlm. 154.

Dalam situasi tak menentu itulah panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayor Jenderal Soeharto segera berkeputusan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat, karena Jenderal Ahmad Yani selaku Men/Pangad saat itu belum diketahui ada di mana.

Narasi ini menyingkirkan fakta lain bahwa Presiden Soekarno telah mengangkat Mayor Jenderal Pranoto sebagai *caretaker* Menteri Panglima Angkatan Darat pada pukul 12.00 sekaligus memanggil Pranoto untuk menghadap ke Halim. Namun, sampai pukul 17.00, Pranoto belum juga muncul karena tidak diizinkan oleh Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto yang atas kehendaknya sendiri telah mengambil alih pimpinan Komando Angkatan Darat.⁹⁸ Presiden Soekarno tidak menyadari bahwa Pranoto dan staf Yani yang masih hidup telah sepakat mengangkat Soeharto sebagai panglima. Karena status Soekarno adalah Presiden sekaligus Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, penolakan Soeharto untuk mengikuti perintahnya tentang pengangkatan Pranoto dapat disamakan dengan pembangkangan. Soekarno sudah menegaskan bahwa aman bagi Pranoto untuk datang ke Halim. Dengan demikian, menurut protokol kemiliteran, Soeharto tidak mempunyai alasan untuk meragukan penilaian Soekarno. Soeharto menentang atasannya dan melaksanakan strateginya sendiri.⁹⁹

⁹⁸ Manai Sophian, *Kehormatan Bagi Yang Berhak, Bung Karno Tidak Terlibat G30S/PKI*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 75.

⁹⁹ John Roosa, *Op.Cit.*, hlm. 82.

Lebih lanjut, fakta yang dipilih penulis dalam buku tersebut cenderung memarjinalisasikan partai sebagai organisasi yang haus akan kekuasaan. Kalimat di halaman 21 tertulis sebagai berikut,

Tim dokter Cina yang didatangkan DN Aidit untuk memeriksa Soekarno menyimpulkan bahwa presiden RI tersebut kemungkinan akan meninggal atau lumpuh. Maka dalam rapat politbiro PKI tanggal 28 September 1965, pimpinan PKI pun memutuskan untuk bergerak.

Penulisan fakta ini seyogianya disandingkan dengan narasi alternatif yang berimbang. Merupakan sebuah fakta bahwa Ketua PKI, Dipa Nusantara Aidit memiliki tekad untuk merebut kekuasaan. Dalam penelitian yang ditulis oleh Taomo Zhou, Aidit mengadakan pertemuan dengan Mao Zedong di RRT pada 5 Agustus 1965. Saat itu Mao menjabat sebagai Ketua Partai Komunis Tiongkok. Dalam obrolan tersebut, Aidit menerangkan skenario awal dalam upaya merebut kekuasaan. Ia berkata akan membuat sebuah Komite Militer. Sebagian besar dari anggota komite tersebut akan terdiri dari orang-orang sayap kiri, tapi juga harus memasukkan beberapa elemen tengah. Dengan cara ini Aidit ingin membuat musuh (militer dan golongan sayap kanan) kebingungan. Ia merencanakan bahwa Ketua Komite Militer itu harus anggota rahasia partai, namun juga harus mengidentifikasikan diri sebagai orang yang netral. Komite

Militer itu tak boleh berkuasa kelewat lama. Setelah komite itu terbentuk, partai perlu mempersenjatai buruh dan tani dalam waktu yang tepat.¹⁰⁰

Komite Militer yang dimaksud ialah Biro Khusus (BK). Biro ini hanya terdiri dari 5 anggota; Sjam, Pono, Bono, Hamim, dan Soejono Pradigdo. BK bertanggungjawab langsung kepada Aidit.¹⁰¹ Keberadaan biro ini sangat rahasia, bahkan pimpinan partai seperti Nyoto, Lukman, dan Sudisman tidak mengetahui hal ini.¹⁰² Dengan kata lain dan yang paling utama, Aidit dan kelompok eksklusif di dalam PKI lah yang merancang G30S, bukan PKI sebagai sebuah lembaga.¹⁰³ Produksi wacana yang meminggirkan PKI juga diperlihatkan dalam soal atau tugas yang diberikan kepada siswa/i. Dari sekian banyak teori yang dipaparkan oleh Tim Penulis, pertanyaan yang diajukan hanya berfokus pada peran PKI atau teori ke-7. Di halaman 20 buku tersebut, terdapat tugas atau soal yang meminta siswa/I untuk menganalisis peristiwa G30S. Tugas itu tertulis,

Apa rencana PKI di balik usul tersebut, dan apa akibat yang ditimbulkan dengan adanya usulan PKI tentang dipersenjatanya petani dan buruh bagi masyarakat Indonesia pada masa itu!

¹⁰⁰ Arsip Pusat Partai Komunis Tiongkok, 5 Agustus 1965, sebagaimana dikutip oleh Taomo Zhou, *Revolusi, Diplomasi, Diaspora Indonesia Tiongkok dan Etnik Tionghoa 1945-1967*, terj., A. Dahana. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019), hlm. 362-363.

¹⁰¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 41-42.

¹⁰² John Roosa, *Op.Cit.*, hlm. 106-107.

¹⁰³ Taomo Zhou, *Revolusi, Diplomasi, Diaspora Indonesia Tiongkok dan Etnik Tionghoa 1945-1967*, terj., A. Dahana. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019), hlm. 371.

Melihat hal tersebut, peneliti sejarah Satriono Priyo Utomo menjelaskan bahwa pengetahuan ibarat cermin dari masyarakat. Pengetahuan yang beredar di masyarakat dengan sendirinya akan menentukan pemahaman masyarakat.¹⁰⁴ Alumnus Departmen Ilmu Sejarah UI ini juga mahfum bahwa penjelasan terhadap konten atau materi pokok G30S yang ditampilkan dalam buku paket sejarah sangat terbatas. “Jangan berharap lebih terhadap buku paket yang penjelasannya panjang, dan dijelaskan sebagaimana buku utuh.” Jelasnya, Ia menilai buku teks pelajaran *Sejarah Indonesia Kelas XII* (2018) mempunyai sisi *angle* positif karena menawarkan multiperspektif dalam melukiskan G30S.

Selain memiliki sisi positif, laki-laki yang pernah menjadi pengajar di SMA Donbosco, Pulomas, ini pun mengkritisi konten buku yang masih melihat PKI sebagai satu-satunya objek yang terlibat dalam tragedi G30S. “Coba, lihat dari bentuk tugas. Mengapa tidak ada tugas yang sifatnya bukan hanya PKI sebagai objek? Misal, buatlah analisa yang dilakukan oleh Soeharto, buatlah analisa respon soal apa rencana CIA pada gerakan G30S. Kalau dilihat dari bentuk tugas-tugas ini sebetulnya, mereka masih setia menyatakan bahwa gerakan 30 September salah satu instrumen yang paling vital adalah PKI,” terangnya. Lebih lanjut, dengan pengalamannya sebagai pengajar, Satrio melihat bahwa siswa akan lebih fokus ke soal tugas daripada konten materi yang ditulis. “Cara kita membaca adalah lewat tugasnya. Dengan tugas baru

¹⁰⁴ Wawancara dengan Satriono Priyo Utomo, Peneliti Sejarah, tanggal 22 Agustus 2020.

baca. Bukan baca baru ngerjain tugas. Nah kalau dari tugasnya begini, yang progresif (teori alternatif) ini *gak* akan terpakai. Karena yang ditulis hanya “Apa rencana PKI”. Jadi soal wacana AD, soal keterlibatan CIA itu *gak* ada artinya. Yang progresif di depan jadi runtuh.” terang laki-laki yang juga pernah mengajar di SMA Muhammadiyah Rawamangun, tersebut.

Menanggapi perihal konten tugas yang ditulis di buku pelajaran *Sejarah Indonesia Kelas XII* (2018), Abdurakhman menjelaskan bahwa setelah memberi gambaran tentang peristiwa yang terjadi menjelang G30S, Tim Penulis ingin mengajukan pertanyaan yang berlandaskan atas fakta yang terjadi. “Kami tidak menanyakan sesuatu yang masih menjadi perdebatan, jadi yang ditanya itu adalah fakta yang sama pendapatnya.” Lebih lanjut, laki-laki yang pernah menjadi pengajar sejarah di SMA Nurul Fikri, Depok, ini menerangkan bahwa pemilihan konten “Soal/tugas” terkait dengan silabus yang dirilis oleh Kemendikbud. “Silabus (lihat gambar 3.1) yang ada itu mengarahkan kita terkait dengan menulis sejarah yang cenderung lebih ke tokohnya (PKI). Nah dibalik tokoh itu maka, ada apa dibalik peristiwa usulan dari Angkatan ke- 5 tadi. Kita bisa mengangkat siapa tokohnya, bagaimana pemikirannya, lalu apa dampaknya,” bebernya. Ia pun menilai bahwa memberikan pertanyaan yang mengarah ke analisis teori kepada siswa/I SMA dirasa terlalu sulit. “Baru menganalisis sebuah peristiwa saja, itu menjadi satu hal yang cukup tinggi sebenarnya. konteksnya seperti itu juga harus diperhatikan,” ungkap Abdurakhman.

Kemudian, masih menurut Abdurakhman, dalam pemaparan konten sejarah, harus dilihat konteks penulisan yang melatarbelakanginya. Ia membaginya dalam dua bagian, yakni: sejarah akademik, dan sejarah pendidikan. “Dalam konteks (sejarah) pendidikan itu harus dikasih tau satu (pemahaman). Walaupun di lapangan mereka (siswa/i) punya pandangan yang berbeda. Jika di sejarah akademik ada suatu kebebasan dalam menghasilkan teori (G30S), namun dalam pendidikan sejarah, sudah berbeda. Walaupun kita tidak menggunakan perspektif tunggal, misal, dalam menggunakan judul, dan dalam pertanyaan (tugas) G30S-nya kita masukkan (unsur) PKI,” kata Abdurakhman.

Paragraf di atas dapat didefinisikan sebagai sikap para penulis dalam menggambarkan wacana G30S di buku pelajaran *Sejarah Indonesia Kelas XII* (2018). Sikap atau posisi penulis dalam memandang G30S pun tidak timbul secara otomatis. Ia tidak begitu saja lahir dan atau sekadar terucap secara verbal, ia terbentuk dan menjadi bagian yang terus berkembang di dalam masyarakat. Sikap itu muncul akibat aturan-aturan pakem yang diwajibkan Kemendikbud dalam kepenulisan sejarah pendidikan. Sehingga untuk meneliti teks secara komprehensif, perlu dilakukan analisis interpretasi tekstual dengan meneliti bagaimana wacana tentang suatu hal diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Eriyanto, *Op.Cit.*, hlm. 271.

B. Analisis Sosial yang Melatarbelakangi Penulisan Sejarah Peristiwa Gerakan 30 September pada Buku Teks *Sejarah Indonesia Kelas XII* (2018)

Terbentuknya pengetahuan dan pengalaman dunia (*knowledge of world*) yang dimiliki manusia secara bersama-sama tak lepas dari kesatuan kebahasaan yang sebenarnya juga dilandasi oleh konteks yang melatarbelakanginya.¹⁰⁶ Pembahasan kali ini akan mengkaji terkait bagaimana narasi marjinal PKI dalam peristiwa G30S diproduksi dan dikonstruksi dalam buku pelajaran Sejarah Indonesia kelas XII. Buku pelajaran *Sejarah Indonesia Kelas XII* (2018) untuk Kelas XII SMA/MA/SMK/MAK memiliki 4 Kompetensi Inti (KI) yang menjadi 18 Kompetensi Dasar (KD).¹⁰⁷ Dalam penyusunan kerangka sampai tahap penggarapan buku pelajaran tersebut, tim penulis mengacu pada Silabus, KI, KD yang ditetapkan oleh Kemendikbud.

Dengan pendekatan kurikulum 2013, tim penulis menginterpretasikan materi KI dan KD dengan Materi Pokok yang akan ditampilkan. Materi Pokok atau konten peristiwa G30S tercakup dalam KD 3.1, 3.2, 4.1 dan 4.2, yang secara garis besar mencakup: Bagaimana siswa/I mengevaluasi; bagaimana siswa/i melakukan rekonstruksi; dan bagaimana siswa/i menulis tentang peristiwa perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi

¹⁰⁶ Mulyana, *Kajian Wacana: Teori, Metode, Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 86

¹⁰⁷ Abdurakhman, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 8. – lihat lampiran.

bangsa. Mengacu pada silabus mata pelajaran Sejarah Indonesia kurikulum 2013, materi pokok yang ditampilkan adalah berbagai upaya pergolakan dan pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia. Diantaranya: PKI Madiun DI/TII APRA, Andi Aziz, RMS, PPRI/Permesta, dan G30S/PKI.

Abdurakhman menjelaskan, bahwa konteks sejarah pendidikan adalah usaha penegasan suatu kepentingan dari pemerintah. “Karena Pemerintah sendiri belum menghapus, mengangkat atau membatalkan dari Tap MPRS No. 25 Tahun 1966 itu sendiri. Konteks itu kan secara fakta, berarti ada suatu keterlibatan (PKI). Dan tidak bisa dipungkiri ya,” jelasnya. Selain mengatur tentang pembubaran dan pelarangan PKI di Indonesia,¹⁰⁸ Tap MPRS tersebut juga menuliskan tentang larangan untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.¹⁰⁹ Adapun kegiatan mempelajari faham Komunisme/Marxisme-Leninisme di ruang ilmiah seperti universitas, dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan tertentu.¹¹⁰

Masih berlakunya Tap MPRS No. 25 Tahun 1966 hingga saat ini, dapat diinterpretasikan sebagai praktik hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Antonio Gramsci, struktur politik, budaya, sosial suatu masyarakat tergantung pada kombinasi khusus antara masyarakat sipil dan institusional.

¹⁰⁸Tap MPRS No. 25 Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi terlarang Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme, Pasal 1.

¹⁰⁹ *Ibid.*, Pasal 2.

¹¹⁰ *Ibid.*, Pasal 3.

Hegemoni bekerja menggunakan upaya konsensus yang umumnya dibentuk dari tekanan masyarakat mayoritas/dominan.¹¹¹ Melalui Tap MPRS No. 25 Tahun 1966, proses hegemoni berjalan lewat kontrol budaya yang disebar luaskan secara sadar sehingga dengan mudah dan cepat diterima oleh masyarakat.¹¹² Hegemoni mampu mempengaruhi khalayak dalam suatu proses yang damai, bukan dengan kekerasan. Sehingga suatu wacana tesk dan non-tesk (G30S/PKI) dapat diterima menjadi suatu kebenaran. Hegemoni bekerja melalui konsensus daripada menempuh jalan pemaksaan atau kekerasan dari satu golongan terhadap golongan lain. Dengan penjelasan yang demikian, alhasil wacana dipandang sebagai suatu yang logis dan benar. Sikap yang demikian menjadikan seluruh khalayak memandang “itu” sebagai hal yang tak usah dipersoalkan. Lebih-lebih pemerintah memiliki akses luas untuk melakukan distribusi wacana secara formal dan masif terhadap masyarakat. Walhasil, akses masyarakat terhadap sejarah-sejarah alternatif yang ditulis dengan persepektif berbeda sangat terbatas.¹¹³

Melalui Surat Keputusan Kejaksaan Agung Nomer No 19/A/JA/03/2007 dengan tanggal 5 Maret 2007, buku sejarah wajib mencatatkan kata PKI sesudah G30S dan mewajibkan membahas peristiwa Pemberontakan Madiun

¹¹¹ Stefan Titscher, Michael Meyer, Ruth Wodak, dan Eva Vetter, *Metode Analisis Teks & Wacana*, terj., Gazali, dkk. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2009), hlm. 237.

¹¹² Yudi Latif, *Hegemoni Budaya dan Alternatif Media sebagai Wahana Budaya Tanding*, sebagaimana dikutip oleh Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2015), hlm. 104.

¹¹³ Tsabit Azinar Ahmad, *Sejarah Kontroversial di Indonesia Perspektif Pendidikan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 85.

1948. Jika tidak, maka buku tersebut dilarang beredar. Akibat dari Keputusan tersebut, saat itu sejumlah 13 judul buku dari 10 penerbit dilarang beredar, diantaranya, Grasindo, Galaksi Puspa Mega, Yudhistira, Esis, Ganeca Exact, dan Erlangga. Adapun judul buku yang dilarang adalah *Pengetahuan Sosial, Sejarah I* (diterbitkan oleh Grasindo dan disusun oleh Tugiyono K.S.), *Kronik Sejarah Kelas I SMP* (diterbitkan oleh Yudhistira dan disusun oleh Anwar Kurnia), *Sejarah Kelas II SMP* dan *Sejarah Kelas III SMP* (diterbitkan oleh Erlangga dan disusun oleh Matroji).¹¹⁴

Dengan adanya Surat Keputusan Kejaksaan Agung No.19/A/JA/03/2007 tersebut, negara mengendalikan khalayak, utamanya generasi masa depan lewat nilai-nilai sejarah dengan mengontrol pendidikan, melalui media massa dan teks.¹¹⁵ Salah satu kesuksesan dalam praktik hegemoni adalah terciptanya suatu kesepakatan yang dibentuk melalui kegiatan belajar-mengajar.¹¹⁶ Dari penjelasan sebelumnya, hegemoni dapat bekerja melalui hubungan edukasional. Institusi-institusi pendidikan tidak netral, mereka memakai hegemoni dalam hubungan edukasional dengan tujuan membentuk pola kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat unsur kekuasaan. Dengan demikian yang berlaku di dalam kegiatan pendidikan sesungguhnya ialah

¹¹⁴Asvi Warman Adam, *Blunder Kejaksaan Agung dan Departmen Pendidikan Nasional* (<https://nasional.tempo.co/read/95550/blunder-kejaksaan-agung-dan-departemen-pendidikan-nasional> diakses pada 04 Maret 2020).

¹¹⁵ Kartika Pratiwi, *Op.Cit.*, hlm. 25.

¹¹⁶ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam puseran Kekuasaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm .138.

teknik “menularkan” ilmu pengetahuan secara paksa.¹¹⁷ Teori hegemoni dapat menjelaskan mengapa kelompok minoritas secara sukarela mengikuti pandangan kelompok mayoritas, yang seterusnya melanggengkan dominasi dan kekuasaan mereka.

Lain halnya dengan Gramsci yang menyebut struktur politik, budaya, sosial suatu masyarakat tergantung pada kombinasi khusus antara masyarakat sipil dan institusional, Michel Foucault menyebut kekuasaan tidak dapat ditakar. Kekuasaan tidak hanya dikuasai oleh pemerintah. Kekuasaan adalah dimensi dari relasi, oleh sebab itu praktik kekuasaan ada di mana-mana. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan.¹¹⁸ Kekuasaan dapat berupa aturan, sistem, regulasi, susunan dan lain-lain yang dapat menetapkan aturan dan relasi yang menyebabkan segala hal terjadi.¹¹⁹ Foucault menambahkan, kekuasaan acap kali beroperasi melalui pengetahuan, dan pengetahuan kerap memiliki efek kuasa. Hal tersebut turut menghasilkan nilai, perilaku, norma, dan ideologi.¹²⁰

Hal ini dapat dilihat dari Silabus mata pelajaran Sejarah Indonesia yang disahkan oleh Kemendibud. Abdurakhman pun menjelaskan bahwa silabus tersebut menjadi acuan dalam penulisan buku pelajaran sejarah yang ia tulis.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 93.

¹¹⁸ K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis* (Gramedia: Jakarta, 2001), hlm. 319.

¹¹⁹ Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan*, terj., S. H. Rahayu. (Gramedia: Jakarta, 2000), hlm. 144.

¹²⁰ Julia Suryakusuma, *Konstruksi Sosial Seksualitas: Sebuah Pengantar Teoritis*. Jurnal Prisma. Edisi Juli No.7 (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 8.

“Jadi di judul silabusnya itu G30S/PKI. Jadi kami pun bisa mangacu ke situ untuk simpulan terakhir tadi. Tapi wacana alternatifnya bisa jadi rujukan,” jelasnya.¹²¹ Seperti yang sudah diulas dalam bab IV, batas-batas wacana yang diciptakan bukan hanya menentukan pandangan, namun juga meminggirkan wacana lain yang tidak dominan. Contoh sederhana ialah bangunan wacana Gerakan 30 September yang meminggirkan kenyataan lain bahwa PKI adalah salah satu partai yang pada tahun 1926-1927 melakukan aksi perlawanan kepada pemerintah kolonial guna menentang praktik-praktik imperialisme dan kolonialisme.¹²² Partai yang berdiri pada 23 Mei 1920¹²³ ini merupakan partai politik pertama di tanah kolonial Hindia-Belanda yang menggunakan nama ‘Indonesia’.¹²⁴

Wacana lain yang terpinggirkan dengan hadirnya wacana dominan tersebut adalah kenyataan adanya persaingan intrik Angkatan Darat sebagai penyebab pemberontak. Ini tidaklah berarti wacana terpinggirkan merupakan versi yang paling akurat, namun lewat blok wacana dominan yang berkembang sekaligus membatasi pandangan, hal ini seakan menumpahkan kesalahan semata pada PKI. Di sini khalayak diatur, dikontrol dan disiplinkan bukan melalui jalan fisik, tetapi lebih ke pemikiran.¹²⁵ Seperti yang dikatakan oleh

¹²¹ Silabus dapat dilihat di lampiran atau Gambar 3.1

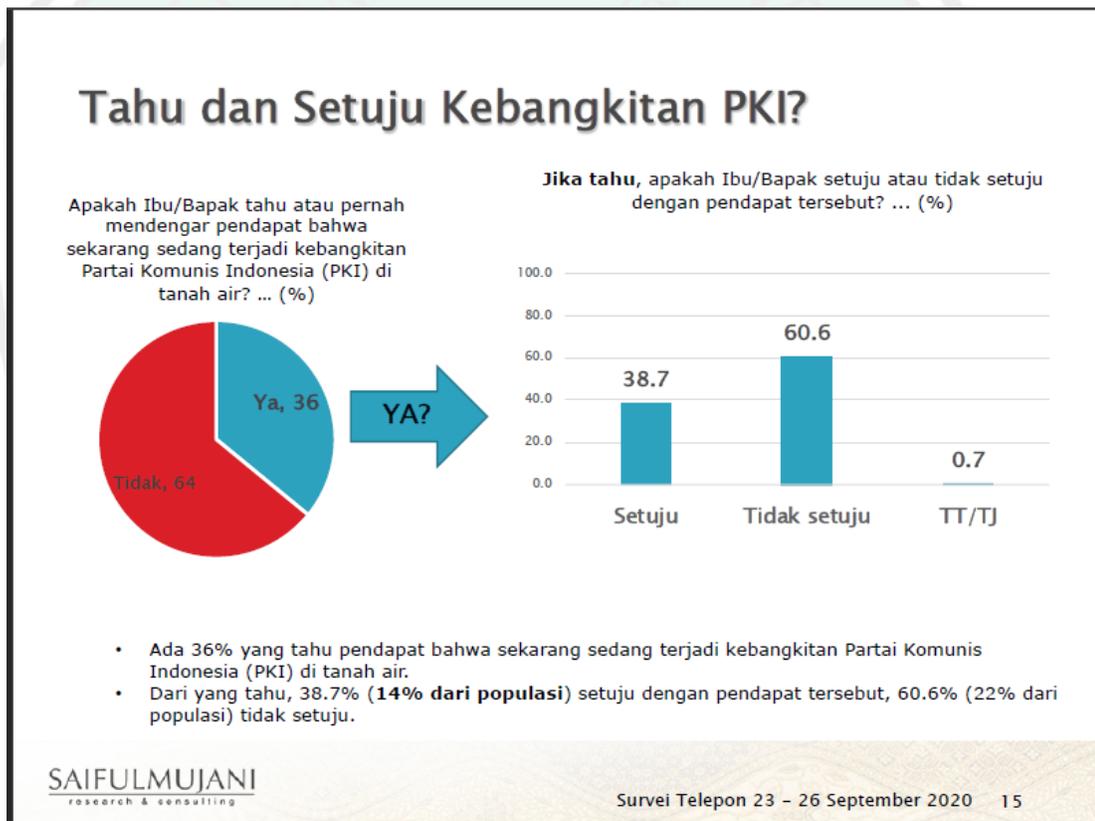
¹²² Satriono Priyo Utomo, *Politik Dipa Nusantara* (Yogyakarta: Kendi, 2019), hlm. 6

¹²³ Jaques Leclerc, *Mencari Kiri: Kaum Revolusioner Indonesia dan Revolusi Mereka*, sebagaimana dikutip oleh Satriono Priyo Utomo, *Politik Dipa Nusantara* (Yogyakarta: Kendi, 2019), hlm. 6

¹²⁴ Busjarie Latief dan Lembaga Sejarah PKI, *Manuskrip Sejarah 45 Tahun PKI 1920-1965*, Satriono Priyo Utomo, *Politik Dipa Nusantara* (Yogyakarta: Kendi, 2019), hlm. 6

¹²⁵ Eriyanto, *Op.Cit.*, hlm. 77-79.

Satriono, bahwa pengetahuan ibarat cermin dari masyarakat.¹²⁶ Sistem pendidikan pun memiliki korelasi dalam membentuk pemahaman masyarakat. Menurut Survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk *Sikap Publik Atas Isu Kebangkitan PKI* (23-26 September 2020)¹²⁷, *Awareness* tentang isu kebangkitan PKI lebih tinggi pada warga dengan Pendidikan tinggi, sementara tingkat kesetujuan terhadap isu tersebut lebih tinggi pada kelompok berpendidikan lebih rendah.



Gambar 5.3

Survei SMRC dengan tajuk *Sikap Publik Atas Isu Kebangkitan PKI* (23-26 September 2020)

¹²⁶ Wawancara dengan Satriono Priyo Utomo, Peneliti Sejarah, tanggal 22 Agustus 2020.

¹²⁷Diakses pada 30 September 2020. Hasil Survei dapat diunduh di laman <https://saifulmujani.com/sikap-publik-atas-isu-kebangkitan-pki/>

Survei dengan 1203 responden ini pun menunjukkan bahwa *Awareness* tentang isu kebangkitan PKI lebih tinggi pada warga dengan pendidikan lebih tinggi. Dari yang *aware*, tingkat kesetujuan terhadap isu tersebut lebih tinggi di kelompok berpendidikan SLTP-SLTA.

Isu Kebangkitan PKI Menurut Demografi (%)

	BASE	Tahu pendapat tentang Kebangkitan PKI?		Jika tahu, setuju?			Jika setuju, apakah sudah mengancam?			
		Ya	Tidak	Setuju	Tidak setuju	TT/TJ	Sudah	Belum	Percaya tidak akan pernah jadi ancaman	Tidak jawab
USIA										
<= 21 thn	12.8	33	67	49	51	0	82	0	18	0
22-25 thn	10.2	42	58	35	65	0	90	10	0	0
26-40 thn	36.9	34	66	32	67	1	76	16	6	2
41-55 thn	25.0	38	62	42	57	1	68	20	4	7
> 55 thn	15.2	35	65	43	56	1	91	7	2	0
PENDIDIKAN										
<= SD	21.7	18	82	34	65	1	81	12	2	5
SLTP	23.4	31	69	46	53	1	85	8	5	2
SLTA	39.2	39	61	42	58	0	79	14	3	4
PT	15.8	62	38	31	68	1	71	15	14	0
PENDAPATAN										
< 1 juta	20.9	32	68	28	72	0	72	12	9	6
1 - < 2 juta	29.9	30	70	44	55	1	87	8	4	1
2 - < 4 juta	33.4	43	57	39	61	0	82	13	2	3
=> 4 juta	14.4	40	60	42	56	2	65	18	17	0

Awareness tentang isu kebangkitan PKI lebih tinggi pada warga dengan pendidikan lebih tinggi. Dari yang aware, tingkat kesetujuan terhadap isu tersebut lebih tinggi di kelompok berpendidikan SLTP-SLTA.

Gambar 5.4

Analisis Demografi Tentang Isu Kebangkitan PKI Menurut Usia. Survei Nasional SMRC dengan tajuk *Sikap Publik Atas Isu Kebangkitan PKI (23-26 September 2020)*.

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa data kelompok usia 21 tahun ke bawah, sebesar 49%, meyakini isu kebangkitan PKI. Jumlah ini hanya selisih dua angka dari jumlah responden yang tidak percaya akan isu tersebut, yakni 51%. Berlanjut ke kelompok usia 22-25 tahun, dari hasil survei sebesar 35% mengamini isu kebangkitan PKI, sementara jumlah responden yang tidak percaya akan kebangkitan PKI sebesar 65%. Dua kelompok usia ini umumnya diisi oleh warga remaja dan atau dewasa muda yang menempuh pendidikan SLTP-SLTA maupun pendidikan tinggi. Dari hasil survei yang dilakukan oleh SMRC, dapat ditafsirkan bahwa hubungan antara sistem pendidikan -- yang mencakup Kurikulum, Silabus, KI, KD, Materi Pokok, Metode Pengajaran -- membentuk pemahaman dan ideologi siswa/i.

Menurut penuturannya, Abdurakhman mengatakan bahwa konteks pembelajaran dalam lingkup SMA dan Perguruan tinggi tidak bisa disamaratakan. Ia menyebut dua hal tersebut berada dalam konteks yang berbeda. “Kalau di SMA itu kan namanya mendidik ya, jadi memberikan satu pemahaman konteks pendidikan. Kalau di perguruan tinggi kan mereka diajak untuk menganalisis konteksnya, akademis konteksnya. Dan boleh diajarkan berbeda pendapat. Kalau di SMA itu kan kita menanamkan, ingat di SMA itu pendidikan. menanamkan satu pemahaman. Jadi ini sudah ideologis kalau bahasa kasarnya itu. Kita harus punya pandangan seperti pemerintah konteksnya. Karena salahsatu tujuannya adalah menanamkan nasionalisme,” tuturnya.

Di dalam praksisnya, ada dua jenis kepentingan dalam pendidikan sejarah. *Pertama*, pendidikan sejarah dilihat sebagai alat untuk memunculkan nasionalisme dan kesadaran kolektif mengenai identitas kekuasaan. *Kedua*, pendidikan sejarah dipandang sebagai alat legitimasi kekuasaan. Jenis kepentingan yang pertama diklasifikasikan sebagai kepentingan yang bersifat afirmatif. Sedangkan jenis kepentingan yang kedua bersifat kompulsif dan manipulatif. Sifat kompulsif dan manipulatif itu ada karena sejarah dimanfaatkan untuk kepentingan salah satu golongan dengan menonjolkan keunggulan-keunggulan penguasa dan mereduksi sejarah yang tidak sesuai dengan “sejarah resmi”. Realisasi dalam pembelajaran sejarah di sekolah cenderung kepada jenis kepentingan yang kedua daripada jenis kepentingan yang pertama.¹²⁸

Dalam esainya yang berjudul *Ideologi dan Aparatus Ideologis Negara*, Louis Althusser menegaskan bahwa kesadaran dibentuk melalui ideologi. ia mengatakan bahwa negara akan terus-menerus menjaga nilai-nilai yang diperlukan dalam usaha melestarikan kekuasaan. Negara memanfaatkan *Repressive State Aparatus (RSA)* dan *Ideological States Apparatus (ISA)*. Menurut Althusser, aparatus yang paling kasat mata, RSA terdiri dari unsur administrasi, pemerintah, pengadilan, polisi, penjara, tentara, dan sejenisnya. Represi yang demikian mempunyai arti bahwa aparatus negara yang tertulis

¹²⁸ Tsabit Azinar Ahmad, *Op.Cit.*, hlm. 67.

sebelumnya berfungsi secara represif (termasuk kekerasan fisik). Sementara bentuk aparatus yang berlainan bergerak lewat penanaman nilai secara lebih “humanis dan halus”, yakni ISA, terdiri dari agama, pendidikan, hukum, sistem politik, komunikasi, dan budaya yang berfungsi dengan ideologi. Dengan demikian, pendidikan merupakan aparatus negara dalam melestarikan nilai-nilai lewat ideologinya.¹²⁹

Pendidikan adalah Aparatus Ideologi Negara yang dominan.¹³⁰ Kekuasaan memilih dan mendukung wacana tertentu sehingga wacana tersebut menjadi dominan, sedangkan wacana-wacana lainnya akan “terpinggirkan” atau “terpendam”.¹³¹ Pranata pendidikan bukanlah suatu yang bebas, netral, dan independen dari macam-macam kepentingan. Pendidikan mesti dipahami dalam jaringan relasi antara ideologi, kekuasaan, dan pengetahuan. Pendidikan merupakan bagian dari pranata sosial yang menjelma sebagai panggung pertarungan pelbagai kepentingan, sehingga menghasilkan corak pranata pendidikan dan mengakibatkan subyektifitas murid.¹³²

Buku teks sejarah adalah media pendidikan dengan muatan ideologis. Dengan begitu, akan terjadi subyektivitas akibat interpretasi sepihak oleh pemerintah selaku pemegang kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan

¹²⁹ Louis Althusser, *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara*, terj., Mohammad Zaki Husein (IndoPROGRESS, 2015), hlm. 3-4.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 35.

¹³¹ Eriyanto, *Op.Cit.*, hlm. 77.

¹³² Agus Nuryatno, *Mahzab Pendidikan Kritis* (Yogyakarta: RESIST BOOK, 2008), hlm. 1-2.

adalah hasil kebijakan politik yang mewujud sebagai kurikulum. Melalui kurikulum Rencana besar pemerintah ditanamkan dalam pendidikan.¹³³ Salah satu aspek penting dalam pembelajaran sejarah adalah penanaman nilai. Nilai tersebut bisa bersifat politis, suatu nilai yang membantu perpolitikan dalam negeri.¹³⁴ Nilai-Nilai yang dijadikan aspek yang ingin ditanamkan biasanya adalah aspek konformitas, ketundukan, antikonflik, dan sikap yang mendukung upaya harmonisasi. Upaya harmonisasi yang dibangun atas dasar mengokohkan sebuah pemikiran tunggal akan mengarah pada sikap otoritarianisme yang antikritik.¹³⁵

C. Membahas Peristiwa G30S di Sekolah

Dalam silabus, terdapat macam-macam indikator yang diharap dapat dicapai selama kegiatan belajar-mengajar. Berbagai indikator tersebut umumnya disimplifikasikan menjadi tiga bagian, yakni: Pengembangan ranah kognitif; pengembangan ranah afektif; dan pengembangan ranah psikomotorik. Dalam konteks pembelajaran sejarah, ada satu aspek khusus yang juga diharapkan dapat tercapai selama proses belajar di kelas, yaitu kemampuan berpikir sejarah (*historical thinking*). Hal ini terkait dengan kemampuan

¹³³ S. Hamid Hasan, *Pendidikan Ilmu Sosial* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1996), hlm. 45.

¹³⁴ S. K. Kochar, *Pembelajaran Sejarah Teaching of History* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 61.

¹³⁵ Tsabit Azinar Ahmad, *Op.Cit.*, hlm. 79.

berpikir kronologis, memperhatikan prinsip sebab-akibat dan prinsip perubahan dan berkelanjutan.¹³⁶

Abdurakhman mengatakan, bahwa dalam mengajar mata pelajaran sejarah, tenaga pendidik tidak cukup hanya memberi pengetahuan yang didasarkan pada konteks hafalan. Artinya tidak berhenti pada pertanyaan seputar siapa, kapan, dan apa. “Yang perlu ditanamkan ialah kenapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana persisnya peristiwa itu terjadi. Nah itu yang perlu diajak si siswa itu berdiskusi.” Ia menambahkan, bahwa dalam konteks materi pelajaran peristiwa G30S, dibutuhkan pendidik/guru yang mampu memahami kejadian tersebut secara utuh. Hal ini bertujuan agar kegiatan belajar-mengajar di kelas menjadi interaktif. “Mereka (siswa/i) bisa bertanya ke guru, dan guru sejarah ini memang harus berani, mampu dan mau mengungkapkan dan menggali informasi di dalam kelas, dan bagaimana mereka (guru) berimprovisasi.” Lebih lanjut, ia memberi contoh tentang pernyataan Letkol Untung yang menyatakan pembentukan Dewan Revolusi di stasiun Radio Republik Indonesia (RRI). “Kenapa Untung melakukan seperti itu? Nah ini peran guru besar sekali dalam menganalisis seperti ini,” jelas Abdurakhman.

Ketika proses pembelajaran berlangsung, semakin besar keaktifan guru di ruang kelas, besar kemungkinan kondisi ruang kelas akan lebih interaktif. Hal ini menuntut guru untuk memiliki pengetahuan yang luas. Selain soal strategi

¹³⁶ Abdurakhman, *Op.Cit.*, hlm 45.

pembelajaran, didaktik juga memerlukan keluasan ilmu. Dua hal tersebut akan berpengaruh pada terciptanya ruang kelas yang interaktif. Adapun ayat yang menjelaskan perintah untuk membaca, menyampaikan, meneliti, dan mengetahui ciri-ciri sesuatu, tertulis pada:

Q.S Al-Alaq: [96]: 1

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (۱)

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.

Kata (اقرأ) *Iqra'* diambil dari kata kerja (قرأ) *qara`a* yang berarti *menghimpun*. Perwujudan perintah yang telah disebutkan tidak mewajibkan adanya objek bacaan yang mengharuskan bentuk teks tertulis, dan tidak pula mesti dilafalkan sehingga terdengar oleh orang lain. Oleh sebab itu, aneka ragam dari arti kata tersebut dapat ditemui dalam kamus-kamus lain, antara lain: membaca, mengetahui ciri sesuatu, mendalami, menelaah, menyampaikan, meneliti, dan sejenisnya yang seluruhnya tertuju pada arti “menghimpun.”¹³⁷ Mantan Pemimpin Tertinggi al-Azhar Mesir, Syaikh Abdul Halim Mahmud menulis dalam bukunya, *al-Quran Fi Syahr al-Qur'an*, bahwa: “Dengan kalimat *iqra' bismi Rabbik*, al-Qur'an tidak sekadar memerintahkan untuk membaca, tapi ‘membaca’ adalah lambang dari segala apa yang dilakukan oleh manusia, baik yang sifatnya aktif maupun pasif. Kalimat

¹³⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 15*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 454.

tersebut dalam pengertian dan semangatnya ingin menyatakan “Bacalah demi Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu.”¹³⁸

Lebih lanjut, kata (ربّ) *rabb* seakar dengan kata (تربية) *tarbiyah/pendidikan*. Kata ini memiliki arti yang berbeda-beda namun pada akhirnya arti-arti itu mengacu kepada pengembangan, peningkatan, ketinggian, kelebihan, serta perbaikan. Kata *rabb* maupun *tarbiyah* berasal dari kata (ربا - يربو) *raba-yarbu* yang dari segi kebahasaan adalah kelebihan.¹³⁹ Setelah memerintahkan membaca dengan penegasan stimulusnya, yaitu dengan nama Allah, kini Allah memerintahkan membaca dengan menyampaikan janji-Nya atas manfaat dari aktivitas membaca. Allah berfirman: *Bacalah berulang-ulang dan Tuhan Pemelihara dan Pendidik-mu Maha Pemurah* sehingga akan melimpahkan aneka karunia.¹⁴⁰ Adapun firman tersebut tertulis pada:

Q.S Al-Alaq: [96]: 3

أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣)

Artinya: Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah.

Ayat tiga di atas mengulangi perintah membaca. Ada beberapa pendapat dari ulama dalam menafsirkan tujuan pengulangan ini. Ada yang menyatakan perintah *Iqra* pada ayat pertama menyerukan perintah untuk belajar, sedangkan perintah *Iqra* pada pada ayat ketiga adalah perintah mengajar orang lain.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 456.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 456-457.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 460.

Menurut Quraish Shihab, perintah membaca yang kedua ini ditujukan supaya beliau (Nabi Muhammad saw) lebih banyak membaca, menelaah, memerhatikan, alam raya, serta *membaca* kitab yang tertulis dan tidak tertulis dalam rangka mempersiapkan diri terjun ke masyarakat. Kata (الاکرم) *al-akram* umumnya diartikan sebagai yang *semulia-mulia* atau *maha/paling pemurah*. Kata ini diambil dari kata (کرم) *karama* yang memiliki arti: *terhormat, bernilai tinggi mulia, setia, memberikan dengan mudah dan tanpa pamrih, dan sifat kebangsawanan*. Kata (الاکرم) *al-akram* yang berbentuk superlatif, memiliki arti Allah dapat menganugraahkan puncak dari segala yang terpuji bagi setiap hamba-Nya, terutama dalam kaitannya dengan perintah membaca.¹⁴¹

Apabila ayat pertama menerangkan tujuan seorang saat membaca (dalam segala pengertian), yakni membaca demi karena Allah. Sedang perintah dalam ayat tiga menjelaskan manfaat yang didapat dari aktivitas membaca, sekalipun bacaan yang di baca diulang terus-menerus. Ayat ketiga ini menjanjikan bahwa saat seseorang membaca dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan menganugraahkan kepadanya ilmu pengetahuan, pemahaman-pemahaman, wawasan-wawasan baru walaupun yang dibaca itu-itu juga. Apa yang dijanjikan ini pun terbukti. Aktivitas “membaca” ayat al-Qur’an memunculkan penafsiran-penafsiran anyar atau pengembangan dari pendapat-pendapat yang telah ada. Demikian juga, kegiatan “membaca” alam raya ini telah

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 460-462.

menimbulkan penemuan-penemuan baru yang membuka rahasia-rahasia alam, walaupun objek bacaannya itu-itu juga.¹⁴² Ringkasnya, kegiatan membaca akan mengantarkan pada “pengetahuan yang tidak diketahui”.

Dari penjelasan ayat-ayat di atas, dijelaskan bahwa usaha untuk menuntut ilmu tidak hanya dilakukan dengan membaca. Banyak hal lain yang dapat ditempuh, seperti: melakukan hal baru, melakukan inovasi, bereksperimen, improvisasi, dan sebagainya. Menelaah, membaca, mendalami, meneliti, dan upaya untuk mengetahui ciri sesuatu idealnya tidak hanya dilakukan oleh peserta didik, melainkan juga berlaku bagi pendidik demi terciptanya proses belajar-mengajar secara dua arah. Dengan terus memperluas ilmu dan pemahaman, manusia dapat melihat kekuasaan Allah dengan berbagai persepsi. Singkatnya, tidak dikotomis: benar-salah; hitam-putih.

Dalam hal membahas G30S di ruang kelas, Satrio senada dengan Abdurakhman. Ia mengutarakan bahwa dalam menerangkan peristiwa G30S di ruang kelas, pengajar maupun pendidik diharap dapat melakukan improvisasi dalam proses pembelajaran. “Pancing dengan pertanyaan yang langsung *nempel* di kepalanya,” tutur Satrio. Ia pun mengatakan, seringkali, saat menjelaskan peristiwa G30S kepada siswa/I, dia memulai dengan pertanyaan “sudah berapa tahun Indonesia merdeka” dan “berapa jumlah presiden di Indonesia sejak proklamasi tahun 1945”.

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 462-463.

“Cuma ada tujuh presiden, Pak. Tujuh orang selama tujuh puluh tahun, berarti satu orang sepuluh tahun, dong?” Ucap Satrio saat meniru ucapan siswa/i-nya. Setelah ada timbal balik dari murid-murid, Satrio kembali memancing nalar kritis siswa/I dengan mengajukan pertanyaan “Berapa lama masa jabatan presiden dalam sistem demokrasi di Indonesia?” Saat menjawab pertanyaan ini, biasanya Satrio mempersilahkan para murid untuk mengakses internet di ponsel masing-masing. “Lima tahun, Pak, seharusnya tujuh puluh dibagi lima kan empat belas ya, kok kita cuma punya tujuh presiden? Oiyaa ini ada yang kelamaan jadi presiden, Pak. Kenapa tuh?” jelas Satrio yang kembali menirukan ucapan para murid. Tidak selesai sampai di situ, Satrio kembali mengajukan pertanyaan ke siswa/I berupa “Siapa yang terlalu lama menjadi presiden” dan “Mengapa hal itu bisa terjadi”. Dengan mengajukan pertanyaan disetiap kali siswa/I berhasil menjawab pertanyaan sebelumnya, tanpa disadari kelas menjadi lebih mengalir. Pelajaran sejarah tidak lagi sekadar ceramah di depan kelas dan mencatat di papan tulis.

“Wah, ada Supersemar. Apa itu, Pak? padahal saya *gak* pernah cerita loh soal Supersemar. Akhirnya dari interaksi itu, anak-anak tanya Supersemar. Terus saya tanya lagi, berarti Soeharto jadi presiden *gak* pakai Pemilu dong? Kenapa *gak* pakai Pemilu? *Gak* sah berarti, Pak? Baru masuk konten-konten (G30S),” papar Satrio. Melalui metode ini, Satrio mencoba menjelaskan peristiwa G30S dengan pendekatan mengapa, bagaimana, dan efek yang ditimbulkan. Setelah menjelaskan materi pokok yang disajikan di dalam buku

paket sejarah, Satrio kembali mengajak siswa/I untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang ia ajukan. Pertanyaan yang dilempar berupa “pengaruh Supersemar” dan “Peralihan masa pemerintahan Soekarno ke pemerintahan Soeharto”. Dalam pengalaman Satrio, pertanyaan-pertanyaan yang ia lontarkan tersebut mampu menarik minat siswa/I dalam mempelajari sejarah G30S di kelas. “Tahun 67 ada penanaman modal asing untuk pertama kali, mulai kita ada investasi asing. Nah sekarang mangkanya kalian kenal macam-macam *brand*. Mangkanya ada sabun merek *Unilever*, Sebelumnya *gak* ada. Kenapa kok bisa beda dari sebelum 65 dan setelah 65 ya, Pak? Nah itu arti pentingnya G30S dibahas, bukan dalam bentuk apa, siapa, dan kapan. Tapi soal bagaimana, dan mengapa,” terang Satrio.

Aspek selanjutnya yang perlu diperhatikan yakni aspek sumber media dan evaluasi. Perlu penekanan dan pemilihan sumber berbasis riset dalam pemilihan sumber belajar. Selanjutnya, aspek media belajar juga harus dipertimbangkan. Hal ini agar siswa/i dapat menghayati persoalan secara lebih nyata. Penggunaan karya sastra tentang suatu peristiwa, seperti novel, cerpen, puisi juga direkomendasikan agar interpretasi siswa menjadi beragam. Penerapan evaluasi hasil belajar sebaiknya tidak hanya fokus pada hasil, akan tetapi juga pada proses dan aktivitas belajar. Penggunaan penilaian portofolio, penilaian proyek, dan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa/I dapat

diimplementasikan supaya pembelajaran sejarah kontroversial mampu menumbuhkan kesadaran sejarah siswa.¹⁴³

Dari penjelasan di atas, singkatnya, seperti yang dijelaskan oleh Abdurakhman dan Satrio, pendidikan seyogianya menjadi media kritik atas realitas sosial sekaligus menawarkan wacana alternatif untuk mencapai kehidupan publik yang demokratis.



¹⁴³ Tsabit Azinar Ahmad, *Op.Cit.*, hlm. 122-123.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejak meletusnya Peristiwa G30S pada 55 tahun lalu, hingga kini peristiwa tersebut masih menyimpan berbagai kontroversi. Utamanya berhubungan dengan soal “aktor gerakan dari peristiwa berdarah” itu. Walaupun masih menjadi kontroversi, dalam praktiknya, peristiwa G30S selalu identik dengan PKI. Penyematan diksi “PKI” di belakang kata “G30S” mempertegas bahwa peristiwa tersebut disponsori oleh partai yang dibubarkan pada tahun 1966 ini. Frasa G30S/PKI bisa dengan mudah kita temukan di berbagai media massa, jurnal, hasil penelitian, hingga buku pelajaran sejarah yang diperuntukkan bagi siswa di tingkat pendidikan menengah.

Hal ini bisa kita tengok pada buku teks *Sejarah Indonesia Kelas XII* (2018). Berbeda dengan buku pelajaran sejarah kebanyakan, buku ini menawarkan berbagai macam wacana alternatif dalam menjelaskan G30S. Buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini memuat tujuh teori G30S, enam diantaranya adalah interpretasi alternatif. Penulisan yang demikian, patut diapresiasi karena sejalan dengan salah satu upaya pemerintah Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut bukan hanya menyangkut ranah intelektual anak bangsa, tetapi lebih jauh dan mendalam ke

arah berpikir historis. Abdurakhman sebagai Koordinator Tim Penulis pun mengatakan bahwa jangan pernah melihat konteks dari satu sisi, namun lihat juga dari latar belakang lain.

Dengan maksud tersebut, Tim Penulis ingin “merubah wajah” materi pelajaran G30S yang semula hanya transfer pengetahuan layaknya nasabah yang menyimpan uang di bank, menjadi sebuah ruang pembahasan yang dialektis. Sekali lagi, hal ini cukup progresif dan layak diapresiasi. Hal menarik yang ditemukan dalam buku ini adalah, walaupun menawarkan berbagai macam pandangan alternatif, Tim Penulis tetap menuliskan G30S/PKI di judul dan konklusi pembahasan. Model seperti ini bisa kita temukan dengan mudah di sebagian besar buku pelajaran sejarah lainnya. Harus dipahami, buku paket sekolah bukanlah buku utuh yang dapat menjelaskan segala hal secara komprehensif. Namun dari hasil analisis terhadap kognisi sosial, sikap Tim Penulis yang memiliki afiliasi terhadap gagasan berdampak pada subjektivitas para penulis dalam menggambarkan peristiwa G30S. Selain menjadi buku wajib yang digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar, buku ini juga menjadi sumber pengetahuan para murid. Dengan demikian, pengetahuan yang disampaikan dapat menentukan pemahaman masyarakat dan membentuk masyarakat yang sesuai dengan pengetahuannya. Singkatnya, narasi umum bahwa PKI—lah yang menjadi aktor tunggal dalam peristiwa G30S akan terus tertanam di sebagian besar masyarakat Indonesia.

Subjektivitas Tim Penulis tidak muncul begitu saja. Hal ini bisa dilihat dari aspek analisis sosial yang telah dilakukan. Dalam menulis materi pokok di buku pelajaran *Sejarah Indonesia Kelas XII* (2018), Tim Penulis mengacu pada silabus yang dirilis oleh Kemendikbud. Silabus ini mencakup Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang wajib ditaati bagi seluruh penulis buku pelajaran sejarah. Dalam KD 3.1 yang juga tercetak pada buku guru *Sejarah Indonesia Kelas XII* (2018), pembahasan peristiwa G30S wajib ditujukan pada PKI. Selanjutnya, masih berlakunya Tap MPRS No. 25 Tahun 1966 turut menimbulkan pengaruh kuat pada sikap subjektivitas Tim Penulis.

Hal yang demikian berdampak pada marginalisasi PKI di dalam sistem Pendidikan di Indonesia, khususnya di tingkat Pendidikan menengah. Sejarah adalah perihal masa lalu, masa kini, dan masa depan. Wacana perihal masa lalu PKI lebih banyak digambarkan secara “seram”, “bengis”, dan “sadis” tanpa sedikit pun menyinggung soal aksi heroiknya. Misal, saat banyak organisasi besar memilih jalan moderat dalam melawan pemeritahan kolonial, PKI sebagai organisasi pergerakan yang pada tahun 1926-1927, secara terang-terangan memilih angkat senjata sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Fakta lain yang dipinggirkan adalah PKI sebagai partai politik pertama yang menggunakan nama ‘Indonesia’ sebagai nama partainya. Penulisan fakta yang tidak berimbang akan melanggengkan stigma negatif PKI kiwari hingga masa depan.

Praktik seperti ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam mempertahankan hegemoninya. Praktik hegemoni dapat bekerja melalui hubungan edukasional. Pengetahuan pun tidak bisa pisahkan dari praktik kekuasaan. Kekuasaan acap kali beroperasi melalui pengetahuan, dan pengetahuan kerap memiliki efek kuasa. Hal tersebut turut menghasilkan nilai, perilaku, norma, dan ideologi. Menurut Louis Althusser, pendidikan merupakan aparatus negara dalam melestarikan nilai-nilai dan kesadaran masyarakat melalui ideologi. Dalam melakukan aktivitas pendidikan, Guru seyogianya memiliki kepekaan terhadap posisi dirinya sebagai pendidik.

Selain sebagai pendidik profesional, juga sebagai pendidik transformatif. Guru sebagai tenaga pendidik seyogianya menjadikan aktivitas pendidikan sebagai media kritik atas realitas sosial sekaligus menawarkan wacana alternatif untuk mencapai kehidupan publik yang demokratis. Cara Pendidik mengajar, pilihan pengetahuan yang diajarkan, dan model relasi yang dibangun, memiliki kontribusi dalam membentuk subyektifitas peserta didik, baik membuat para murid aktif atau pasif. Hal ini tidak hanya berlaku pada pelajaran sejarah kontroversial saja, akan tetapi mencakup kepada proses belajar-mengajar di seluruh disiplin ilmu.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut implikasi yang dapat dikemukakan, baik secara teoritis dan praktis.

1. Implikasi Teoritis

Dengan menggunakan analisis wacana kritis, dapat dilihat bahwa penyampaian materi dalam buku *Sejarah Indonesia Kelas XII* (2018) tidaklah netral, utamanya pada pembahasan G30S. Melalui analisis teks yang telah dilakukan terhadap buku tersebut, ditemukan bahwa penulisan konten materi G30S bias terhadap suatu kepentingan. Hal ini dapat merujuk pada jumlah ‘porsi’ yang diberikan di dalam setiap teori G30S yang ditawarkan. Selain itu, pemilihan fakta yang tidak diimbangi dengan fakta alternatif yang adil dapat ditafsirkan sebagai upaya penulis dalam menciptakan framing yang memarjinalkan PKI.

Melalui analisis terhadap kognisi sosial penulis, dapat disimpulkan bahwa proses framing dilakukan secara sadar. Latar belakang penulis yang tumbuh di lingkungan pendidikan orde baru diduga menjadi salah satu sebab. Pada masa itu, akses terhadap wacana alternatif G30S masih sulit didapat. Jikalau terdapat sumber tandingan, biasanya hal itu bersifat eksklusif dan hanya dikonsumsi oleh segelintir orang. Hasil pengamatan dari analisis sosial yang dilakukan juga memperlihatkan perihal mengapa narasi G30S hampir selalu memarjinalkan PKI. Narasi tersebut layaknya *common sense* yang tidak terlalu penting untuk didiskusikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah, maupun di masyarakat pada umum. Hal ini diduga

ada upaya pemerintah dalam menjaga kepentingannya. Salah satu penulis buku *Sejarah Indonesia Kelas XII* (2018) mengatakan, bahwa wujud kepentingan itu ialah menanamkan nasionalisme kepada peserta didik. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui sistem pendidikan yang berlaku.

Karena keterbatasan akses, penelitian ini selesai pada upaya menjelaskan sebab-sebab tim penulis yang bias dalam menjelaskan materi G30S yang mereka tulis. Hal ini bisa dipahami karena setiap intelektual tidak bisa lepas dari afiliasi gagasan tertentu. Untuk menjelaskan relasi perihal hubungan wacana G30S dan agenda pemerintah, maka diperlukan penelitian lebih lanjut. Lebih-lebih penelitian yang berupaya untuk menjelaskan hubungan antara penanaman nilai-nilai nasionalisme dengan penulisan wacana G30S di sekolah pada umumnya.

2. Implikasi Praktis

Hasil jejak pendapat yang dilakukan oleh SMRC memperlihatkan bahwa isu kebangkitan PKI masih menjadi topik yang seksi. Walaupun terbatas pada jumlah responden, hasil survei ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat usia muda dan masyarakat berpendidikan tinggi -- yang menjadi objek penelitian tersebut -- cenderung mengimani isu kebangkitan PKI. Menurut Satrio Priyo Utomo, pengetahuan dapat menentukan masyarakat, dan masyarakat sesuai dengan pengetahuannya.

Di era digital saat ini, adagium “sejarah ditulis oleh para pemenang” mungkin terdengar usang dan ketinggalan zaman. seperti yang dikatakan oleh Prof Asvi, bahwa sejarah adalah ilmu tentang masa lalu yang tak pernah usang, karena ia memperbarui dirinya dengan penemuan data baru dan cara melihat suatu peristiwa dari sudut pandang yang baru. Saat ini, banyak kelompok yang dapat menciptakan sejarah menurut versi masing-masing. Tentu saja, kepenulisan sejarah harus didukung dengan tanggung jawab dan data yang akurat. Melalui penelitian ini, diharap akan muncul kajian-kajian yang menerapkan analisis wacana kritis terhadap konten-konten sejarah di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa penulisan buku pelajaran masih bias dan memiliki afiliasi terhadap gagasan tertentu. Terutama dalam mewacanakan sejarah kontroversial seperti peristiwa G30S. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menumbuhkan kepekaan dan sifat kritis terhadap wacana-wacana sejarah kontroversial. Bagi tenaga pendidik, dengan hasil penelitian ini diharap dapat memunculkan metode pengajaran yang lebih dialektis dalam melakukan kegiatan belajar-mengajar. Demi terciptanya iklim ruang kelas yang lebih interaktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurakhman, dkk. 2018. *Buku Guru Sejarah Indonesia Kelas XII*. Jakarta: Kemendikbud.
- Abdurakhman, dkk. 2018. *Sejarah Indonesia Kelas XII*. Jakarta: Kemendikbud.
- Adam, Asvi Warman. 2012. *Bung Karno & Kemeja Arrow*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Adam, Asvi Warman. 2009. *Membongkar Manipulasi Sejarah, Kontroversi Pelaku dan Peristiwa*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ahmad, Tsabit Azinar. 2016. *Sejarah Kontroversial Di Indonesia Perspektif Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Althusser, Louis. 2015. *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara*. Diterjemahkan oleh Mohammad Zaki Husein. IndoPROGRESS.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bertens, K. 2001. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Gramedia: Jakarta.
- Chambert-Loir, Henry dan Muarif Ambari, Hasan (ed). 1999. *Panggung Sejarah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dijk, Teun A. van. 2014. *Discourse and knowledge: A Sociocognitive Approach*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Dijk, Teun A. van. 1997. *Discourse as Social Interaction: Discourse Studies A Multidisciplinary Introduction*. London: Sage Publication.
- Eriyanto. 2015. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Foucault, Michel. 2000. *Seks dan Kekuasaan*. Diterjemahkan oleh S. H. Rahayu. Jakarta: Gramedia.

- Hasan, S. Hamid. 1996. *Pendidikan Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan.
- Herlambang, Wijaya. 2019. *Kekerasan Budaya Pasca 1965*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Kasdi, Aminuddin. 2001. *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*. Yogyakarta: Jendela.
- Kochar, S. K. 2008, *Pembelajaran Sejarah Teaching of History*. Jakarta: Gramedia.
- Matono, Nanang. 2014. *Sosiologi Pendidikan Michel Foucaut; Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana. 2005. *Kajian Wacana: Teori, Metode, Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nuryatno, Agus. 2008. *Mahzab Pendidikan Kritis*. Yogyakarta: RESIST BOOK.
- Purwanto, Bambang & Adam, Asvi Warman. 2013. *Menggugat Histografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Roosa, John. 2008. *Dalih Pembunuhan Massal; Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto*. Diterjemahkan oleh Hersri Setiawan Jakarta: Hasta Mitra.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1994. *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2012. *Tafsir Al-Misbah Volume 15*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sobur, Alex .2009. *Analisis Teks Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Sugiono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sophian, Manai. 2008. *Kehormatan Bagi Yang Berhak, Bung Karno Tidak Terlibat G30S/PKI*. Jakarta: Visimedia.
- Suyanto, Bagong. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Tilaar, H.A.R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R. 2003. *Kekuasaan dan pendidikan: Suatu tinjauan dan perspektif studi kultural*. Magelang: Indonesia Tera.
- Titscher, Stefan, Michael Meyer, Ruth Wodak, dan Eva Vetter. 2009. *Metode Analisis Teks & Wacana*. Diterjemahkan oleh Gazali, dkk. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Utomo, Satrio Priyo. 2019. *Politik Dipa Nusantara*. Yogyakarta: Kendi.
- Wodak, Ruth dan Meyer, Michael. 2001. *Methods of Critical Discours Analysis*. London: Sage Publications.
- Zhou, Taomo. 2019. *Revolusi, Diplomasi, Diaspora Indonesia Tiongkok dan Etnik Tionghoa, 1945-1967*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

B. Jurnal Elektronik dan Jurnal Cetak

- Darmawan, Wawan & Mulyana, Agus. 2016. Antara Sejarah dan Pendidikan Sejarah: Analisis terhadap Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA Berdasarkan Kurikulum 2013. Dari http://jurnal.upi.edu/file/WAWAN_D.pdf.
- Hermanto, Rudi. 2016. Peningkatan Berpikir Kritis pada Mata Pelajaran Sejarah Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme. *Jurnal PENDIDIKAN SEJARAH* Volume 1 No.5. Universitas Negeri Jakarta.

Suryakusuma, Julia. 1991. *Konstruksi Sosial Seksualitas: Sebuah Pengantar Teoritis. Jurnal Prisma* No.7. Jakarta: LP3ES.

C. Dokumen dan Hasil Survei

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *KURIKULUM 2013 SMA/MA/SMK/ MATA PELAJARAN SEJARAH INDONESIA*. Disosialisasikan pada 11-13 Mei 2013, di Hotel Jayakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Buku Teks Pelajaran.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku.

Saiful Mujani Research and Consulting. 2020. *Survey Nasional Sikap Publik Atas Isu Kebangkitan PKI* (<https://saifulmujani.com/sikap-publik-atas-isu-kebangkitan-pki/>)

Tap MPRS No. 25 Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi terlarang Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

D. Skripsi dan Tesis

Luke. Daniel. 2014. *Wacana Rekonsiliasi Anatara Korban dan Pelaku Pembantaian Pasca Gerakan 30 September 1965 (Analisis Wacana Kritis Majalah Tempo Edisi Khusus Pengakuan Algojo 1965 1-7 Oktober 2012)*. Skripsi. Universitas Media Nusantara: Tangerang.

- Pratiwi, Kartika. 2013. *Respon Guru Sejarah Sekolah Menengah Atas Yogyakarta Terhadap Wacana Alternatif Tragedi Kemanusiaan 1965*. Tesis. Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta.
- Utami, Indah Wahyu Puji. 2012. *Wacana Ideologi Negara Dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah Sekolah Menengah Atas (SMA)*. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

E. Internet

- <https://historia.id/politik/articles/lima-versi-pelaku-peristiwa-g30s-DWV0N>
(Diakses pada 16 Maret 2020).
- <https://indoprogress.com/2008/04/g-30-s-dan-pembunuhan-massal-1965-66/>
(Diakses 03 Maret 2020).
- <https://nasional.tempo.co/read/95550/blunder-kejaksaan-agung-dan-departemen-pendidikan-nasional> (Diakses pada 04 Maret 2020).
- https://pdu.fk.unsri.ac.id/?act=info_detil&id=263 (Diakses pada 03 Maret 2020).
- <http://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/pendekatan-historiografi-dalam-memahami-buku-teks-pelajaran-sejarah/> (Diakses pada 04 Maret 2020).

F. Wawancara

- Abdurakhman, koordinator tim penulis buku pelajaran *Sejarah Indonesia Kelas XII* (2018), via aplikasi *Zoom*, 13 September 2020.
- Satriono Priyo Utomo, peneliti sejarah, Jakarta, 22 Agustus 2020.

LAMPIRAN

Struktur KI dan KD Mata Pelajaran Sejarah Indonesia pada buku *Sejarah Indonesia Kelas XII (2018)*

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
<p>3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah</p>	<p>3.1 Menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G 30 S/PKI.</p> <p>3.2 Mengevaluasi peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945-1965.</p> <p>3.3 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal.</p> <p>3.4 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.</p> <p>3.5 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru.</p> <p>3.6 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi.</p>

	<p>3.7 Mengevaluasi peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia.</p> <p>3.8 Mengevaluasi peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, antara lain KAA, Misi Garuda, Deklarasi Djuanda, Gerakan NonBlok, ASEAN, OKI, dan <i>Jakarta Informal Meeting</i>.</p> <p>3.9 Mengevaluasi kehidupan bangsa Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era kemerdekaan (sejak Proklamasi sampai dengan Reformasi).</p>
<p>4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan</p>	<p>4.1 Merekonstruksi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G 30 S/PKI dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah.</p> <p>4.2 Memuliskan peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah yang berjuang mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945-1965.</p> <p>4.3 Merekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal Kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis.</p>

	<p>4.4 Melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis.</p> <p>4.5 Melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis.</p> <p>4.6 Melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis.</p> <p>4.7 Menulis sejarah tentang peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia.</p> <p>4.8 Menyajikan hasil telaah tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, antara lain KAA, Misi Garuda, Deklarasi Djuanda, Gerakan Non-Blok, ASEAN, OKI, dan <i>Jakarta Informal Meeting</i> serta menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis.</p> <p>4.9 Membuat studi evaluasi tentang kehidupan bangsa Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Kemerdekaan (sejak Proklamasi sampai dengan Reformasi) dalam bentuk tulisan dan/atau media lain.</p>
--	--

**TRANSKRIP WAWANCARA BAPAK DR. ABDURAKHMAN
DENGAN PENULIS (13 SEPTEMBER 2020)**

Dr. Abdurakhman : **A**

Penulis (Riyan) : **R**

R : Dalam buku teks sejarah yang ditulis oleh Bapak dan Tim Penulis, materi Gerakan 30 September dijelaskan dalam tujuh teori. Enam teori diantaranya adalah wacana alternatif selain G30S/PKI. Apa urgensi dari penulisan wacana alternatif dalam buku teks tersebut?

A : Konteks penulisan buku ini sebenarnya ketika awal ditulis itu dilombakan. Ada beberapa tim dan ada beberapa universitas. Ada yang dari UNJ dan lain-lain. Kami menyusun rancangan awal tentang buku ini. Mulai melibatkan bukan hanya dari dosen, tapi kamu juga melibatkan dari guru SMA. Sehingga rancangan ini kemudian kami susun dengan melibatkan 1 orang guru SMA yang pada saat itu, dia juga kepala sekolah dan mengajar sejarah di SMA. Sehingga kami ingin mengetahui “Apa sih sebetulnya masalah yang ada di SMA terkait dengan pembelajaran sejarah?” dan di situ kami merancang. Isitlahnya membukui gitu kan. Maka saya minta pak Arif saat itu, kebetulan dia alumni kami dan dia jadi guru. Dari *ngajar* SMP sampai *ngajar* SMA sudah cukup lama. Dan kami sering kali berdiskusi terkait ini, dan maka dengan melibatkan seperti ini kami ingin mengetahui apa yang dibutuhkan dari buku sejarah di SMA itu.

Nah dari situ kami menginterpretasi terkait dengan apa yang namanya silabus. Silabus sejarah Indonesia, wajib. Ingat ada dua buku sejarah ya, ada sejarah wajib dan sejarah peminatan. Nah ini sejarah wajib. Sejarah wajib ini yang mengeluarkan adalah kementerian. Jadi mengacu kepada silabus yang

diberikan oleh mereka kemudian kami menyusun kerangkanya. Jadi hampir semua kerangkanya itu sama. Silabusnya. Kemudian dengan menginterpretasikan silabus tadi dalam rangka isi buku. Terutama yang berkaitan dengan isi Bab 1 itu. Ini apa sih indikator dasar yang diminta? KI dasar yang diminta itu adalah mengevaluasi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan. Ini kemudian mengevaluasi peran tokohnya, dan daerah yang berjuang mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. maka kemudian merekonstruksi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa. Dan tugas siswanya adalah menuliskan sejarah tentang tokoh nasional atau tokoh daerah yang memperjuangkan itu dengan peristiwa sejarah.

Nah ini konteksnya, jadi dipahami dulu konteks ini, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh siswa nanti adalah bagaimana dia mengamati, bagaimana dia bertanya, dan bagaimana dia mengeksplorasi, bagaimana dia mengasosiasikan dan bagaimana dia mengkomunikasikan. Dan dari situ lah istilahnya kami menyusun buku ini dan memasukkan apa yang ada sebut dengan Teori gitu ya. Jadi terkait dengan teori-teori alternatif ini, kami pelajari dalam perguruan tinggi, dan kami coba mengenalkan ini kepada siswa SMA, dan sebenarnya dibutuhkan guru yang mampu memahami teritori ini secara utuh. Maka kami hanya memberikan pengenalan tentang teori ini. Gak bisa dikenalkan secara detail, gitu ya. Karena mereka belum bisa menangkap secara utuh, nanti akan lebih mendalam karena ini bukan satu kajian akademis. Buku SMA itu adalah sejarah pendidikan. Maka kita mengenalkan, siswa mengetahui teritori dan pandangan yang ada, namun perlu dipahami bahwa terkait dengan data yang mendukung teori.

Bahwa dalam sejarah, fakta atau sumber sejarah adalah faktor utama yang menentukan kebenaran sebuah peristiwa. Jadi bukan hanya sebatas interpretasi semata, tapi tanpa fakta. Jadi semua itu mengacu pada fakta. Karena dalam sejarah itu perlu diperhatikan adalah “satu fakta tidak cukup”. Dalam

sejarah jadi perlu didukung oleh fakta-fakta yang lain. Maka kami mengawali di kalimat buku itu kan “Bahwa ini adalah satu peristiwa yang sampai sekarang menjadi satu perbedaan pandangan.” Walaupun fakta-fakta dilapangan juga, satu pandangan yang sama, dipakai oleh beberapa teori ini dengan interpretasi yang berbeda. Ambil contoh, pernyataan Untung di pagi hari setelah peristiwa itu, yang dikeluarkan di *Harian Rakyat*. Anda bisa bayangkan, koran mana yang tau ada peristiwa itu di pagi hari dan langsung ada berita? Hanya *Harian Rakyat*. *Harian Rakyat* itu korannya PKI. Apa yang dibunyikan Untung di situ, dia ceritakan itu tuan jenderal, bla..bla..bla..bla, satu kalimat terakhirnya disebutkan terkait dengan kabinet di demisionerkan. Siapa yang boleh mendemisionerkan kabinet secara teori, hanya presiden. Kalo ada orang lain yang mendemisionerkan kabinet, berarti dia melakukan suatu *coup*. Pertanyaan demisioner itu hanya ada di *Harian Rakyat*. Dan *Harian Rakyat* itu adalah surat kabar PKI. Itu satu fakta ya, contoh.

Sehingga kalau di dalam pengajaran buku di SMA teori-teori yang berjumlah tujuh tadi mulai dari persoalan internal angkatan darat, masing-masing dengan kondisi yang punya pandangan yang berbeda. Pada konteks ini kan Ben Anderson, siapa sih Ben Anderson ini, siapa sih Wertheim ini, Siapa sih Coen Hotsapel ini? Kalau kita orang sejarah tau. Kalau mereka semua orang kiri gitu yah, mereka tidak gitu suka dengan angkatan darat, tapi kan kita *gak* bisa ngomong gitu ke anak SMA. Karena ini sejarah pendidikan, tapi kita berusaha memberikan contoh bahwa pandangan mereka bahwa TNI AD hidup mewah kita bisa lihat satu-satu. Sosok Nasution, sosok anggota TNI, rumahnya ya sederhana. Tidak seperti maaf lho ya, konteks tentara-tentara jaman sekarang rumahnya mewah-mewah. Nah itu rumahnya hanya rumah dinas itu, tidak ada yang lain, yang dijalan Teuku Umar itu.

Ini adalah CIA, memang ada kepentingan. ini Dale Scoot dan Geoffrey yang menyebutkan ini, memang ada politik *containment policy*, tapi kita perlu membuktikan karena baru belakangan teori ini, data ini dibuka oleh Amerika

Serikat. Setelah sekian tahun dibuka. Terus juga gerakan 30 september merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Ini terkait dengan kebijakan ganyang Malaysianya Soekarno. Ada juga yang menyatakan bahwa Soekarno adalah dalang dari G30 September, ini juga ada yang membantahnya. Memang bisa juga dikatakan di teori ke-lima itu tidak ada pemeran tunggal atau skenario besar dalam peristiwa G30S ini. Masing-masing punya kepentingan. Tapi, semua pecah dilapangan konteksnya. Ya memang kalau kita lihat dibagian bawah, nanti kita kaitkan itu yah, kenapa saya harus menceritakan pertanyaan berikutnya, kan ada tuh, kenapa ini panjang? Tanpa saya harus menceritakan semua ini, ini membahas semua yang di atas. Untuk melihat kalau dianalisis bagaimana mereka bisa memahami peristiwa yang terjadi di Indonesia itu, kemudian mereka melihat konteks isi yang seperti ini.

Karena letaknya ada dibagian bawah dianggapnya Anda bahwa ini bagian dari teori yang terakhir, padahal itu ingin menjelaskan semua bagian dari atas. Semua teori-teori yang ada di sini dijelaskan sedikit-sedikit. Teori yang ke 7 ini, yang Anda sebutkan sekian halaman, padahal teori yang dikemukakan oleh antara lain Nugroho Notosusanto dan Ismail Shaleh. Selesai, di situ teori itu selesai. Namun “terlepas dari teori mana yang benar”. itu udah kalimat yang baru. Terkait dengan halaman selanjutnya halaman 18 itu sudah penjelasan secara menyeluruh terhadap teori-teori yang di atas. Ini memang kita melihat tujuh teori itu dan berikan satu pandangan kepada siswa. Maka kita tidak tanya tentang teori ke mereka terkait peristiwa yang seperti ini. Itu satu sisi yang perlu dipahami kenapa kita memasukkan tujuh teori ini, minimal adalah si siswa mengetahui, ketika mereka melihat di luar ada pandangan seperti itu, mereka bisa bertanya ke guru, dan guru memang guru sejarah ini memang harus berani, mampu dan mau mengungkapkan dan menggali informasi di dalam kelas, dan bagaimana mereka berimprovisasi maka ada buku guru. Buku guru itu membantu guru harus bagaimana, ada penjelasannya.

R : Sebagai konfirmasi, yang Bapak sebutkan sebagai kepala sekolah dan tergabung dalam Tim Penulis itu apakah Bapak Arif Pradono?

A : Iya, betul.

R : Jadi singkatnya, inti dari mengapa diberikannya wacana alternatif itu untuk memberikan berbagai persepsi G30S kepada siswa atau murid?

A : Memberikan berbagai pengetahuan lah kepada siswa. Kan jangan melihat konteks dari satu sisi, tapi lihat dari latar belakang lain, lalu kita jelaskan peristiwa runutan terjadi, lalu mereka bisa menganalisis sendiri sebenarnya, mana yang menurut pandangan mereka. Ini memang kurikulum 2013 kan menuntut mereka untuk membaca, menganalisis, bertanya, bahkan menyusun satu tulisan atau simpulan. Maka pertanyaan terakhir adalah, bagaimana mereka menulis satu kesimpulan. Konteksnya itu. Belajar sejarahnya di situ maksudnya.

R : Untuk penggarapan buku sendiri, ada empat penulis. Apakah ada silang pendapat antara para penulis dalam memandang peristiwa G30S?

A : Jadi kami sebelum menulis itu, membuat kerangka dulu, ini rangka disusun bersama. Bahas kerangka itu yang lama. Sampai semua matang dan sepakat baru kita tulis. Ketika sudah selesai, baru kita bagi. Setelahnya saling memperkaya naskah sehingga naskah itu selesai tepat waktu. Karena kami menulis punya target. Jadi kami istilahnya adalah satu, konteksnya. Jadi setiap kali rapat itu, kami jelaskan perkembangan tulisannya seperti apa, dan kami juga dalam proses penulisannya dikumpulkan. Sekian bulan dikumpulkan, dilaporkan perkembangannya. Di situ ada juga penilai buku kami. Maksudnya menerima masukkan terkait dengan isi buku kami. Karena saya juga pernah menulis buku dengan Ganesha tahun berapa itu sudah lama, tim juga, kelas 1, kelas 2 IPA IPS Bahasa, kelas 3 IPA IPS Bahasa. Ada buku yang *gak* lolos, *gak*

lolos dalam arti isinya harus diganti, terkait dengan siapa yang mengusulkan dasar-dasar negara dalam sidang BPUPK. Saya menyebutkan bukan hanya 3 itu, tapi juga menyebutkan tokoh-tokoh lain dalam BPUPK. Itu dicoret, suruh ganti. Dibalikkin ke awal. Kami bisa melihat konteks kelebihan dan kekurangan kami terkait dengan rancangan yang kami susun.

Rancangan itu bisa berubah di tengah jalan, waktu itu juga beberapa diubah. Termasuk bagian ini (G30S) berubah terkait dengan strukturnya, karena ketika ditampilkan seperti awalnya kayak *gak* menarik. Maka kita membagai masalah pergolakan ini ada yang ideologi, kepentingan dan sebagainya. Untuk materi G30S tidak ada pertentangan. Karena memang kita memiliki satu padangan yang sama terkait dengan peristiwa G30S ini, maka dalam penjelasan yang di bawah itu, setelah teori itu, itu adalah pandangan kami terkait peristiwa G30S.

R : Untuk pengerjaan buku berapa lama, Pak?

A : Kalau total 1 tahun. Sesuai dengan proyek, lombanya itu kan dari tahun sebelumnya itu ya, November-Oktober. Mulai penulisan itu Maret selesai November, seinget saya itu. Karena itu dengan mata anggaran, diitungnya dengan mata anggaran. Walaupun setelah itu ada revisi, revisi lagi revisi lagi, tapi pelaporannya di tahun anggaran yang sama. Tahun 2014.

R : Dalam penggarapan dalam buku ini, jabatan Bapak sebagai?

A : Jadi awalnya, kami membentuk tim dengan empat orang. Prof. Santo, saya, Ibu Linda, dan Bapak Arif. Karena kebetulan saya ketua departemen sejarah, jadi diminta untuk mengkoordinatori. Sebenarnya konteks Pj-nya Prof Santo, kemudian koordinator yang menjalankan penulisan dilapangan kami bertiga. Prof Santo yang bertanggung jawab, kami yang mengkoordinatori penulisan di lapangan. Sehingga rapat-rapat di tim berempat sering kali konteks

seperti ini butuh waktu. Karena agak sulit kan, jam kerja bagi guru SMA kan susah. Jadi kami sering rapat itu sore, selesai jam kerja baru kita rapat.

R : Secara garis besar, tugas dari koordinator tim itu bagaimana Pak?

A : Kalau kita biasanya mengumpulkan teman-teman para penulis, mengontrol perkembangan tulisan mereka, kemudian memadukan tulisan kita. Nah yang sulit kan di sini, memadukan tulisan ini biar selaras, dan sejalan pemikirannya, di situ, kita sama-sama biasanya, duduk sama-sama. Hadir juga Prof. Santo untuk menyelaraskan naskah ini dengan masukkan-masukkan “kurang ini, kurang itu” lalu kita selesaikan lagi, perbaiki lagi. Jadi progres itu terus kita tinjau, waktu itu sudah 2 pekan atau 3 pekan sekali kami rapat. Paling lama satu bulan sekali. Sebulan sekali kelaaman sih, tapi seringnya seperti itu. Dan beberapa bulan sekali Kemendikbud *manggil*, dan kami dikarantina di situ, untuk menyelesaikan masukkan itu. Selain masukkan dari kita sendiri, setelah kita baca, ada *reviewer* buku, dari situ kita perbaiki lagi.

R : Buku ini menggunakan Kurikulum 2013, apakah ada pengaruh Kurikulum 2013 dalam penampilan konten/materi yang harus menawarkan wacana alternatif dalam peristiwa G30S?

A : Sebenarnya konteks yang pertama ini kan ditawarkan dari mereka ini kan silabus, di dalam silabus ini kan ada KI KD, jadi ada Kompetensi dasar di sini, trus ada materi pokok. Kompetensi dasarnya itu kan yang saya sebutkan tadi yang 3.1, 3.2, 4.1, 4.2. yang terkait dengan bagaimana mereka mengevaluasi, bagaimana mereka melakukan rekonstruksi, bagaimana mereka menulis tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi bangsa. Kurikulum 2013 ini mengubah struktur buku, kalau dulu kan tematis, ini diawali dengan peristiwa perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi bangsa. Di sini bukan hanya konteks terkait dengan

keutuhan NKRI dan pergolakan daerah dari ancaman disintegrasi bangsa dari pergolakan daerah, tapi juga muncul dari pemberontakan yang berskala nasional. kalau dulu kan hanya mengangkat terkait dengan Andi Aziz, RMS, PRRI/Permesta, DI/TII, dipisahkan dengan yang lainnya. Kalau misal peristiwa Orde Baru pasti cerita tentang PKI, gitu kan.

Nah ini kita melihat dengan kurikulum seperti ini, ketika digambarkan di sini merekonstruksi upaya bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan yang dicontohkan di situ ada PKI madiun, Di/TII, Apra, Andi Aziz, Rms, PRI/Parmesta, dan yang terakhir memang G30S. dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah, dalam artian si siswa itu setelah dijelaskan itu mampu menceritakan kembali, tapi konteks kami adalah mengevaluasi peran tokoh dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa, atau mengevaluasi upaya bangsa indonesia dalam menghadapi ancaman disintegarsi bangsa.

Nah, agar siswa itu mampu memahami konteks seperti ini, maka kami menyajikannya dalam bentuk yang semenarik mungkin. Diawali dengan gambar dulu, yang kami tawarkan di situ kan surat kabar itu, yang di depan. Bagaimana peristiwa sejarah, ada satu gambar yang memperlihatkan peristiwa sejarah. Ada konflik agama, OPM, dan sebagainya, itukan guntingan koran tentang konflik yang terjadi di Indonesia. Sehingga ditanya dulu, ini dari kurikulum 2013 bentuknya, ditanya dulu. Sebelum menjelaskan mereka dituntut untuk bertanya dulu. Baru kemudian kita bicara terkait tema pokoknya. Baru masuk kita terkait dengan gagasan kita ini mengangkat pergolakan dan konflik di Indonesia selama tahun 48-65 ini. Kami membagi dalam tiga bentuk pergolakan. Ada konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, dan berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah dari tiga ini kami kemudian membagi pergolakan-pergolakan ini dalam tiga kelompok ini. Salah satunya masuk di

sini di bagian pertama kan, konflik ideologi. Konflik ideologi ini salah satunya adalah G30S.

R : Jadi singkatnya, Kurikulum 2013 itu memang mengharuskan menawarkan wacana alternatif itu ya, Pak?

A : Tidak menawarkan, cuma mereka menyebutkan itu peristiwanya. Kami memberikan satu pemahaman bahwa dalam memahami sejarah itu bukan konteks semata itu. Selama ini kan cuma satu fakta, ya. Walaupun konteks fakta itu didukung oleh data yang kuat, tapi ada pandangan lain juga *toh*. Nanti mereka (siswa.i) kan menganalisis. Gitu kan konteksnya dari kisah, bukan menganalisis teori, karena mereka anak SMA, belum bisa menganalisis teori. Tapi menganalisis kisah sejarah yang kita ceritakan di bawahnya.

R : Jadi wacana alternatif yang timbul itu dari tim penulis sendiri?

A : Iya, kita mengusulkan model seperti itu. Dan itu diterima oleh tim *reviewer*. Jadi kami melanjutkan.

R : Dari sekian banyak teori G30S yang Bapak tuliskan bersama Tim Penulis, menurut Bapak, teori mana yang mendekati kebenaran?

A : Ya, kalau kami melihat G30S itu PKI. Baik orang menyebutkan konteks itu Orde Baru, tapi beberapa penelitian penulis Indonesia umumnya menulis seperti itu. Bahwa konteks bukunya Mas Sulistyio “Palu Arit di Ladang Tebu” bukunya Pak Aminuddin Kasdi, dan juga penelitian lain yang terkait dengan peristiwa sampingan. Peristiwa menjelang dan sesudah G30S itu menggambarkan tentang keterlibatan PKI dalam berbagai kasus menjelang itu atau setelah kejadian itu. Sehingga kami cenderung mengambil satu pandangan terkait dengan G30S itu adalah PKI. Ditambah lagi dengan peristiwa yang terjadi pada 1 Oktober, pagi. Disurat kabar *Harian Rakyat* di situ, kenapa surat

kabar lain belum tahu tapi surat kabarnya PKI udah tahu lebih dulu? Nah ini kan jadi satu penanda, menjadi satu fakta bahwa Untung itu dibalik PKI. Karena *Harian Rakyat* tadi mendukung Untung.

Dalam Partai Komunis itu, kepangkatan itu *gak* laku, anak buahnya Untung itu lebih tinggi. Jadi komunis itu adalah komando. Maka cukup menarik sebetulnya pernyataan dari beberapa buku, ketika Soekarno diingatkan, ia bilang, saya lebih banyak baca buku tentang Marxis ketimbang Aidit, tapi Bung Karno lupa bahwa Aidit itu adalah Sekjennya Partai Komunis. Maka dia Ketua Komite Centralnya partai komunis akan lebih didengar oleh Partai Komunis ketimbang Soekarno sendiri sebagai presiden.

Saya ya, kami melihat konteksnya seperti itu. Anda bisa baca di halaman selanjutnya terkait dengan buku yang kami tawarkan mulai dari halaman 18 sampai halaman 22, itu adalah proses untuk memberikan suatu penggambaran. Nanti siswa menyimpulkan sendiri dari proses itu. Jadi fakta-fakta dilapangan seperti ini. Ada umpamanya contoh, pada berita RRI pagi hari ini Lektrol Untung menyatakan pembentukan Dewan Revolusi, sebuah pengumuman yang membingungkan masyarakat. Karena? Ada presiden. kenapa Untung melakukan seperti itu? Nah ini peran guru besar sekali dalam menganalisis seperti ini. Maka ada buku guru.

R : Mungkin ini sudah Bapak jelaskan tadi di depan, tapi bisa dijelaskan lebih spesifik lagi bagian mengenai teori alternatif itu. Teori alternatif sebanyak enam buah dihabiskan dalam dua halaman. Sedangkan teori ketujuh, G30S PKI, dipaparkan dalam enam halaman?

A : Bukan enam halaman itu sebenarnya, ya. Saya memaparkan teorinya adalah semuanya kalau Anda perhatikan, disemuanya itu jumlah halamannya itu sama. Baris-barisnya juga tidak terlalu jauh. Teori pertama umumnya antara tujuh sampai sembilan baris. Teori yang ke tujuh ini hanya sembilan baris.

Maka kalimat berikutnya itu kan langsung mengikuti “Namun terlepas dari teori mana yang benar mengenai G30S, yang pasti sejak Demokrasi dipimpin secara resmi dimulai pada tahun 1959, Indonesia memang diwarnai dengan figur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia. Lah, ini kita ingin menjelaskan semua sisi yang di atas yang lainnya. Itu sisi seperti ini untuk siswa menganalisis sendiri, silahkan.

Maka yang berikutnya kan, kenapa pertanyaannya mengarah ke situ, analisisnya, teori. Orang teorinya aja yang dikasih aja mereka sedikit. Tapi di balik peristiwa ini kan, ada prosesnya, maka, apa rencana PKI dibalik usul tersebut, ini kan ada sebuah informasi, disebelah ini, sebelah informasi, gambar yang disuruh analisis oleh siswa. Padahal ini fakta, analisis ini fakta, bukan teori. Kalau fakta ini kan ada sumbernya. Sehingga bunyinya “Apa rencana PKI di balik usul tersebut, dan apa akibat yang ditimbulkan dari usul tersebut?” Nah ini kan jadi kajian tersendiri nih, ada skripsinya ada tesisnya itu sendiri. Nah gitu, siswa diajak untuk menganalisis itu. Informasinya baru kita jelaskan di bawah terkait dengan angkatan ke 5 sampai istilahnya terjadi peristiwa G30S.

R : Jarang sekali menemukan buku yang seperti ini, menawarkan wacana alternatif dalam menulis G30S. Namun mengapa ada imbuhan PKI di belakangnya? Apa itu penegasan sikap dari penulis?

A : Jadi dalam konteks sejarah pendidikan. Konteks sejarah pendidikan itu, konteks penegasan ada satu kepentingan dari pemerintah, bukan rejim. Karena peristiwa PKI ini bukan satu peristiwa pendek. Peristiwa ini peristiwa yang panjang, bagaimana peristiwa 26 terjadi, faktor apa yang melatarbelakangi peristiwa 26, apa dampaknya. Bagaimana peristiwa 48 terjadi, kenapa itu bisa terjadi, apa dampaknya bagi Indonesia. Muncul lagi konteks di sisi ini, maka saya jelaskan di halaman 18-22 tadi ya, konteksnya. Jadi kenapa sampai memunculkan kata PKI itu Anda bisa baca di situ ya, kenapa ada kata PKI di

situ. Seperti pertanyaan Anda, teori mana yang bapak yakini kebenarannya gitu, karena dalam sejarah itu, data yang sama interpretasi bisa berbeda. Dari teori yang Anda baca tadi, kita punya data yang sama, mereka punya interpretasi yang berbeda. Bagi sejarawan tidak masalah. Tapi dalam konteks pendidikan tidak bisa diajarkan begitu. Pada pendidikan itu, harus dikasih tahu satu. Walaupun di lapangan mereka punya pandangan yang berbeda. Maka di sejarah akademik, ada suatu kebebasan dalam menghasilkan teori ini, tapi dalam pendidikan sejarah, sudah berbeda. Walaupun kita tidak menggunakan perspektif tunggal, tapi dalam menggunakan judul ya seperti itu, dan dalam pertanyaan atau soal tugas, G30S kita masukkan “PKI”.

Konteks seperti itu, karena kita punya suatu kewaspadaan, pokok kalau konteks pendidikan saya punya prinsip, ini di Indonesia, harus dengan prinsip seperti ini. Dan karena pemerintah sendiri belum menghapus, mengangkat atau membatalkan dari Tab MPRS No.25 itu sendiri. Konteks itu kan secara fakta, berarti ada suatu keterlibatan. Dan tidak bisa dipungkiri ya, guru besar kami, Prof. Nugroho dan dosen-dosen lain itu terlibat dalam proses penganalisisan data-data sehingga menyusun peristiwa G30S itu dalam buku SNI jilid ke 6. Itu memang sebagian besar adalah dosen-dosen kami. Sumbernya adalah dari surat kabar seperti itu, juga ditopang oleh sidang Mahmilub.

R : Pandangan Bapak sebagai penulis yang menawarkan beragam wacana alternatif G30S di buku-buku siswa, terkait buku pelajaran yang masih menawarkan wacana tunggal itu seperti apa, Pak?

A : Ya, tidak ada masalah sih sebenarnya. Itu kan hanya gaya mereka menyampaikan. Konteksnya biasanya, yang Anda baca itu, karena buku wajibnya ini. Dari pemerintah tuh ini. Yang lain boleh, penerbit mengeluarkan buku gitu ya, sebagai penunjang buku ini. Bagi saya tidak ada masalah, saya katakan tadi boleh-boleh saja mereka mengangkat satu sisi ini karena memang

di dalam buku silabusnya, tidak ditentukan harus mengangkat teori alternatif. Mereka hanya diminta tentang G30S/PKI. Jadi di judul silabusnya itu G30S/PKI. Jadi kami pun bisa mangacu ke situ untuk simpulan terakhir tadi. Tapi wacana alternatifnya bisa jadi rujukan.

R : Berikut pertanyaan terkait soal yang diberikan. “Buat analisa apa rencana PKI dibalik unsur tersebut, dan apa akibat yang ditimbulkan dengan adanya usulan PKI tentang dipersenjatainya petani dan buruh bagi masyarakat Indonesia pada masa itu?” Mengapa hanya pertanyaan ini dari sekian banyak teori alternatif yang Bapak dan tim akademisi tawarkan, mengapa hanya rencana PKI, mengapa tidak rencana CIA, atau rencana Angkatan Darat dan sebagainya?

A : Nah, jadi yang kami angkat itu adalah fakta. Jadi itu pertanyaan fakta, bukan pertanyaan teori. Jadi kita gambarkan fakta peristiwa yang terjadi menjelang G30S, tapi kami tidak menanya sesuatu yang masih menjadi perdebatan. Dalam sejarah itu yang benar juga bisa jadi perdebatan, jadi yang ditanya itu adalah fakta yang sama pendapatnya. Nanti kalo anak SMA ditanya terkait dengan analisis teori, anak S1 saja belum tentu bisa menjawab dengan baik. Jadi ketinggian. Ini juga terkait dengan silabus yang ada, silabus yang ada itu mengarahkan kita terkait dengan menulis sejarah tentang tokoh dan cenderung lebih ke tokohnya. Nah dibalik tokoh itu maka, ada apa dibalik peristiwa usulan dari angkatan ke 5 tadi. Kita bisa mengangkat siapa tokohnya, bagaimana pemikirannya, lalu apa dampaknya. Kalau terkait dengan teori, konteks teori ini, terlalu berat. Maka di buku guru, itu kita diberikan penjelasan kepada guru terkait dengan beberapa tugas lain sebagai alternatif. Guru ya. Itu sebagai satu contoh saja ditugasnya. Bahkan kami mengajukan beberapa metode pembelajaran. Apakah mereka diajarkan terkait dengan *play role*, apakah mereka diajarkan terkait dengan paparan, presentasi kah. Macem-

macem. Bentuknya berbagai macam itu, bagaimana mereka mengajarkan materi ini diberikan contoh dalam buku guru. Silahkan, kalau pakai ini begini, pakai ini begini.

Mana yang paling mudah bagi guru, itu yang akan dipakai. Karena tidak akan sama, antara guru yang di Sumatera, guru yang di Jawa, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi atau Papua dalam mengajarkan teks seperti ini. Bisa jadi di Jawa lebih mudah gitu, lebih gampang karena siswanya bisa lihat-lihat langsung kan. mungkin di Papua membayangkannya saja susah gitu kan ya. Maka bagaimana guru di situ bisa menjelaskan lebih baik. Itu di buku guru ada beberapa contoh. Itu hanya sebagai satu contoh pertanyaan saja. Memang kenapa tidak mengarah kepada teori, bagaimana menganalisis teori? Berat lah untuk anak SMA. baru menganalisis sebuah peristiwa saja, itu menjadi satu hal yang cukup tinggi sebenarnya. Untuk S1 saja, itukan baru sampai C4, kalau analisis C6 itu masih ringan konteksnya. Nanti baru S2 itu baru C6, konteksnya seperti itu. Itu juga harus diperhatikan.

R : Apakah Bapak memiliki pengalaman mengajar di sekolah SMA sebelum menjadi dosen?

A : Saya pernah *ngajar* Bimbel, pernah mengajar di SMA. SMA saya pernah mengajar itu tahun 98 sampai tahun 2000an. Cuma 2 tahun, karena waktunya *gak* cocok. Karena tantang sendiri *ngajar* di SMA itu. Enakan *ngajar* di perguruan tinggi. Bagi saya *ngajar* di SMA itu sulit.

R : Pengalaman mengajar di SMA itu bagaimana, Pak? Apakah sama dengan perlakuan kepada mahasiswa?

A : Kalau di SMA itukan namanya mendidik ya, jadi memberikan satu pemahaman konteks pendidikan. Kalo di perguruan tinggi kan mereka diajak untuk menganalisis konteksnya, akademis konteksnya. Dan boleh diajarkan

berbeda pendapat. Kalo di SMA itukan kita menanamkan, ingat di SMA itu pendidikan. menanamkan satu pemahaman. Jadi ini, sudah ideologis kalo bahasa kasarnya itu. Kita harus punya pandangan seperti pemerintah konteksnya. Karena salahsatu tujuannya adalah menanamkan nasionalisme, dan saya pikir bahwa konteks sekarang ini adalah bukan kesalahan guru ya, kurikulum kita ini kurang terimplementasi dengan baik. Nonton film sejarah di sekolah, dan pelajaran sejarah menjadi pelajaran yang membosankan. Karena sejarah itu kuncinya bagaimana mengajarkan. Saya liat dari anak saya “kamu belajar sejarah gimana?” kata Pak guru, Pak guru nya suruh nulis di depan papan tulis. Nah kan dibuka sudah ada, kenapa ditulis di papan tulis, dan suruh catet lagi. Padahal kan bukan seperti itu konteks mengajarnya. Untuk mengajar sejarah itu jangan ditanya tahunnya, kalau sejarah hanya membahas tahun, itu hafalan. Orang bisa lihat kapan saja. Dan yang perlu ditanamkan itu kenapa peristiwa itu terjadi, bagaimana persisnya peristiwa itu terjadi.

Nah itu yang perlu diajak si siswa itu berdiskusi. Karena anak-anak SMA itukan mulai terbuka pikirannya, tidak bisa juga ditanamkan secara kaku. Tapi bagaimana mereka ditanamkan dengan mencoba memberikan suatu analisis, mengapa harus seperti itu. Jangan tanya peristiwa Diponegoro kapan? Tapi tanyakan mengapa peristiwa Diponegoro itu terjadi? Sama kalau 17 Agustus, semua orang sudah tahu gitu ya. Tapi kenapa sampai tanggal 17 Agustus proklamasi kita, kenapa tidak sesudahnya dan mengapa tidak sesudahnya. Kenapa harus di rumah Bung Karno dan sebagainya. Kenapa harus di rumah Laksamana Maeda dalam penyusunan naskah proklamasinya. Itu juga harus menjadi salah satu analisis tersendiri.

- R : Pernah mengajar di sekolah mana saja, Pak?
 A : SMA Nurul Fikri, Depok, deket kampus. Saya mengajar kelas 1,2, dan 3. Sejarah semua. Tahun 99-2000.

R : Bagaimana Bapak melihat masyarakat secara luas dalam memandang Gerakan 30 September?

A : Kalau kita lihat, memang berbeda pasca reformasi, ya. Sebelum reformasi itu kan seperti konteks sepeham bahwa G30S ini adalah PKI. Tapi pasca reformasi ini kan muncul beberapa tulisan yang tidak bisa muncul di era Orde Baru. Tulisan-tulisan yang kadang dari penulis luar atau asing. Dan ada beberapa yang tidak suka dengan Orde Baru lebih percaya dengan tulisan-tulisan mereka, dibandingkan para sejarawan dalam negeri sendiri yang mengolah data dan fakta lebih kredibel. Kaitannya itu ya politik. Tapi itu tidak ada masalah, konteks secara akademis bagi sejarawan itu tidak masalah. Tapi bagi masyarakat itu kadang kala membingungkan masyarakat yang tidak paham.

Konteks ketika muncul lagi diputarnya film G30S/PKI itu kemarin itu cukup pengaruh juga ke masyarakat itu. Bahwa mereka terbangunkan kembali kesadaran seperti itu. Pandangan-pandangan itu menurut saya sih *gak* ada masalah. Secara ideologis itu bermasalah bagi generasi muda, karena kalau kita lihat di kampus, mungkin kalau di UIN tidak begitu bermasalah konteks gerakan ideologi mahasiswa. Tapi di universitas-universitas umum itu seperti di kami itu, taktis mahasiswa itu bermacam ideologis. Mulai dari paling kiri sampai yang paling kanan istilahnya. Walaupun dikatakan tidak bisa bergerak, buktinya mereka ada. Kita di kelas waktu diskusi itu keliatan. Waktu mengajar mahasiswa semester lima ke atas itu keliatan. Penting juga untuk dipahami konteks seperti ini, saya selalu melihat bahwa G30S itu PKI. Kalo untuk memahamkan ke masyarakat ini buktinya, sederhana. Kalau saya ke masyarakat dan menggambarkan tujuh teori ini mereka juga tambah bingung.

**TRANSKRIP WAWANCARA MAS SATRIONO PRIYO UTOMO
DENGAN PENULIS (22 AGUSTUS 2020)**

Satriono Priyo Utomo : S

Penulis (Riyan) : R

R : Apa latarbelakang peristiwa sehingga terjadi G30S?

S : Kalau G30S itu latarbelakangnya sebetulnya yang pertama, soal konstelasi politik global. Yang kedua, akumulasi dari dinamika konstelasi politik nasional. Jadi dua itu. Kalau misalkan dari runutan penelitian yang pernah dilakukan oleh sarjana barat. Memang masalahnya selama ini G30S karena pelebelan atas asumsi terhadap gerakannya. Kalau Bung Karno setelah peristiwa itu dia *nyampein* informasi itu namanya Gestok (Gerakan 1 Oktober). Karena terjadi peristiwa penculikan itu di pagi 1 Oktober itu.

Kalau Gerakan 30 September yang pasti konstelasi politik global dan yang kedua konstelasi politik nasional. semua sama-sama menemukan akumulasinya. Sampai kemudian ada 6 teori alternatif soal G30S. Sebetulnya bukan teori sih, jadi *gak* bisa disamakan *apple to apple* misalkan pengetahuan G30S dengan masuknya Islam yang pakai teori melalui Gujarat, India. Nah itu kita *gak* bisa disebut teori. Jadi ada tujuh hal yang sudah diriset dan dirangkum soal G30S. Nah kalo soal konstelasi politik global ini hampir semua rata-rata sarjana barat, terutama lulusan Cornell itu pakai prespektif konstelasi politik global dulu di awal. Nah apa hubungan konstelasi politik global terhadap peristiwa lokal? Ini berhubungan, kita *gak* bisa ngomongin sejarah, teks tanpa konteks ya. Misalkan begini, apa yang terjadi di Indonesia tahun 65, itu di dunia, di Amerika Latin sedang terjadi gejolak revolusi. Dengan Che Guevara, Fidel Castro, sampe masuk ke hutan. Trus juga di Vietnam, itu ada invasi

Amerika. Mangkanya Ho Chi Minh mencoba untuk *survive* melawan, jauh sebelum 65 sebetulnya untuk kasus Vietman. Di Korea pun sebetulnya begitu. Cina transisi tetapi kemudia masih ada sisa-sisa sempalan gimik politik yang dimainkan oleh US pasca perang dunia ke-2 di Cina. Apalagi nanti bicara Cina dengan negara pinggirannya macam Hong Kong, dan segala macamnya. Cina sudah sampai pada tahan revolusi kebudayaan sampai akhirnya banyak negara menghidupi konstelasi politik nasional di Indonesia yang. Ini konstelasi politik global ini nanti kalo ditahapan elite ya, saya melihatnya di tahapan elite politik sama di tahap masyarakatnya ini punya pengaruh penentuan sikap yang berbeda namum pengaruhnya sama di tahap konstelasi politik global.

Nah di lokalnya, dari kondisi kostelasi politik global yang tarik menarik antara blok Amerika dan Uni Soviet atau ikut semangat revolusi Cina atau semangat revolusi Amerika Latin, atau Vietnam. Artinya dunia, mendorong negara-negara dunia ketiga itu untuk berpihak ke salah satu dari mereka. Dan indonesia selama proses 55 – 65 punya politik yang namanya *The New Emerging Forces*. Sampai kemudian politik itu kemudian ditawarkan ke Asia dan Afrika. Dan melahirkan konsep Konferensi Asia- Afrika. Nah. Itu sebenarnya *gak* banyak yang *pengen* liat bahwa ada hubungannya dengan misalkan dari global kemudia turun ke nasional, nasionalnya kita bilang adalah *The New Emerging Forces*. Kita cuma jadi negara sapi perah yang diperas oleh “kolonialisme imperialisme” yang kala itu disebut Soekarno sebagai negara dunia pertama. Sampai pada akhirnya, politik *The New emerging Forces* itu bikin *tagline* “*Go to Hell with Your Aids*”, ya berdikari lah. Berdaulat atas ekonomi kita sendiri. Negara dunia pertama mana yang kemudian *gak* jengah dengan politik seperti itu? Nah, artinya kondisi global dan lokal saling mempengaruhi dan banyak juga kemudian praktik gimik politik yang mewarnai politik Indonesia.

Rangkaian sikap hubungan antara global dan lokal, sebelumnya kan muncul PRRI/Permesta, DI/TII menurut berita di masa itu, surat kabar itu

posisinya semua surat kabar itu milik partai. Punya kepentingan atas partainya. Misalnya di *Harian Rakyat* berbicara PRRI/Permesta itu ada keterlibatan Amerika Serikat, DI/TII juga ada keterlibatan dari Amerika perihal pendanaan dan segala macemnya. Nah artinya, sebetulnya dengan pertanyaan itu kita pingin bilang bahwa sebelum 65 PRRI, DII, apa lagi isu soal 48 entah itu kelompok seberang menganggap itu sebagai pemberontakan, tapi kelompok PKI itu menganggap itu peristiwa yang kemudian selalu ditempelkan sama isu-isu *Red Proposal*, penghancuran komunisme di perang dunia kedua.. Nah informasi-informasi itu beredar juga di kalangan level elit politik Indonesia yang dikonsumsi oleh politikus, oleh kapitalis birokrat yang didominasi oleh partai-partai tertentu dan Jenderal-jenderal Angkatan Perang.

Sampai di situ sebetulnya peristiwa G30S punya pengaruh kepada dua hal itu. Karena semangat *Go to Hell with Your Aids* itu, sampai kemudian Soekarno bikin proyek politik Ganyang Malaysia, kemudian konfrontasi Irian Barat. Setelah itu beberapa proyek politik itu selalu membutuhkan aksi masa atau dukungan massa. Soekarno pada waktu bukan *gak* punya massa ya, Soekarno massa itu sendiri, tapi Soekarno membutuhkan satu perahu yang kemudian mendukung aksi politiknya itu tercapai. Nah Soekarno membutuhkan PKI tentunya, karena PKI berjalan pesat saat itu, untuk ukuran rekrutmen kaderisasi, pendidikan politik dan segala macem. Dan PKI adalah salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan oleh lawan-lawan politik lainnya. Mangkanya sampai kemudian, sejak tahun 50, bahkan pasca kemerdekaan, kondisi politik kita itu selalu dinamis. Pergantian sistem demokrasi kemudian demokrasi parlementer, liberal, gonta-ganti perdana menteri, semua partai saling serang bahkan kemudian ada gimik DI/TII, PRRI/Permesta. Nah, intinya posisinya kalau menurut para peneliti sarjana barat yang saya rangkum ada dua hal. Nah kalau tadi pertanyaannya apa yang melatarbelakangi? Sebetulnya itu, ada dua hal. Kalo saya bisa ngasih gambaran itu dua hal, nah nanti turunannya di Indonesia, mengapa G30S terjadi?

Sederhana karena semua percaya dengan isu Dewan Jenderal, hampir semua percaya dengan isu Dewan Jenderal, kelompok manapun. Maksudnya kekuatan afiliasi. Jadi jangan banyangkan Indonesia itu utuh. Level elit dan masyarakat itu udah beda. Di elit hampir semua faksi-faksi kekuatan politik itu percaya dengan adanya isu Dewan Jenderal. Hampir semua percaya, PKI, birokrasi dan instansi seperti angkatan itu mereka percaya.

Ketika ada isu tentang Dewan Jenderal dan di satu sisi ada proyek politiknya Soekarno, konfrontasi Malaysia dan Irian Barat, artinya di konteks politik nasional, semua faksi kelompok ingin berebut pengaruh untuk mempengaruhi Soekarno. Semua orang ingin cari panggung. Dalam posisi itu semua kelompok ingin memainkan peran pentingnya dalam proyek politiknya Soekarno. Sebetulnya titik poinnya di situ. Ada isu Dewan Jenderal, nanti kemudian dari soal Dewan Jenderal ini juga ada akumulasi. Kalau di Angkatan Darat pasti ada akumulasi soal kekecewaan *refresh* struktural. Dan juga ada konflik yang mengakar seperti semacam genealogi. Kayak kamu angkatan darat, kamu dari KNIL atau kamu dari Peta. Itu masih ada. Kamu laskar mana? Apakah kamu laskarnya kiri atau laskarnya kanan? Karena pendirian angkatan perang kita itu sebenarnya bermasalah karena di tahun 48, Hatta mengeluarkan Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera). Itu hampir menyingkirkan beberapa kelompok yang mereka merasa berkontribusi terhadap rebuplik ini. Perang, bergerilya, namun kemudian tidak direkrut dalam angkatan perang kita. Sebetulnya itu titik akumulasi 65. Tahun 65 itu adalah titik akumulasi kekecewaan dari banyak kelompok soal kondisi politik. Jadi enggak hanya angkatan perang, namun juga partai-partai politik. Itu akumulasi.

Jadi kalau ditanya apa yang melatarbelakangi G30S itu kita enggak bisa pakai satu asumsi pada hari itu juga. Kalau pada hari itu juga, saya berpacu pada apa yang ditulis oleh John Rossa. Taomo Zhou juga menulis adanya klik dunia internasional (politik global) terhadap Gerakan 30 September. Artinya itu adalah *point* yang melatarbelakangi. Kalau *nyeritain* soal internalnya itu memang

sedikit agak rumit, karena rumitnya. Misalnya, soal siapa pelaku gerakan 30 September, atau yang paling sederhana, apa tujuan G30S? Tujuan yang sampai banyak pendekatan itu juga *gak* akan mampu menjelaskan apa tujuan mereka. Rata-rata hampir semuanya, mereka berbicara ingin menyelamatkan kekuasaan Soekarno. Nah, karena ingin menyelamatkan kekuasaannya Soekarno, sederhana memang, apa asumsi berikutnya. Siapa yang dekat dengan Bung Karno, atau Soekarno merasa dekat dengan siapa?

Yang kedua, kalau memang sama-sama ingin melindungi Bung Karno, siapa yang dirugikan setelah Gerakan 30 September dan siapa yang untungkan setelah G30S? Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi pertanyaan. Tapi, intinya sebetulnya tentang G30S. yang pasti adalah adanya isu Dewan Jenderal, dan juga soal Soekarno sakit, sampe akhirnya kemudian soal keterlibatan Soeharto kalau berada di posisinya John Roosa, Soeharto adalah orang yang paling diuntungkan dalam pasca terjadinya gejolak G30S. memang kalau yang kita baca kan, jalannya gerakan itu sederhana. Ingin membawa tujuh jenderal penting ke hadapan Bung Karno. Benar atau enggak soal Dewan Jenderal, apa sih Dewan Jenderal itu. Apakah dia semacam konsep yang kemudian bicara soal formal ketentaraan itu membantu jalannya restrukturisasi di tentara ataukah Dewan Jenderal ini bicara permintaan yang lebih, yang sebelumnya Soekarno memberi pidato bahwa angkatan perang *gak* boleh ikutan politik. Bahwa sampai di situ, melakukan improvisasi terhadap jalannya politik. Dua hal. Akhirnya kemudian di dalam G30S didominasi oleh tentara Cakrabirawa. Kalau korps Cakrabirawa ini memiliki kedekatan dengan partai tertentu, saya pikir itu sah-sah aja. kayak sekarang misalkan gitu, Wiranto dekat dengan PDI, karena dia komunikasi dengan Megawati. Kalau Wiranto saat itu masih menjabat dan dekat dengan tokoh partai politik dan tiba-tiba 98 pecah. Tidak semata-mata wiranto itu dia reformis.

Nah, kemudian beberapa nama di Cakrabirawa itu dekat dengan tokoh-tokoh dari PKI. Saya pikir itu komunikasi yang biasa sebetulnya, yang

kemudian jadi bikin kecewa dari G30S adalah terjadinya pembunuhan yang disebut pahlawan revolusi itu. Dan dalam beberapa pengakuan yang diutarakan dalam sidang Mahmilub kematian para jenderal itu sebagian terjadi karena faktor insidental. Bukan bagian dari kesengajaan. Ya tapi juga itu tidak biasa diyakini sepenuhnya, semisal insidental kenapa kemudian lebih dari satu orang, itu masalahnya gitu. Kalau menurut John Rossa, ada beberapa informasi yang di awal G30S ini sudah mencium bau-bau bahwa para jenderal itu *gak* akan dibawa ke hadapan Soekarno. Karena Bung Karno juga malah dibawa kabur dari Istana. Ada yang kemudian yang memberi informasi bahwa ada peristiwa genting dan Soekarno harus direlokasi. Ya sampai di posisi itu sih sebenarnya. Artinya G30S itu, kalau menurut saya, selalu bermula dari dua itu. Konstelasi politik global dan konstelasi politik local, kemudian adanya isu Dewan Jenderal.

R : Jadi pada saat itu Soekarno tidak punya pasukan? Tidak punya kekuatan?

S : Karena banyak data yang meleset ya. Misal begini, kalau dituduh Soekarno tidak bisa memegang angkatan perang, justru Soekarno ditahun itu masih tetap memiliki kewibawaannya. Sama seperti wibawa di era 40-an. Tapi kan begini, banyak kelompok politik itu yg mulai melihat bahwa lamanya Soekarno memimpin republik menutup potensi mereka untuk “Saya juga bisa untuk memberikan kontribusi terhadap republik”. Nah kalau ditanya soal politik struktur kekuasaan, yang formal. Soekarno kan panglima tertinggi, dan dia pasti dihormati oleh angkatan perang dan ditaati oleh kelompok dan faksi-faksi politik yang lain. Masalahnya kemudian, Soekarno tidak bisa memegang secara penuh satu kelompok politik itu di bawah kendalinya. Karena masing-masing kelompok politik itu punya ketentuan sendiri.

Misalnya begini, kasus Nasution dan Yani, soal lobi-lobi untuk mencari bantuan alutsista dari Uni Soviet dan Amerika. Kita kan punya politik *Go to Hell with Your Aids*, tapi itu kan gimik politik yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia agar punya mimpi terhadap republik ini. Tapi bukan berarti kita sebagai negara dalam pergaulan internasional *gak* butuh investasi atau bantuan. Mangkanya sebetulnya negara tanpa bantuan itu omong kosong. Tapi Soekarno melakukan bantuan itu diluar gimik politik yang dipakai, selain itu dapat bantuan yang saling menguntungkan bukan saling merugikan. Karena banyak kasus batuan yang diberikan oleh dunia pertama atau investasi yang diberikan oleh negara dunia pertama terhadap negara dunia ketiga selalu merugikan negara dunia ketiga. Nah, balik ke soal Nasution, ketika Nasution melobi Soviet, melobi alutsista, bantuan alutsista yang kemudian diberikan oleh Soviet dan Amerika itu tidak dilaporkan sejujurnya oleh Soekarno. Ada bantuan-bantuan kemiliteran yang kemudian diberikan oleh negara seperti Soviet dan Amerika, itu *gak* dilaporkan sepenuhnya oleh Bung Karno secara detail. Entah itu kuantitas, kalau kualitas Bung Karno bisa paham, mangkanya Soekarno juga memainkan semacam manajemen konflik. Dia kan nyuruh orang lain juga, nyuruh Yani untuk bicara soal bantuan alutsista, sampai kemudian beberapa tentara yang dekat dengan afiliasi PKI juga dipakai untuk melobi Soviet untuk alutsista.

Sampai misalkan di penelitiannya Taomo Zhou. Indonesia itu sebenarnya sudah ingin punya nuklir ditahun 60-an. Ternyata yang membuat Amerika khawatir bahwa Cina/Tiongkok sempat membantu infrastruktur dan isi kepala, maksudnya pengetahuan untuk Indonesia membangun nuklir. Tiongkok sudah siap. Udah *deal*. Dan itu kecium. Nah karena itu ada juga pendekatan G30S konstelasi global berbasis Tiongkok. Balik lagi soal Soekarno, ia punya pengaruh. kalau dia *gak* punya pengaruh, Aidit tokoh PKI aja patuh terhadap Soekarno, apa pun yang berbau Soekarno dan kemudian menyenangkan Soekarno, di level birokrasinya, di level elitnya, didukung.

Dalam konfrontasi Malaysia, Aidit menyuplai Pemuda Rakyat. Mendorong Gerwani untuk menjadi sukarelawan. Mereka dikirim ke perbatasan Kalimantan. Aksi-aksi di jalan, mobilisasi massa. PKI dan massanya itu selalu mendukung keinginan politiknya Bung Karno. Padahal *gak* ada garis sturktur antara Bung Karno dan Aidit. Tapi dia masih patuh. Secara kewibawaaan, soekarno masih sangat dipatuhi di mata kekuatan politik kala itu.

R : Apakah akumulasi dari konstelasi politik global pada tahun 65 berhubungan dengan dibubarkannya sistem demokrasi parlementer yang sering gonta-ganti Kabinet?

S : Kalau itu *gak* masalah, itu dinamis. Itu dialektik. Dan Soekarno menganggap pada waktu itu, bahkan bukan dari kelompok kiri, kelompok kanan menganggap sesuatu yang baik untuk sistem kenegaraan dan bernegara. Saya pun juga menganggapnya seperti itu, bagus ada dinamis. Misalnya, kalau *gak* ada pro-kontra dan saling memonopoli itu kan *gak* sehat. Kayak kita sekarang. Dibungkam dan itu jadi *gak* menarik. Nah tapi pada waktu itu, republik kan masih muda umurnya, 45 ke 52, ke 55, lalu pemilu. 10 tahun. Walaupun telat sih, proklamasi tahun 45, pemilu baru tahun 55. Ya kita kan masih cari konsepsi, masih cari dasar negara dan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kalau ditanya ada hubungannya, saya kira hampir semua peristiwa gejolak daerah sebetulnya berasal dari kekecewaan ke pimpinan pusat. Kekuasaan pusat. Bukan berarti Soekarno, sekali lagi, kekuasaan negara itu tidak direpresentasikan oleh Soekarno di masa Presiden Soekarno. Karena bagaimanapun seburuk- buruknya Presiden Soekarno, dia tetap dianggap sebagai *The Founding Father* republik ini dan wibawanya itu masih ada. Dan siapa kemudian yang dianggap salah? Itu Parlementer. Sistem parlementer, demokrasi liberal. Mereka menyalahkan sistem, mereka menyalahkan kelompok-kelompok politik. Mau *gak* mau juga angkatan perang walaupun

mereka tidak berpolitik, dalam asumsi periset dan menurut saya mereka juga masuk dalam kelompok politik. Walaupun dia tidak punya kekuatan politik, dia punya persenjataan yang kemudian mampu menentukan arah politik itu. Nah, tahun 52. Kasus kekecewaan di berbagai daerah, kemudian ada yang mendeklarasikan PRRI/Permesta. Itu akumulasi dari kekecewaan. Improvisasi kekecewaan. Dan kemudian Nasution bawa tank dan kerja sama dengan Sumitro.

R : Teori G30S mana yang Anda anggap mendekati kebenaran?

S : kalau saya meyakini bahwa Gerakan 30 september itu peluang bagi kelompok-kelompok politik yang tidak pernah tahu bahwa itu merupakan semacam judi. Bisa menguntungkan dan bisa merugikan kelompok tersebut. mendukung atau menolak aktivitas yang dilakukan G30S itu. Ada statemen, walaupun *gak* usah pakai statement tapi kalau misalnya seolah-olah kelompok itu mendukung, itu semacam berjudi. Siapa tahu gerakan ini berhasil, membawa benefit untuk dia. Bisa semakin dekat dengan kekuasaan. Begitu pun juga dengan yang kontra. Akhirnya yang menang kan, orang yang seolah-olah tidak mengetahui adanya G30S dan seolah-olah tidak mendukung gerakan ini. Kalau saya ditanya soal itu, saya percaya bahwa dengan Taomo Zhou. Sebenarnya dia mau bilang bahwa PKI terlibat tapi sebagai partai dia tidak terlibat. Sebagai partai dia tidak terlibat, tapi kalau tokoh politiknya, tahu atau tidak terhadap G30S itu tahu. Tapi tidak ada dokumen yang memastikan bahwa orang sipil itu menjadi bagian dari G30S selain orang sipil itu adalah intelijen, yakni Syam Khamaruzaman. Aidit itu kan orang sipil, bukan intelijen, sekalipun pada waktu itu kita enggak bisa memungkiri perkembangan dunia intelijen yang bisa jadi tokoh partai ini adalah agen ganda. Tapi sebetulnya saya meyakini bahwa G30S judi, saya enggak mau bilang siapa yang berada di balik peristiwa ini, aktornya.

Kalau ditanya siapa yang salah? Ya pemimpin dari G30S itu. Yang secara terang-terangan mendeklarasikan diri di radio. Terlepas dari risetnya John Roosa, saya setuju, Tapi kemudian jika menggiring dan memperbesar frekuensi konflik nasional itu bahaya juga. Tapi intinya, sampai pada gerakan 30 September, pimpinan gerakan ini kan udah dimintai pertanggungjawaban, disidang, dimahmilubkan, sampai kemudian di eksekusi. Kalau banyak orang melihat bahwa Aidit diduga terlibat dalam G30S tapi kemudian tidak bisa dibuktikan bagaimana bentuk keterlibatannya. Paling *gak* gini, hampir semua politik itu selalu berpatokan pada kondisi global. Sebelumnya pernah di Afrika, Tunisia, itu pernah berhasil kudeta militer. Referensi luar negeri pada waktu itu menjadi referensi umum buat kelompok politik kita, nanti kemudian soal Chili. Amerika Latin bisa jadi patokan untuk menggulingkan kekuasaan. Karena pakai apa? Logika perang gerilya dan seragamnya pakai seragam militer. Dan disupport oleh dalam tanda kutip kelompok yang berafiliasi oleh Marxisme-Leninisme.

Hampir semua kelompok politik, semangat pada zamannya itu, terinfluen্সe oleh aktivitas luar negeri. Bohong semisal, coba baca risetnya Taomo Zhou, Aidit pernah ketemu sama Mao. Dan juga angkatan perang kita itu adalah faksi politik yang sudah sangat paham kondisi politik kita. Karena itu tumpukan dari sisa-sisa pendidikan militer Belanda, Jepang, dan sisa-sisa perang gerilya 45 yang kemudian mereka terafiliasi dengan banyak ideologi pada waktu itu. Daripada partai yang mengklaim ideologi itu, jauh lebih ideologis adalah orang-orang yang kemudian mengekspresikan diri melalui senjata. Mangkanya Soeharto di majalah DNR, dia adalah alumni Sekolah Patuk, sekolah Marxisme (*Marxhouse*). Itu adalah diskusi terbatas, Soeharto itu pernah ikut sekolah *Marxhouse* Patuk. Tahun 40-an. 45-47.

PKI pindah waktu itu dari Jakarta ke Solo. Kemudian pindah ke Jogja, ya bikin itu. Bikin *Marxhouse*. Kata Sumarsono yang juga militer, itu banyak AD, macam Soeharto itu ikut sekolah diskusi-diskusi Marx yang digagas oleh

kelompok PKI. Nah mangkanya bukan sesuatu yang aneh kalau misalkan orang-orang PKI itu menganggap bahwa Soeharto itu adalah Kameradnya. Itu hal yang biasa, karena kita *gak* ada yang paham bahwa pergaulan sebelum 65. Soeharto itu dikelompok kiri dianggap pro terhadap kekuatan populis kala itu, Walaupun terjadi banyak penyelewengan kala itu, misalnya dia disuruh melaporkan 48 dan soal Jogja, dia kan jadi pengaman ibukota darurat di Jogja. Soeharto alumni Patuk sebetulnya.

R : Jadi, G30S adalah perbuatan yang dikepalai oleh sebagian kelompok elite PKI?

S : Kalau terlibat, saya juga agak bingung ya. Maksudnya keterlibatannya sampai mana? Karena sampai didetik penangkapan Aidit di Boyolali. Tidak ada aktivitas yang kemudian mengarah bahwa Aidit itu ikut dalam rombongan penangkapan Perwira AD, Jenderal AD. Nah itu kan yang agak susah dibantah oleh banyak orang yang kemudian mendorong Aidit terlibat. Keterlibatan Aidit itu sampai sejauh mana posisinya? Misalkan, nih G30S, faktanya adalah penangkapan Jenderal terhadap isu dengan Dewan Jenderal. Ditangkap dan kemudian dibawa ke wilayah teritorial yang pada waktu itu adalah wilayah teritorial yang hanya dijaga oleh angkatan perang juga, tapi dalam angkatan yang berbeda, Angkatan Udara.

R : Aidit terlibat karena dia pemimpin partai?

S : Bahwa G30S itu adalah judi bagi semua kelompok, kalau ditanya keterlibatan. Aidit pasti terlibat, nah keterlibatannya itu sulit dibuktikan, dalam bentuk apa keterlibatannya. Toh kemudian ketika penangkapan, partai enggak merespon. Bikin *headline* di tanggal 1 dan 2 Oktober. Setelah itu enggak ada lagi tuh *Harian Rakyat*. Lalu soal keterlibatan, ya Syam yang terlibat. Karena

Syam mengatur ritme, orang seperti Syam bisa sampai ke percakapan yang sifatnya institusi Cakrabirawa. *Ngakunya* orang sipil.

R : Siapa Syam sebenarnya?

S : Yang pasti dia PKI. Anggota partai. Dia dikader siapa? Dikader di simpul mana? Kalau kita kan, mahasiswa mana? Kampus mana? Kalau lagi konsolidasi gitu. Kalo Syam itu susah dijelasin. Kalau Aidit kan jelas, dia alumni Menteng 31. Syam itu kan tiba-tiba masuk. Tapi juga ada yang bilang Syam itu juga beredar dalam putaran yang tidak pernah ada di ruang publik dalam kurung 45 sampai 50-an, aktivitas itu. Kalau asumsinya Iskandar Subekti, bahwa Aidit tahu akan Gerakan 30 September, tapi soal langkah diambil *gak* ada yang *ngerti*.

R : Mas Satrio pernah mengajar di mana saja?

S : SMA Donbosco, Pulomas. *Ngajar* sosiologi tahun 2015-2016. Terus ke SMA Muhamadiyah, Rawamangun. Tahun 2016-2019, *ngajar* Sejarah Indonesia dan Sejarah Dunia kelas 12. Sempat *ngasdos* di UNJ, *ngampu* Metodologi Sejarah 1 semester.

R : Bagaimana cara Mas Satrio dalam menjelaskan peristiwa G30S di kelas?

S : Pasti mengikuti buku teks ya. Di kelas itu hak kita, urusan kita. Ikutin aja, kalo mau *anti-mainstream*, ya di kepala dan tindakan kamu. Maksudnya guru itu kan merdeka dalam belajar nih. Pancing dengan pertanyaan yang langsung nempel di kepala siswa. Kalau saya *ngajar* 30 September itu pasti saya mulai dari sejak kapan Indonesia merdeka, sama berapa jumlah presiden di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka sudah 70-an tahun sejak saat itu. Nah,

cuma ada tujuh presiden. Tujuh orang tujuh puluh tahun. Berarti satu orang 10 tahun. Terus cari berapa lama masa jabatan presiden dalam sistem demokrasi. Lima tahun. Nah itu bagi tujuh puluh sama lima. Ketemu berapa? Seharusnya kan empat belas ya, kok kita cuma punya tujuh? Kenapa? Oiyaa ini ada yang kelamaan ini jadi presiden ini. Kenapa tuh? Kenapa bisa *ngomong* kelamaan? Coba cari tau. Soeharto itu tiga puluh dua tahun, kok bisa lama ya? Waah ada Supersemar. Apa tu? Saya *gak* pernah cerita loh soal Supersemar. Akhirnya dari interaksi itu, anak-anak tanya Supersemar. Terus saya tanya lagi, berarti Soeharto jadi presiden *gak* pakai Pemilu dong? Tidak sah dong berarti? Nah mulai itu anak-anak tanya, Ada apa *sih*, Pak? Baru masuk konten-konten. Masuk G30S. Cari yang deket-deket saja. Baru nyambung. Nyambung soal Soeharto. *Ngomongin* soal G30S itu enggak gerakannya.

Tahun 67 ada penanaman modal asing untuk pertama kali, mulai kita ada investasi asing. Nah sekarang mangkanya kalian (siswa/i) kenal macam-macam *brand*. Ada sabun merek Unilever. Sebelumnya *gak* ad aitu. Anak-anak pada tanya “kenapa, Pak *gak* ada? Nah ini, sebelum tahun 65, itu pada masa Soekarno. Tadi lah jelasin politik *Go To Hell With Your Aids*. Anak-anak tanya lagi “kenapa kok bisa beda ya, Pak dari sebelum 65 dan setelah 65.” Nah itu arti pentingnya G30S dibahas, bukan dalam bentuk apa, siapa, dan kapan. Tapi soal bagaimana, dan mengapa. Soal apa, siapa, dan kapan itu sisi mahasiswa. Target untuk mereka adalah untuk memancing nalar kritisnya. Guru merdeka atas jam pelajarannya. Pakailah itu sebagai ruang alternatif, dan guru juga harus bersiasat.

- R : Jadi dalam mengajar G30S tetap berusaha untuk menghindari narasi pemerintah?
- S : Kebanyakan teman-teman itu gitu. Kalau di kelas kita *gak* ada yang tau, tapi teman saya kebanyakan dia percaya apa yang jadi bahan diskusi dia di

kampus. Jangan pernah menganggap otonomi guru tidak berlaku ketika dua kali jam perajaran. Itu adalah surganya guru.

R : Berarti tanggungjawab konten materi G30S itu bukan ke pemerintah, tapi ke penyampaian si guru sendiri?

S : Enggak sih, sistem. Saya masih percaya bahwa pengetahuan itu menentukan masyarakat. Masyarakat sesuai dengan pengetahuannya. Nah, kalau pengetahuannya itu soal G30S yang bilang bahwa PKI terlibat dan ada pengungkapan sejarah yang tidak utuh. Dia akan menciptakan masyarakat yang tidak utuh. Nah, caranya bagaimana? Ketika mau membicarakan G30S, kita ada yang namanya negara. Negara punya instrumen namanya kurikulum. Instrumennya lewat buku teks, dan itu tanggung jawab dari Kementerian. Nah, selama sistem pemerintahannya tidak demokratis, pengetahuannya tidak demokratis. Saya masih meyakini itu. Selama kekuasaannya *gak* demokratis, pengetahuannya juga *gak* demokratis. Dan itu sah. Mangkanya, kalau sejarah adalah milik pemenang, sebenarnya enggak juga. Karena semua orang bisa menulis sejarahnya sendiri. Tapi lagi-lagi, karena kita hidup *bernation state*, negara sebagai praktik kebudayaan, artinya kita *gak* mau membicarakan ruang-ruang kecil. Saya masih berharap bahwa kepenulisan buku paket sejarah itu sifatnya hanya *tols* atau instrumen yang kemudian memberikan pengantar terhadap instrumen pembelajaran lain di luar buku paket itu. Nah, kebanyakan buku paket itu, misalnya analisis buku teks sebelum reformasi, atau bahkan sampai 2004, itu instrumennya itu masih mengikuti pengetahuan yang sudah ada. Apakah itu salah, dan salah siapa? Itu *gak* salah.

Karena lagi-lagi negara kan alasannya anggaran, mau mengundang peneliti dan sejarawan untuk melakukan riset itu kan butuh anggaran, mau nulis buku paket kayak ini kan juga mengundang peneliti dari universitas dan butuh anggaran. Belum tentu peneliti di universitas itu melambangkan demokratisasi

pengetahuan di universitas itu. Kita kan lagi-lagi, peneliti kan subjektif, punya afiliasi terhadap gagasan. Punya afiliasi terhadap kepentingan dan sebagainya. Nah lagi-lagi, kalau mau bicara demokratisasi pengetahuan, sistem pendidikannya pun harus demokratis. Selama ini “cara belajar siswa aktif” berhenti di tahun 2004, lanjut KBK, lanjut Kurikulum 2013. Sebetulnya *gak* pengaruh kalau kurikulum. Karena kurikulum itu hanya menentukan KD, KI. Permasalahannya kita itu harus pakai buku paket tunggal. Apakah itu ada motivasi untuk memonopoli pengetahuan? Sebetulnya enggak, karena coba bayangkan apabila tidak ada buku yang difasilitasi oleh negara? masyarakat desa mau baca apa? Itu kan cuma masalah teknis. Tapi lagi-lagi, kontennya dong harus diubah. Dan kita butuh waktu panjang untuk merubah konten itu. Ada siapa di kekuasaan hari ini? Siapa di Kemendikbud dan banyak orang yang berharap terhadap perubahan konten dan segala macamnya. Tapi sampai detik ini belum bisa.

R : Selama menjadi pengajar, apakah terlihat ada pengaruh pembenaran sejarah G30S di sekolah? selain soal pendidikan, menyangkut juga soal ekonomi, politik, dan sebagainya?

S : Saya melihat PKI itu dijadikan isu, pengetahuan kiri itu cuma dijadikan isu gimik politik yang bisa menguntungkan kelompok yang menyuplai isu ini. Nah efek *knowledge* nya soal sejarah, saya sih berharap semacam, kalau sejarah kita menarasikan PKI bahwa mereka pernah melakukan mobilisasi massa dengan pendidikan politik yang menghasilkan orang-orang Indonesia yang melek politik. Apa-apa diprotes. Dalam riset-riset saya, melihat bahwa PKI mampu melakukan mobilisasi massa yang luar biasa sampai kemudian melakukan kontribusi terhadap pendidikan nasional. Dan jika itu masuk dalam satu buku paket dan dikonsumsi oleh publik yang sifatnya formal, itu akan jauh lebih menarik dan akan memunculkan masyarakat yang kemudian melahirkan

kritisisme dan mempunyai bayangan tentang ke-Indonesiaan yang sebetulnya bisa kita imajinasikan bersama. Ya gara-gara Soeharto pelajaran sejarah kemudian lebih banyak eksplor kesukuan, antropologinya lebih didekatkan, budayanya lebih didekatkan. Nah sebetulnya penting bagi sejarah untuk kembali lagi ke semangat zamannya. Di masa Soekarno yang kemudian mampu untuk menjadi *backup* untuk inspirasi gagasan-gagasan dan aktivitas politik. Kalau sejarah ditulis seutuhnya gitu, ya itu tadi, saya berharap bisa menghasilkan masyarakat yang utuh dan dinamis, dan setelah dinamis. Di zaman Soeharto kan terlihat bagaimana PKI dijadikan *common enemy*, padahal PKI-nya sudah *gak* ada. Partainya udah dibubarin.

R : Bagaimana Mas Satrio menilai konten materi pokok G30S dalam buku pelajaran *Sejarah Indonesia Kelas XII* (2018)?

S : Kalau saya pikir secara konten, ini namanya buku paket. Pasti penuh keterbatasan dan segala macamnya. Tapi paling *gak* sisi *angle* positifnya, dia menawarkan berbagai interpretasi soal G30S. Itu sudah cukup bagus, jangan berharap lebih terhadap buku paket yang penjelasannya itu dari ditulis di sini dengan tujuh teori. Jangan berharap penulisannya panjang, dan dijelaskan sebagaimana buku utuh. Tapi untuk menawarkan berbagai perpspektif G30S, poin buku ini, oke. Tapi sekali lagi, buku ini dibuat dalam perspektif yang kemudian masih melihat PKI sebagai objek satu-satunya yang terlibat dalam tragedi G30S. Qalaupun di dalamnya ada tujuh teori. Coba, lihat dari bentuk tugas. Buatlah analisa apa rencana PKI dibalik peristiwa tersebut. Mengapa tidak ada tugas yang sifatnya bukan hanya PKI sebagai objek, gitu loh. Misal, buatlah analisa yang dilakukan oleh Soeharto, buatlah analisa respon soal apa rencana CIA pada gerakan G30S. Kalau dilihat dari bentuk tugas-tugas ini sebetulnya, arahan lanjutnya, mereka masih setia menyatakan bahwa gerakan 30 September salah satu instrumen yang paling vital adalah PKI. Walaupun di

awal mereka, kita harus menaruh rasa hormat karena mereka banyak menawarkan berbagai macam multiinterpretasi, tapi kalau dari tugas, ujung-ujungnya tetap tertuju pada satu interpretasi. Nah, ini yang kemudian menurut saya *gak* adil. Maksudnya, *gak* adil dan demokratis. Terlepas misalnya G30S masih pakai “garis miring” PKI. Walaupun bentuk yang seperti ini semiotik ya. Masih membenarkan bahwa G30S itu PKI. Saya pikir sampai di situ sih buku ini. Secara isi untuk menyampaikan gerakan 30 September, cukup progresif. Walaupun ini bukan hal yang baru untuk mengatakan bahwa ada keterlibatan AD dalam G30S.

Ini sebenarnya sih bukan alternatif sih, ini masih versi yang sama. kalau saya coba melihatnya dari tugas yang diberikan. Selama tugasnya *gak* “keren”, apapun yang progresif di awal jadi runtuh semua. Saya tertarik sama awalnya tentang tujuh teori G30S, tapi ketika sudah masuk ke bagian tugasnya, ya balik lagi. Karena siswa tu bakal fokus soal tugas dari pada di kontennya. Kan kita *gak* mungkin baca semuanya. Cara kita membaca semua isi materi adalah lewat tugasnya. Dengan tugas baru baca. Bukan baca baru *ngerjain* tugas. Nah, kalau dari tugasnya begini, saya yakin yang progresif ini *gak* akan terpakai. Karena satu doang yang dipakai “Apa rencana PKI” Jadi apa arti soal wacana AD, soal CAI itu *gak* ada artinya. Jadi runtuh yang progresif di depan.

R : Apakah ada kaitannya juga dengan pengaruh kurikulum yang digunakan?

S : Patokannya bukan kurikulum, tapi lihat KD KI nya. Karena kalau soal spesifik interpretasi sejarah dalam buku paket sejarah, itu mereka selalu melihat dari kompetensi inti dan Kompetensi dasarnya. Biasanya dari situ, kalau patokannya buku paket itu kurikulum, *gak* juga. Karena kurikulum itu atasannya buku paket. Ada namanya KD. Kalau kurikulum itu *gak* mengatur secara spesifik tentang peristiwa dalam sejarah. Turunanya diperjelas di KD,

atau KI. Misal, untuk semester 1 apa, kelas berapa dan segala macamnya. Nah tapi biasanya, yang bermasalah itu di KD dan KI itu. Ada permintaan detail tentang peristiwa sejarah, salah satunya adalah G30S yang harus kemudian bagaimana mengungkapkan para jenderal itu dibunuh, membicarakan bagaimana gerakan 30 September. Bukan kurikulumnya yang menentukan buku teks, tapi KD yang menentukan buku teks. Kurikulum itu membicarakan instrumen pendidikannya, gambaran dasar pendidikannya. Tapi soal konten pembelajaran, itu *gak* pernah ada di kurikulum. Jadi urutan pangkatnya itu, pertama kurikulum, KD, KI, terus buku teks. KD dan KI ini bukan cuma buku teks, tapi ada RPP.

Kayak *ngomongin* ideologi pancasila aja, yang *ngomongin* turunannya kan UUD. Nah nurunin detailnya lagi pasal per pasal. Jadi di atasnya *gak* bicara panjang lebar. Kurikulum itu perdebatannya sekitar apakah *student oriented*, atau belajar merdeka dan lain-lain. Tapi yang menentukan pembentukan buku teks adalah perumusan KD itu tadi. Kalau itu urusannya di Pusat Kurikulum dan Buku (Puskumbuk). Jadi *gak* ada perumusan kurikulum tentang G30S. Mangkanya biasanya yang dianggap *gak* menarik adalah ya *gak* bisa berbuat apa-apa. Karena perumusan kompetensi dasarnya udah dibuat di Puskumbuk. Jadi para penerbit lain seperti, contoh Erlangga, Tiga Serangkai, itu *gak* bisa lari ke mana-mana selain harus berpatokan sama Kompetensi Dasar yang turunan dari kurikulum itu.

Surat Izin Wawancara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN
Jalan Gajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang
<http://fitk.uin-malang.ac.id>, email : fitk@uin-malang.ac.id

Nomor : 1328 /Un.03.1/TL.00.1/08/2020 24 Agustus 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Satriono Priyo Utomo
di
Jakarta Utara

Assalamu'alaikum W r. W b.

Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:

Nama : Muhamad Fajar Riyandanu
NIM : 16130061
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS)
Semester - Tahun Akademik : Ganjil - 2020/2021
Judul Skripsi : Analisis Wacana Kritis Teks Gerakan 30 September pada Buku Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XII

Lama Penelitian : Agustus 2020 sampai dengan September 2020 (2 bulan)

diberi izin untuk melakukan penelitian di lembaga/instansi yang menjadi wewenang Bapak/Ibu.

Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W r. W b.



Dekan,

(Signature)
Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 19650817 199803 1 003

Tembusan :

1. Yth. Ketua Jurusan PIPS
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG **FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN**
Jalan Gajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang
[http:// fitk.uin-malang.ac.id](http://fitk.uin-malang.ac.id), email : fitk@uin_malang.ac.id

Nomor : 1356 /Un.03.1/TL.00.1/09/2020 07 September 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Dr. Abdurakhman
di
Depok

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:

Nama : Muhamad Fajar Riyandanu
NIM : 16130061
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS)
Semester - Tahun Akademik : Ganjil - 2020/2021
Judul Skripsi : **Analisis Wacana Kritis Teks Gerakan 30 September pada Buku Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XII**
Lama Penelitian : **7 September 2020** sampai dengan **30 September 2020** (1 bulan)

diberi izin untuk melakukan penelitian di lembaga/instansi yang menjadi wewenang Bapak/Ibu.

Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,


Dr. H. Agus Maimun, M.Pd NIP.
19650817 199803 1 003

Tembusan :

1. Yth. Ketua Jurusan PIPS
2. Arsip